



Banda Aceh SMART CITY
2019 - 2029

"Menjadi Kota Pintar Islami
yang Inovatif dan Kompetitif"

BUKU 1

ORGANISASI GERAKAN MENUJU SMART CITY KOTA BANDA ACEH

DEWAN PEMBINA : WALIKOTA BANDA ACEH
KOMITE PELAKSANA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

TIM PENYUSUN :

1. Muhd. Iqbal, S.Si., M.Kom.
2. Drs. Rahmat Kadafi, M.M.
3. T. Taufik Mauliansyah S.Si.T, M.Si.
4. Mahdi, S.Pd., M.M.
5. Zakaria, S.Si., M.Si.
6. Ramadan Putra Siregar, S.Kom.
7. Zulia Maulina, S.Kom.
8. Fajar Ary Prabowo
9. Teuku Ariessa Sukhairi

KATA SAMBUTAN KEPALA DAERAH

Dinamika kehidupan sosial di perkotaan yang semakin tinggi menumbuhkan harapan warga yang semakin meningkat, sementara di sisi lain pemerintah kota memiliki keterbatasan dalam hal personil, anggaran, dan sarana. Ketika dihadapkan pada realita tersebut, kami yakin bahwa jawaban yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan konsep *Smart City*. Kami percaya bahwa layanan publik dapat menjadi lebih efektif, efisien dan lebih mudah ketika kita melibatkan perangkat teknologi serta inovasi-inovasi baru dengan menerapkan konsep *Smart City*.

Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan konsep *Smart City*, yaitu sisi pemerintahan, anggaran dan masyarakat. Dari sisi pemerintahan, aparat birokrasi masih banyak yang memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan maupun implementasi TIK sehingga perlunya peningkatan kualitas SDM pemerintahan selaku *leading sector* penerapan konsep *Smart City* kepada masyarakat. Dari sisi anggaran, penerapan konsep *Smart City* tidak dapat hanya mengandalkan APBK. Oleh karena itu pentingnya mencari investor dan melibatkan swasta. Pemerintah selaku *leading sector* dan katalis yang berperan penting dalam menginformasikan kebutuhan Kota Banda Aceh agar tercapainya tujuan penerapan konsep *Smart City*. Dari sisi masyarakat, perlunya peningkatan literasi yang terkait konsep *Smart City* sehingga masyarakat lebih teredukasi. Kota yang cerdas dimulai dari warga yang cerdas pula. Pada umumnya tingkat melek teknologi warga Kota Banda Aceh sudah cukup baik, literasi internet pun sudah sangat baik. Tetapi, kebiasaan menggunakan teknologi untuk layanan publik masih perlu ditingkatkan. Terkadang, banyak informasi terkini (hal-hal yang dimiliki pemerintah) sangat sulit untuk sampai kepada masyarakat sehingga banyak warga yang belum mengetahuinya. Oleh karena itu penguatan literasi melalui sosialisasi rutin sangat diperlukan untuk membuka wawasan masyarakat.



Banda Aceh, September 2019

WALI KOTA BANDA ACEH

Aminullah Usman, S.E., Ak., M.M.

KATA SAMBUTAN SEKRETARIS DEWAN *SMART CITY*

Kota dan masyarakat di seluruh dunia pada umumnya sedang menghadapi tantangan yang sulit. Lima puluh persen populasi dunia tinggal di daerah perkotaan. Diperkirakan angka ini akan terus bertambah hingga mencapai enam puluh persen. Hal ini menimbulkan tekanan besar pada infrastruktur kota seperti perumahan, transportasi, air, listrik dan layanan kota lainnya. Dibutuhkan belanja modal yang sangat besar untuk penataan ulang. Permasalahan tersebut dapat dikurangi secara cerdas melalui penerapan solusi terukur dengan melibatkan teknologi terdepan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas layanan Kota. Solusi yang dikemas dalam penerapan inovasi dan konsep *Smart City*. Untuk mewujudkan Kota Cerdas atau *Smart City*, sedikit demi sedikit Kota Banda Aceh melakukan penataan di berbagai sektor.



Kami berharap dengan penerapan konsep *Smart City* di Kota Banda Aceh dapat meningkatkan pelayanan masyarakat menjadi lebih baik, lebih transparan, akuntabel dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas di berbagai kegiatan dan layanan. Sebelum mengikuti program gerakan menuju 100 *Smart City*, Kota Banda Aceh telah ada arah menuju *Smart City* dengan pembangunan infrastruktur seperti *data center*, pengembangan aplikasi, pembangunan jaringan *fiber optic* dan lain- lain. Hanya saja belum ada arah menuju integrasi dan kolaborasi antar semua elemen. Diharapkan setelah mengikuti bimbingan teknis dan menyusun dokumen *masterplan*, seluruh elemen dan *stakeholder* dapat menapaki jalan menuju arah yang sama untuk menjadi Kota Pintar.

Banda Aceh, September 2019

SEKRETARIS DEWAN *SMART CITY*

Ir. Bahagia, Dpl., SE.

DAFTAR ISI

1	Analisis Masa Depan.....	1
1.1	Kondisi Umum Daerah.....	1
1.1.1	Profil Kota Banda Aceh.....	1
1.1.2	Aspek Geografi.....	4
1.1.3	Penggunaan Lahan	10
1.1.4	Potensi Pengembangan Wilayah.....	12
1.1.5	Wilayah Rawan Bencana	18
1.2	Isu Strategis	22
1.3	Analisis Tren dan Perkembangan Daerah	30
1.4	Analisis Daya Saing Daerah.....	48
2.	Analisis Kesiapan Daerah.....	55
2.1	Struktur	55
2.1.1	Sumber Daya Manusia	55
2.1.2	Sumber Daya Pemerintah	58
2.1.3	Kapasitas Keuangan Daerah.....	62
2.2	Infrastruktur	67
2.2.1	Infrastruktur Fisik	67
2.2.2	Infrastruktur Digital.....	69
2.2.3	Infrastruktur Sosial	79
2.3	Superstruktur	83
2.3.1	Kesiapan Kebijakan Daerah	83
2.3.2	Kesiapan Lembaga Daerah.....	86
2.3.3	Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah.....	88
3.	Analisis Kesenjangan	90
3.1	Analisis Kesenjangan <i>Smart Governance</i>	90
3.2	Analisis Kesenjangan <i>Smart Branding</i>	93
3.3	Analisis Kesenjangan <i>Smart Economy</i>	97
3.4	Analisis Kesenjangan <i>Smart Living</i>	106
3.5	Analisis Kesenjangan <i>Smart Society</i>	109

3.6	Analisis Kesenjangan <i>Smart Environment</i>	115
4	Analisis Visi Pembangunan <i>Smart City</i>	118
4.1	Analisis Visi Pembangunan Daerah	118
4.2	Sasaran Banda Aceh <i>Smart City</i>	144

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sejarah Kota Banda Aceh	1
Gambar 1.2 Peta Indek Asia Tenggara	2
Gambar 1.3 Prestasi – prestasi Kota Banda Aceh dalam Kurun Waktu 2017 – 2018	3
Gambar 1.4 Lokasi Geografis Kota Banda Aceh	4
Gambar 1.5 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh	5
Gambar 1.6 Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh.....	6
Gambar 1.7 Kondisi Geologi Kota Banda Aceh.....	7
Gambar 1.8 Peta Hidrologi Kota Banda Aceh.....	9
Gambar 1.9 Peta Penggunaan Lahan eksisting Kota Banda Aceh Tahun 2015	12
Gambar 1.10 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh	14
Gambar 1.11 Kawasan Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman	16
Gambar 1.12 Rencana Pengembangan Central Bussiness District (CBD) Keudah	17
Gambar 1.13 Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong	18
Gambar 1.14 Peta Bahaya Angin Puting Beliung Kota Banda Aceh	19
Gambar 1.15 Peta Bahaya Banjir Kota Banda Aceh	20
Gambar 1.16 Peta Bahaya DBD Kota Banda Aceh.....	20
Gambar 1.17 Peta Bahaya Gempa Kota Banda Aceh.....	21
Gambar 1.18 Peta Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh	21
Gambar 1.19 Interaksi Antara Pemerintah, Sistem dan Masyarakat Terkait <i>Smart City</i>	31
Gambar 1.20 Tampilan Aplikasi E-Musrenbang dan IREN	32
Gambar 1.21 <i>User Interface</i> dari Aplikasi WebGis dan Katalog Peta	33
Gambar 1.22 Tampilan Portal Open Data	34
Gambar 1.23 Media Layanan Pengaduan Masyarakat	34
Gambar 1.24 Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36
Gambar 1.25 Aplikasi Terkait dengan Perencanaan Keuangan Daerah	36
Gambar 1.26 Tampilan website pasar.bandaacehkota.go.id.....	37
Gambar 1.27 Tampilan Aplikasi E-Health	38
Gambar 1.28 Konten yang terdapat di dalam aplikasi SPINAKES	38
Gambar 1.29 <i>Interface</i> Aplikasi Antrian Online Dinas Pencatatan Sipil	39
Gambar 1.30 <i>Interface</i> Aplikasi Akta Kelahiran Online Dinas Pencatatan Sipil	39
Gambar 1.31 <i>Interface</i> Aplikasi Akta Kematian Online Dinas Pencatatan Sipil	40
Gambar 1.32 Aplikasi Sinan Sikula.....	41
Gambar 1.33 Tampilan Beranda daripada BASS	41
Gambar 1.34 Rute Trans Koeta Radja.....	42
Gambar 1.35 Rencana Banda Aceh Outering Road (BORR).....	43
Gambar 1.36 Aplikasi Android dan Website lpju Banda Aceh	44
Gambar 1.37 Tampilan Aplikasi SCADA	44

Gambar 1.38 Tampilan Aplikasi E-Berindah	45
Gambar 1.39 Tampilan Aplikasi E-Tree.....	45
Gambar 1.40 Aktivitas di Titik Pengumpulan sampah (WCP)	46
Gambar 1.41 Proses Penghasilan Gas Metan dan Distribusi kepada Warga Sekitar	46
Gambar 1.42 Fasilitas Kolam Oksidasi dan DEWATS	47
Gambar 1.43 Fasilitas Solar Panel di gedung Bappeda Kota Banda Aceh.....	47
Gambar 1.44 PDRB Kota Banda Aceh dari tahun 2015 -2017	50
Gambar 1.45 Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Provinsi Aceh 2014-2017.....	51
Gambar 2.1 Wilayah Administratif Kota Banda Aceh	55
Gambar 2.2 Peta Jaringan Telekomunikasi <i>Fiber Optic</i> Balai Kota ke RSUD Meuraxa.....	70
Gambar 2.3 Distribusi Jaringan Interkoneksi dalam Lingkungan Pemkot Banda Aceh	71
Gambar 2.4 Titik Lokasi Penempatan CCTV di Kota Banda Aceh	72
Gambar 2.5 Jumlah Server Serta Lokasi Penempatan Server di Kota Banda Aceh	74
Gambar 2.6 <i>Escape Building</i> Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh	82
Gambar 3.1 Sistem Perencanaan City Operation Center	92
Gambar 3.2 Skema Sistem DSS Wisata dan E-Budgeting Wisata	96
Gambar 3.3 Skema Sistem DSS Wisata dan E-Budgeting Wisata	97
Gambar 3.4 Penggunaan Aplikasi Oleh Siswa	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh	4
Tabel 1.2 Batas–batas Wilayah Kota Banda Aceh	5
Tabel 1.3 Nama Sungai dan Luas Daerah Alirannya di Kota Banda Aceh	8
Tabel 1.4 Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2017.....	9
Tabel 1.5 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Menurut Penggunaan Lahan (Ha), 2017	11
Tabel 1.6 Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terhadap Luas Kota Banda Aceh, 201211	
Tabel 1.7 Rencana Pusat – Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh	14
Tabel 1.8 Isu Strategis Kota Banda Aceh	23
Tabel 1.9 Perkembangan Konsep <i>Smart City</i> Banda Aceh dari Tahun ke Tahun	31
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh (2015-2017)	55
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan (2017)	56
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Berdasarkan Rentang Usia.....	56
Tabel 2.4 Analisis Kualitas SDM Daerah.....	57
Tabel 2.5 Nama Ibukota Kecamatan di Kota Banda Aceh 2017	59
Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh	60
Tabel 2.7 Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan	61
Tabel 2.8 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh	63
Tabel 2.9 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah.....	64
Tabel 2.10 Analisis Kapasitas Keuangan Daerah.....	66
Tabel 2.11 Banyaknya Sarana Lalu Lintas Jalan di Kota Banda Aceh	67
Tabel 2.12 Daftar Pasar Tradisional Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2017	67
Tabel 2.13 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah.....	68
Tabel 2.14 Kamera <i>Traffic Lights</i> dan Kamera Pemantau dalam Kota Banda Aceh	73
Tabel 2.15 Kamera Pemantau Keramaian Kota Banda Aceh TA. 2017 (Otsus)	73
Tabel 2.16 Ketersediaan Infrastruktur TIK Kota Banda Aceh	75
Tabel 2.17 Beberapa Aplikasi Layanan Publik/Internal Pemko Banda Aceh	76
Tabel 2.18 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah	79
Tabel 2.19 Jumlah Fasilitas Pendidikan berdasarkan Kecamatan di Kota Banda Aceh pada Tahun 2017	79
Tabel 2.20 Fasilitas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2017	80
Tabel 2.21 Perpustakaan Gampong di Kota Banda Aceh, 2017	80
Tabel 2.22 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah.....	83
Tabel 2.23 Peraturan Wali Kota Banda Aceh yang Dapat Dijadikan acuan <i>Smart City</i>	84
Tabel 2.24 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah	85
Tabel 2.25 Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah.....	87

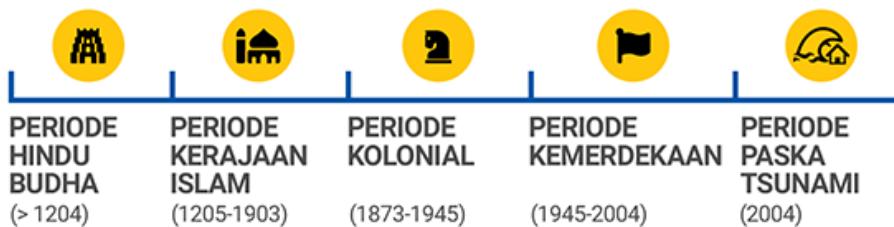
Tabel 2.26 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah	88
Tabel 3.1 Analisis SWOT Dimensi <i>Smart Governance</i>	90
Tabel 3.2 Analisis SWOT Dimensi <i>Smart Branding</i>	93
Tabel 3.3 Analisis SWOT Dimensi <i>Smart Economy</i>	97
Tabel 3.4 Informasi Penyebaran Industri Makanan dan Minuman di Banda Aceh.....	101
Tabel 3.5 Informasi Penyebaran Industri Jasa di Banda Aceh	102
Tabel 3.6 Sambungan Tabel Informasi Penyebaran Industri Jasa di Banda Aceh	102
Tabel 3.7 Sambungan Tabel Informasi Penyebaran Industri Jasa di Banda Aceh	103
Tabel 3.8 Tinjauan Perekonomian Kota Banda Aceh.....	103
Tabel 3.9 Analisis SWOT Dimensi <i>Smart Living</i>	106
Tabel 3.10 Analisis SWOT Dimensi <i>Smart Society</i>	109
Tabel 3.11 Harapan terhadap pendidikan di Kota Banda Aceh Kedepan	112
Tabel 3.12 Analisis SWOT Dimensi <i>Smart Environment</i>	115
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Misi Kota Banda Aceh	119
Tabel 4.2 Arah Kebijakan Kota Banda Aceh dalam Kurun Waktu 5 Tahun.....	122
Tabel 4.3 Sinkronisasi RPJMD terhadap RPJPD Kota Banda Aceh 2007 - 2027.....	122
Tabel 4.4 Sinkronisasi RPJM Kota Banda Aceh dan RPJM Provinsi Aceh.....	123
Tabel 4.5 Sinkronisasi Misi <i>Smart City</i> Kota Banda Aceh dan RPJMD	124
Tabel 4.6 Sinkronisasi Strategi kebijakan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022 dan Dimensi <i>Smart City</i>	126
Tabel 4.7 Sinkronisasi Tujuan dan Indikator Kinerja Utama RPJMD dengan Dimensi <i>Smart City</i>	130
Tabel 4.8 Sinkronisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Banda Aceh dengan	132
Tabel 4.9 Sasaran Kota Banda Aceh terkait <i>Smart Governance</i>	144
Tabel 4.10 Sasaran Kota Banda Aceh terkait <i>Smart Branding</i>	145
Tabel 4.11 Sasaran Kota Banda Aceh terkait <i>Smart Economy</i>	147
Tabel 4.12 Sasaran Kota Banda Aceh terkait <i>Smart Living</i>	147
Tabel 4.13 Sasaran Kota Banda Aceh terkait <i>Smart Society</i>	148
Tabel 4.14 Sasaran Kota Banda Aceh terkait <i>Smart Environment</i>	150

1 Analisis Masa Depan

1.1 Kondisi Umum Daerah

1.1.1 Profil Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh memiliki sejarah panjang yang dimulai dari masa Kerajaan Aceh Darussalam. Dimana, Bandar Aceh Darussalam adalah merupakan ibu kota Kerajaan Aceh Darussalam yang dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh.



Gambar 1.1 Sejarah Kota Banda Aceh

Sumber: <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>

Kota Banda Aceh telah berusia 813 tahun dan merupakan salah satu kota islam tertua di Asia Tenggara. Di masa jayanya, Bandar Aceh Darussalam merupakan pusat pendidikan islam yang dikunjungi oleh banyak pelajar dari seluruh dunia. Hingga saat ini, pemerintah Kota Banda Aceh tetap konsisten menerapkan syariat Islam secara kaffah dengan memperkuat pelaksanaan aqidah dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat sehingga mewujudkan nilai-nilai islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh terletak pada lokasi yang strategis, berhadapan dengan negara – negara di bagian selatan Benua Asia dan juga merupakan jalur perdagangan dimasa lampau. Banda Aceh dulu merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa, dan India. Selain itu, Kota Banda Aceh juga merupakan pintu gerbang Republik Indonesia di bagian barat. Berdasarkan letaknya yang strategis ini menjadikan Kota Banda Aceh sebagai wilayah dengan peluang perekonomian yang baik. Maka diharapkan pengembangan dan pemantapan Kota Banda Aceh sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu bersaing secara internasional.



Gambar 1.2 Peta Indek Asia Tenggara

Sumber: ITMP Kota Banda Aceh

Hingga saat ini, peninggalan sejarah Kerajaan Aceh Darussalam masih tersebar di setiap sudut Kota Banda Aceh, seperti Mesjid Baiturrahman, makam sultan dan ulama serta landmark seperti Gunongan, Taman Putroe Phang. Selain daripada itu, juga masih banyak terdapat peninggalan sejarah kolonial Belanda dan Perang Aceh yang terlihat dari peninggalan bangunan berarsitektur Belanda serta situs sejarah seperti kuburan Belanda Kerkoff di Gampong Sukaramai. Peninggalan-peninggalan ini menunjukkan bahwa Banda Aceh adalah kota yang kaya akan sejarah.

Tonggak sejarah besar lainnya yang tercatat dalam riwayat Kota Banda Aceh adalah bencana gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004, yang menyisakan luka mendalam bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Bencana besar ini meninggalkan situs-situs pengingat akan masa duka itu, seperti Mesjid Baiturrahim di Meuraxa yang selamat dari bencana tersebut meskipun berada di dekat pantai, PLTD Apung, Kapal di Atas Rumah Penduduk di Gampong Lampulo dan Kuburan massal korban tsunami. Maka dengan sejarah panjang dan peninggalan yang ada, Kota Banda Aceh diharapkan dapat menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, dengan mengusung wisata halal dan Islami.

Kota Banda Aceh memiliki potensi yang sangat besar untuk lebih maju dan berkembang dengan segala sumber daya yang tersedia. Upaya memajukan Kota ini dapat dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan yang didapatkan. Beberapa prestasi yang telah diraih oleh Kota Banda Aceh sepanjang tahun 2017 – 2018 antara lain adalah:



PRESTASI KOTA BANDA ACEH

2017 - 2018

No	Penghargaan	Dari	Tahun
1.	Wali Kota Entrepreneur Award	Kementerian Koperasi dan UKM	2018
2.	Konsistensi Pengembangan Wisata Daerah	Pemerintah Aceh	2018
3.	Peringkat I Survei Penilaian Integritas (SPI)	KPK-RI	2018
4.	Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik dengan Katagori Sangat Baik	Kemen PAN-RB RI	2018
5.	Anugerah Pesona Indonesia (API) kategori Wisata Halal Terpopuler	Kementerian Pariwisata RI	2018
6.	Anugerah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Komisi Aparatur Sipil Negara	2018
7.	Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara berturut-turut selama 10 kali sejak 2008-2017	Kemenkeu RI	2018
8.	Kota Referensi Layanan Pendidikan di Aceh	Pemerintah Aceh	2018
9.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 2017	BPK-RI	2018
10.	Universal Health Coverage (UHC) JKN-KIS Award	Kemendagri RI	2018
11.	Ikawapi Award kategori <i>Social Achievement</i>	Ikawapi	2018
12.	Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik	Ombudsman RI	2017
13.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbaik se-Aceh	Komisi Informasi Aceh	2017
14.	Implementasi Smart City Nusantara	PT Telkom Indonesia	2017
15.	Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh	2017
16.	Aceh Invesment Award	Pemerintah Aceh	2017
17.	Anugerah Kebudayaan	Kemendikbud RI	2017
18.	Kota Referensi Layanan Pendidikan di Aceh	Provinsi Aceh	2017
19.	Piala Adipura	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2017
20.	Kota dengan Pengelolaan Kepegawaian Terbaik	Badan Kepegawaian Negara	2017

Gambar 1.3 Prestasi-prestasi Kota Banda Aceh dalam Kurun Waktu 2017 – 2018

Sumber: www.bandaacehkota.go.id/prestasi.html

1.1.2 Aspek Geografi



Gambar 1.4 Lokasi Geografis Kota Banda Aceh

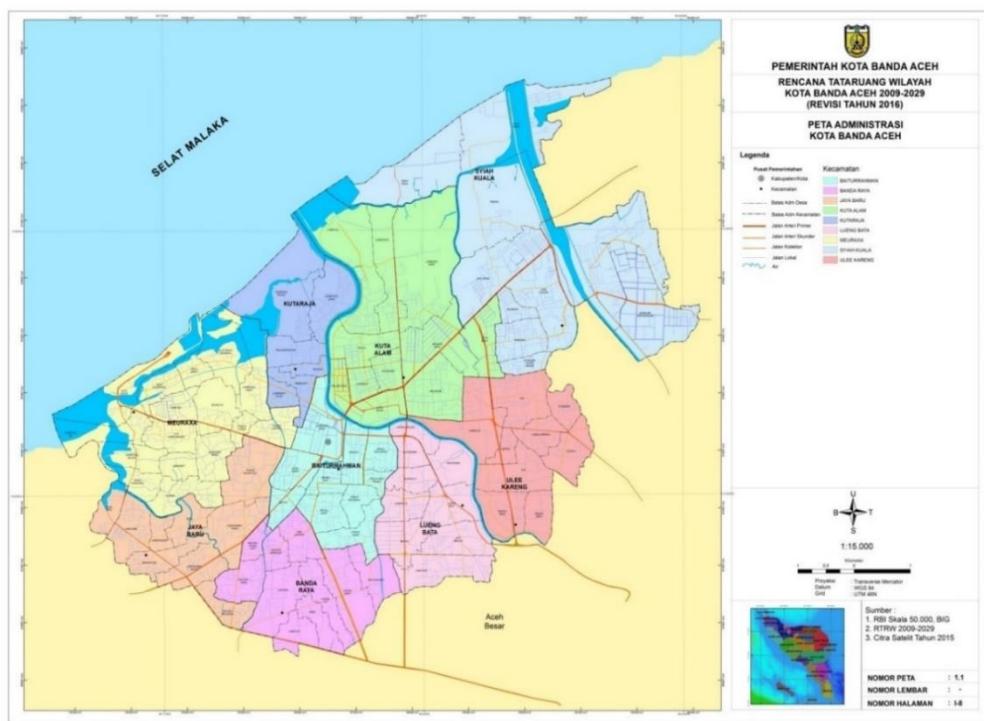
Sumber: Profil Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh memiliki posisi sangat strategis dengan letak geografis berada di antara 05°30' - 05°35' LU dan 95°30' - 99°16' BT, yang terdiri dari 9 kecamatan, 90 Gampong. Berdasarkan hasil digitasi GIS Citra Satelit pada Tahun 2015, luas wilayah Kota Banda Aceh adalah 59,002 km², dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas	
		(Km ²)	Persentase
1.	Kec. Meuraxa	8,459	14,34%
2.	Kec. Baiturrahman	4,142	7,02%
3.	Kec. Kuta Alam	9,587	16,25%
4.	Kec. Syiah Kuala	13,591	23,03%
5.	Kec. Ulee Kareng	5,182	8,78%
6.	Kec. Banda Raya	4,949	8,39%
7.	Kec. Kuta Raja	3,889	6,59%
8.	Kec. Lueng Bata	4,445	7,53%
9.	Kec. Jaya Baru	4,759	8,07%
JUMLAH		59,002	100,00%

Sumber: Hasil Digitasi GIS, Citra Satelit Tahun 2015.



Gambar 1.5 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh

Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Adapun batas-batas administrasi wilayah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Batas-batas Wilayah Kota Banda Aceh

Arah Mata Angin	Batas Wilayah
Utara	Selat Malaka.
Selatan	Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
Barat	Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar
Timur	Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

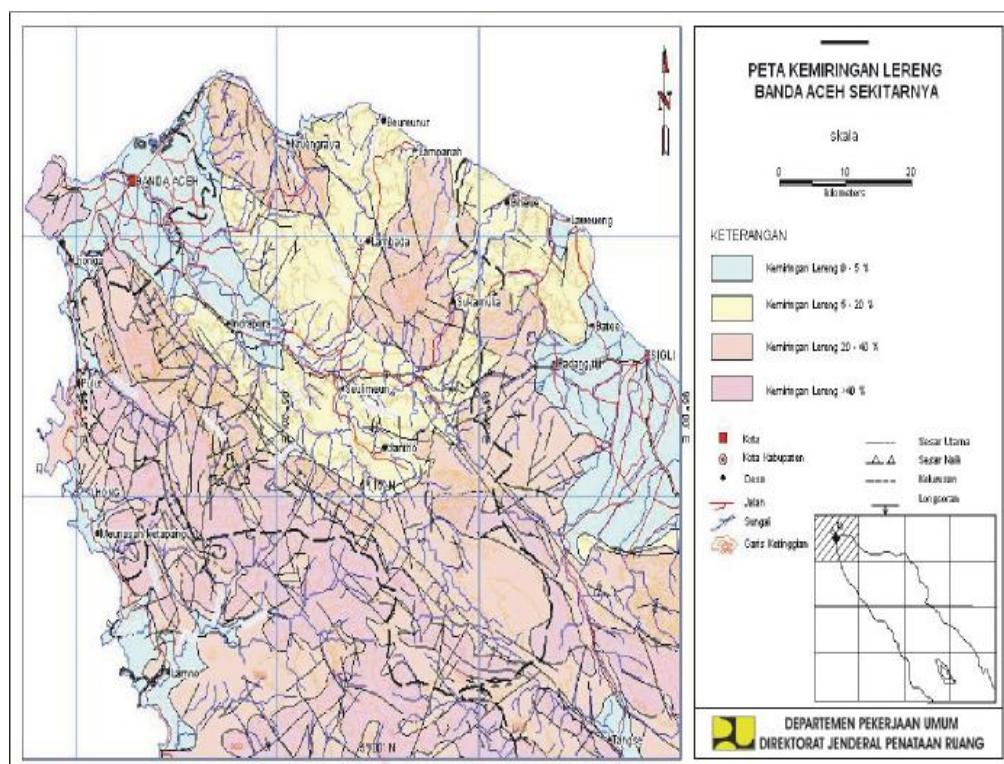
1.1.2.1 Topografi & Fisiografi

Kondisi topografi (ketinggian) Kota Banda Aceh berkisar antara -0,45 m sampai dengan +1,00 m di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian 0,80 m dpl. Bentuk permukaan lahannya (fisiografi) relatif datar dengan kemiringan (lereng) antara 2 - 8%. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, meskipun demikian, bentuk permukaan ini sangat rentan terhadap genangan. Hal ini pada khususnya terjadi pada saat pasang dan gelombang air laut, terutama pada wilayah bagian Utara atau pesisir pantai.

Selain daripada itu, Kota Banda Aceh dan sekitarnya secara topografi merupakan dataran banjir Krueng Aceh. Dimana 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 5

meter dpl. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 meter dpl. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut.

Kondisi topografi dan fisiografi lahan sangat berpengaruh terhadap sistem drainase. Kondisi drainase di Kota Banda Aceh cukup bervariasi, yaitu jarang tergenang seperti pada wilayah Timur dan Selatan kota, sering tergenang dan tergenang terus-menerus seperti pada kawasan rawa-rawa/genangan air asin, tambak dan atau pada lahan dengan ketinggian di bawah permukaan laut baik pada saat pasang maupun surut air laut. Kondisi topografi kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 1.5 Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh Sekitarnya berikut ini.



Gambar 1.6 Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh
Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

1.1.2.2 Geomorfologi

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas formasi batuan vulkanis tertier (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breueh), formasi batuan sedimen, formasi endapan batu (di sepanjang Kr. Aceh), formasi batuan kapur (di bagian timur), formasi batuan vulkanis tua terlipat (dibagian selatan), formasi batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam.

Geomorfologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi pendataran yang terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian

Kecamatan Kuta Raja, dan pesisir pantai yang terletak di wilayah barat atau sebagian Kecamatan Meuraxa.

Daerah pendataran di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari endapan sistem marin yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan endapan (aluvial) marin yang terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini dijumpai di dataran pantai yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan berupa jalur-jalur beting pasir resen dan subresen. Beting pasir resen berada paling dekat dengan laut dan selalu mendapat tambahan baru yang berupa endapan pasir, sedangkan beting pasir subresen dibentuk oleh bahan-bahan yang berupa endapan pasir tua, endapan sungai, dan bahan-bahan aluvial/koluvial dari daerah sekitarnya.

1.1.2.3 Geologi

Secara geologis, Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif yang memanjang dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan, yang dikenal sebagai Sesar Semangko (*Semangko Fault*). Oleh karenanya daerah yang terlintasi patahan ini rentan terhadap gempa dan longsor. Patahan ini bergeser sekitar 11 cm/tahun dan merupakan daerah rawan gempa dan longsor. Seperti terlihat pada Gambar 1.6. menunjukkan ruas-ruas patahan Semangko di Pulau Sumatera dan juga kedudukan-nya terhadap Kota Banda Aceh. Selain dari pada itu, Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, dan kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di Tenggara Kota. Sehingga sesungguhnya Banda Aceh adalah suatu daratan hasil ambalan sejak Pilosen, membentuk suatu Graben, sehingga dataran Banda Aceh ini merupakan batuan sedimen yang berpengaruh kuat apabila terjadi gempa di sekitarnya.



Gambar 1.7 Kondisi Geologi Kota Banda Aceh
Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Kota Banda Aceh juga berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia berjarak ± 130 km dari garis pantai barat sehingga daerah ini rawan terhadap Tsunami.

Litologi Kota Banda Aceh merupakan susunan batuan yang kompleks, terdiri dari batuan sedimen, meta sedimen, batu gamping, batuan hasil letusan gunung api, endapan alluvium, dan intrusi batuan beku, berumur holosen hingga Pra-Tersier, dan secara umum dibagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu :

- Alluvium
- Batuan Kuarter (sedimen dan volkanik)
- Batuan Tersier (sedimen dan volkanik)
- Batuan metasedimen, malihan, dan terobosan Pra-Tersier

1.1.2.4 Hidrologi

Terdapat 7 (tujuh) sungai yang melalui Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai daerah aliran sungai dan sumber air baku, kegiatan perikanan, dan sebagainya. Wilayah Kota Banda Aceh memiliki air tanah yang bersifat asin, payau dan tawar. Daerah dengan air tanah asin terdapat pada bagian utara dan timur kota sampai ke tengah kota. Air payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur ke barat. Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian selatan kota membentang dari Kecamatan Baiturrahman sampai Kecamatan Jaya Baru, yang juga mencakup Kecamatan Lueng Bata, Ulee Kareng, Banda Raya, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.2. Nama Sungai dan luas daerah alirannya di Kota Banda Aceh berikut ini:

Tabel 1.3 Nama Sungai dan Luas Daerah Alirannya di Kota Banda Aceh

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Krueng Aceh	723,60
2	Krueng Daroy	3,60
3	Krueng Doy	2,00
4	Krueng Neng	4,10
5	Krueng Lueng Paga	26,33
6	Krueng Tanjung	2,25
7	Krueng Titi Panjang	1,60
8	Krueng Kon Keumeh	3,27
9	Krueng Geunasen	1,25

Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Peta Hidrologi di Kota Banda Aceh dapat di lihat pada Gambar. 1.8 berikut ini.



Gambar 1.8 Peta Hidrologi Kota Banda Aceh

Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

1.1.2.5 Klimatologi

Berdasarkan data klimatologi untuk wilayah Kota Banda Aceh yang diperoleh dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Indrapuri di tahun 2017 menunjukkan bahwa, suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara 26°C dengan suhu maksimal 34 °C dan minimal 22,4 °C dengan tekanan udara (minibar) rata - rata 1012,617 (mb).

Curah hujan kota Banda Aceh terbesar pada tahun 2017 terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 259 mm dan terkecil terjadi pada bulan April sebesar 15 mm. Jumlah curah hujan ini selama tahun 2017 yaitu sebesar 1146 mm, dengan rata-rata per bulannya sebesar 99,5 mm/bulan. Sementara itu kelembaban udara rata-rata per bulan dalam satu tahun yaitu 82%.

Tabel 1.4 Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2017

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Tekanan Udara Rata - Rata (mb)	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Arah Angin Terbanyak	Kecepatan Angin Rata - Rata (Knot)
1.	Januari	259	1012,8	25,7	87	130/SE	3,3
2.	Februari	73	1014,1	26,3	82	130/SE	4,4
3.	Maret	113	1013,3	26,2	85	130/SE	3,6
4.	April	15	1013,0	26,6	85	130/SE	3,3
5.	Mei	135	1011,8	27,5	81	130/SE	3,3
6.	Juni	23	1012,0	27,7	76	180/S	3,8
7.	Juli	31	1012,1	28,3	70	180/S	5,3
8.	Agustus	47	1011,8	27,1	77	130/SE	4,1
9.	September	127	1012,7	26,6	84	130/SE	3,5
10.	Oktober	40	1012,4	26,6	81	130/SE	4,0
11.	November	147	1012,5	26,1	89	130/SE	3,3
12.	Desember	136	1012,9	26,0	87	130/SE	2,9
Jumlah		1146	-	-	-		-
Rata-rata		95,5	1012,617	26,7	82		3,73

Sumber: Banda Aceh dalam angka 2018

1.1.3 Penggunaan Lahan

Berdasarkan kondisi saat ini, kecenderungan perkembangan kota Banda Aceh lebih mengarah pada bagian timur dan bagian selatan kota Banda Aceh. Di bagian timur, arah perkembangan Kota terjadi di wilayah Ulee Kareeng dan sekitarnya. Saat ini, kawasan Ulee Kareng telah didominasi oleh aktivitas perdagangan dan jasa dan aktivitas permukiman. Kawasan ini semakin berkembang akibat adanya pergeseran atau perembetan perkembangan fisik kota dikarenakan kawasan ini tidak ikut terkena dampak bencana tsunami. Ditambah dengan lokasinya yang tidak jauh dari kawasan pusat pendidikan yakni Kopelma Darussalam (IAIN, dan Unsyiah) dan Lampoh Keudee (Universitas Abulyama), sehingga menarik aktivitas lain seperti permukiman yang dapat dilihat dari tingginya alih fungsi lahan dari ex-persawahan menjadi area permukiman – permukiman baru.

Sedangkan untuk bagian selatan, perkembangan fisik kota sebagian bahkan telah merembet hingga ke wilayah kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dikarenakan secara administratif, wilayah yang mengalami perkembangan berbatasan langsung dengan kabupaten Aceh Besar. Adapun perkembangan dibagian selatan ini meliputi sebagian wilayah kecamatan Baiturrahman (Neusu) dan kecamatan Banda Raya (Lamlagang, Lhong Raya, Lampeuot), dan wilayah Batoh dan Lamdom. Perkembangan fisik kota dibagian selatan ini salah satunya juga dilatar belakangi oleh tidak terkena dampak langsung bencana tsunami 2004 silam. Adapun aktivitas yang berkembang di bagian selatan ini meliputi aktivitas permukiman yang perdagangan dan jasa, permukiman dan olahraga (keberadaan stadion harapan bangsa Lhong raya sebagai sport center).

Adapun pemanfaatan Luas Wilayah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Menurut Penggunaan Lahan (Ha), 2017

No.	Jenis Penggunaan <i>Type of Function</i>	Luas Area	Percentase <i>Percentage</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kawasan Lindung			
1.	Kawasan Perlindungan Setempat	142,61	2,42
2.	Kawasan Cagar Budaya	9,01	0,15
3.	Ruang Terbuka Hijau	637,01	10,79
Kawasan Budidaya			
1.	Kawasan Perumahan	1 915,94	32,45
2.	Kawasan Perdagangan dan Jasa	637,01	10,79
3.	Kawasan Perkantoran	108,51	1,84
4.	Kawasan Pariwisata	61,07	1,03
5.	Ruang Terbuka Non Hijau	44,02	0,75
6.	Kawasan Perikanan	79,15	1,34
7.	Kawasan Peruntukan Lainnya	340,2	5,76
8.	Kawasan Pelabuhan	10,2	0,17
9.	Kosong/jalan	351,8	5,96
10.	Air	475,56	8,06
11.	Campuran	1 091,33	18,49

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

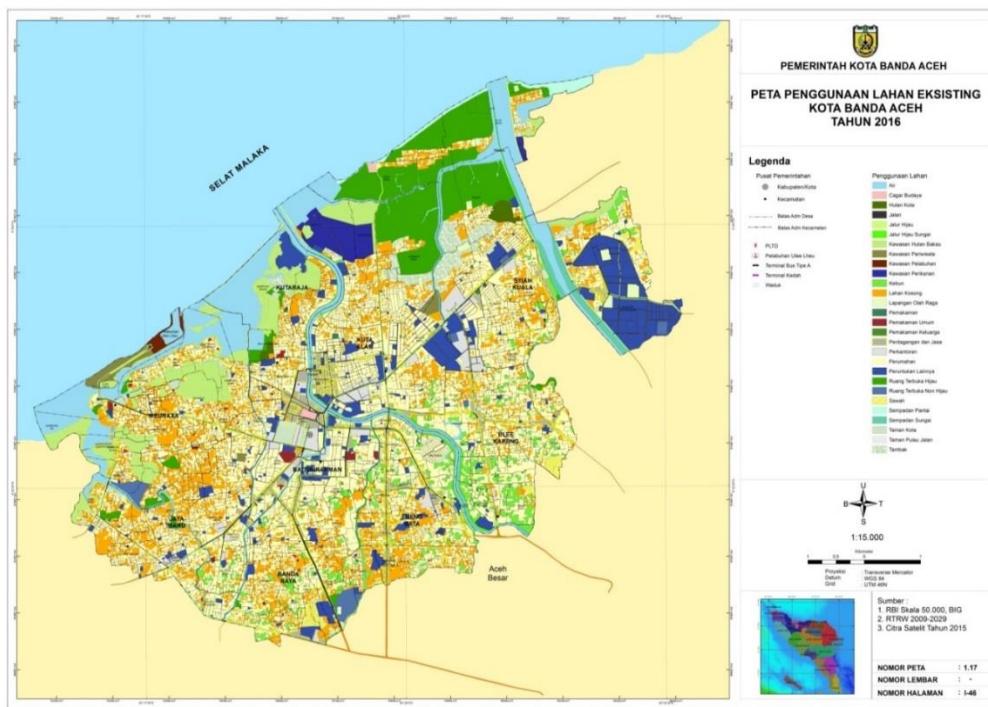
Sedangkan jumlah persentase kawasan yang terkait dengan ruang terbuka hijau di Kota Banda Aceh juga semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti dapat dilihat pada table 1.6

Tabel 1.6 Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terhadap Luas Kota Banda Aceh, 2012

Tahun <i>Year</i>	Persentase RTH Terhadap Luas Kota Banda Aceh <i>Percentage</i>
(1)	(2)
2012	11,87
2013	12,53
2014	13,11
2015	13,20
2016	13,22

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

Dimana, pemanfaatan lahan eksisting di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada pada Gambar 1.9 terkait dengan Penggunaan Lahan eksisting Kota Banda Aceh Tahun 2015 berikut ini.



Gambar 1.9 Peta Penggunaan Lahan eksisting Kota Banda Aceh Tahun 2015
 Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

1.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Sistem Perkotaan Nasional, Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, yang disusun berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007. Namun seiring dengan isu penataan ruang yang mendasari perumusan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Banda Aceh 20 tahun ke depan, maka hirarki Kota Banda Aceh diusulkan untuk dipromosikan dan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Penetapan Kota Banda Aceh sebagai PKN ini juga sejalan dengan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang serta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Aceh Tahun 2013 – 2033.

1.1.4.1 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Dalam pengembangan ke depannya, Kota Banda Aceh direncanakan dikembangkan dalam 4 Wilayah Pengembangan (WP), yaitu:

WP Pusat Kota Lama

1. WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam dan Kuta Raja, berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan regional dan pemerintahan. Fungsi ini didukung oleh kegiatan jasa komersial, perbankan, perkantoran, pelayanan umum dan sosial, kawasan permukiman perkotaan, industri kecil/kerajinan, pusat kebudayaan dan Islamic Center. WP ini juga berfungsi sebagai pusat pelayanan tujuan wisata budaya dan

agama bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Banda Aceh. Pusat WP ditetapkan di Kawasan Pasar Aceh dan Peunayong

2. WP Pusat Kota Baru

WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Banda Raya dan Lueng Bata, merupakan pengembangan wilayah kota ke arah bagian Selatan, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan olah raga (sport centre), terminal AKAP dan AKDP, perdagangan dan jasa serta pergudangan. Pusat WP ditetapkan di Batoh dan Lamdom.

3. WP Keutapang

WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Meuraxa dan Jaya Baru, merupakan pengembangan wilayah kota ke arah bagian Barat. WP ini difungsikan sebagai pusat kegiatan pelabuhan dan wisata, yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, dan sebagainya. Pusat WP ditetapkan di Keutapang.

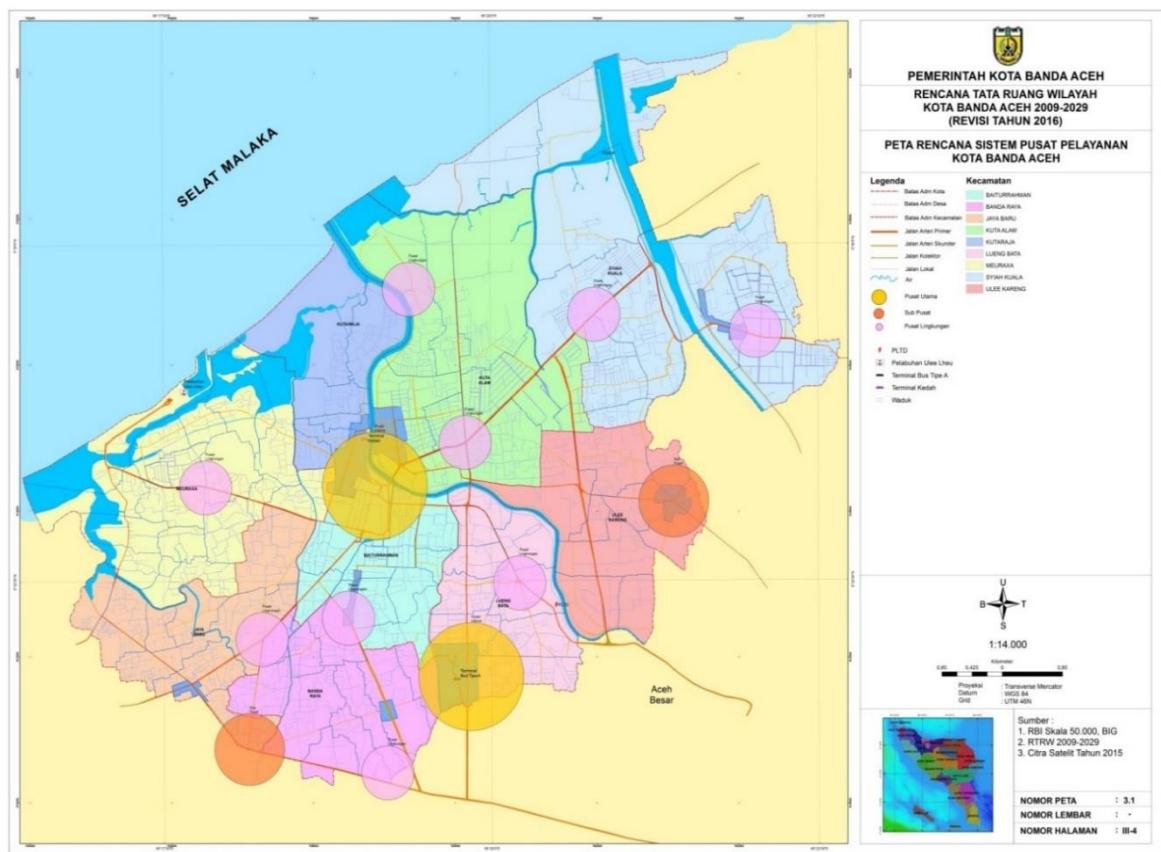
4. WP Ulee Kareng

WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng, merupakan pengembangan wilayah kota ke bagian Timur, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial kota seperti halnya pendidikan, kesehatan dan kegiatan lain yang komplementer dengan kedua kegiatan tersebut. Pusat WP ditetapkan di Ulee Kareng.

Ke-4 Wilayah Pengembangan tersebut menjadi dasar dalam menentukan Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh 20 tahun depan, dimana direncanakan 2 Pusat Kota dan 2 Sub Pusat Kota, yaitu :

1. Pusat Kota Lama Pasar Aceh – Peunayong
2. Pusat Kota Baru Batoh/Lamdom
3. Sub Pusat Kota Keutapang
4. Sub Pusat Kota Ulee Kareng

Dimana, rencana sistem pusat pelayanan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 1.10 dan Tabel 1.7.



Gambar 1.10 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh

Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Tabel 1.7 Rencana Pusat – Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh

No	Pusat Pelayanan / Subpusat Pelayanan/ Unit Lingkungan	Fungsi	Skala Pelayanan
A.	Pusat Kota		
1.	Peunayong / Kampung Baru (Pusat Kota Lama)	Pusat pemerintahan Kota Banda Aceh Perdagangan dan Jasa Perkantoran	Regional & Kota
2.	Batoh/Lamdom (Pusat Kota Baru)	Pusat pemerintahan / perkantoran yang baru Pusat perdagangan dan jasa Permukiman	Regional Regional & Kota
B.	Sub Pusat Kota		
1.	Keutapang	Perdagangan dan Jasa Permukiman	Regional dan Lokal
2.	Ulee Kareng	Perdagangan dan jasa Permukiman	Kota dan lokal
C.	Pusat Lingkungan		
1.	Lampulo	Pelabuhan ikan	Regional & Kota

		Galangan kapal Industri pengolahan ikan Perumahan nelayan	
2.	Jambo Tape	Pusat Pemerintahan Prov Aceh & regional Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting) Perdagangan dan jasa	Kota dan Lokal
3.	Neusu	Perdagangan dan jasa Permukiman	Kota dan lokal
4.	Kopelma Darussalam	Pendidikan Perdagangan dan jasa	regional Kota dan lokal
5	Jeulingke	Pusat Pemerintahan Prov Aceh & regional Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting) Perdagangan dan jasa Permukiman	Kota dan Lokal
6	Lueng Bata	Perdagangan dan jasa Permukiman	Kota dan lokal
7	Mibo	Pusat Pemerintahan dan Perkantoran Kota Banda Aceh Perdagangan dan jasa Permukiman	Kota dan Lokal
8	Blang Oi	Perdagangan dan jasa Permukiman Perikanan Pelabuhan Wisata	Kota dan lokal Regional dan Lokal
9	Lamteumen	Perkantoran Perdagangan dan jasa Permukiman	Regional, Kota dan lokal

Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

1.1.4.2 Rencana Pengembangan Kawasan Pusat Kota Lama Kota Banda Aceh

Rencana pengembangan kawasan pusat kota lama Kota Banda Aceh, bertujuan untuk meningkatkan nilai *heritage* kawasan Pusat Kota Lama, sehingga meningkatkan nilai historis Kota Banda Aceh. Beberapa kawasan yang menjadi perhatian dalam rencana ini adalah:

1. Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman

Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman bertujuan untuk meningkatkan nilai historis dan memberikan citra baru terhadap *landmark* Provinsi Aceh, sehingga kawasan ini dapat terpadu sebagai kawasan *heritage* dengan kawasan komersial Kota Banda Aceh yang memiliki nilai yang tinggi terhadap fungsi dan citra kawasan. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan terhadap pengembangan kawasan ini adalah peningkatan

landmark Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh serta mendukung penataan kawasan *water front city*, dimana Sungai Krueng Aceh dan jembatan Pante Pirak menjadi salah satu gerbang masuk ke kawasan Mesjid Raya Baiturrahman.



Gambar 1.11 Kawasan Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman

Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

2. Pengembangan Kawasan CBD (Central Bussiness District) Peunayong

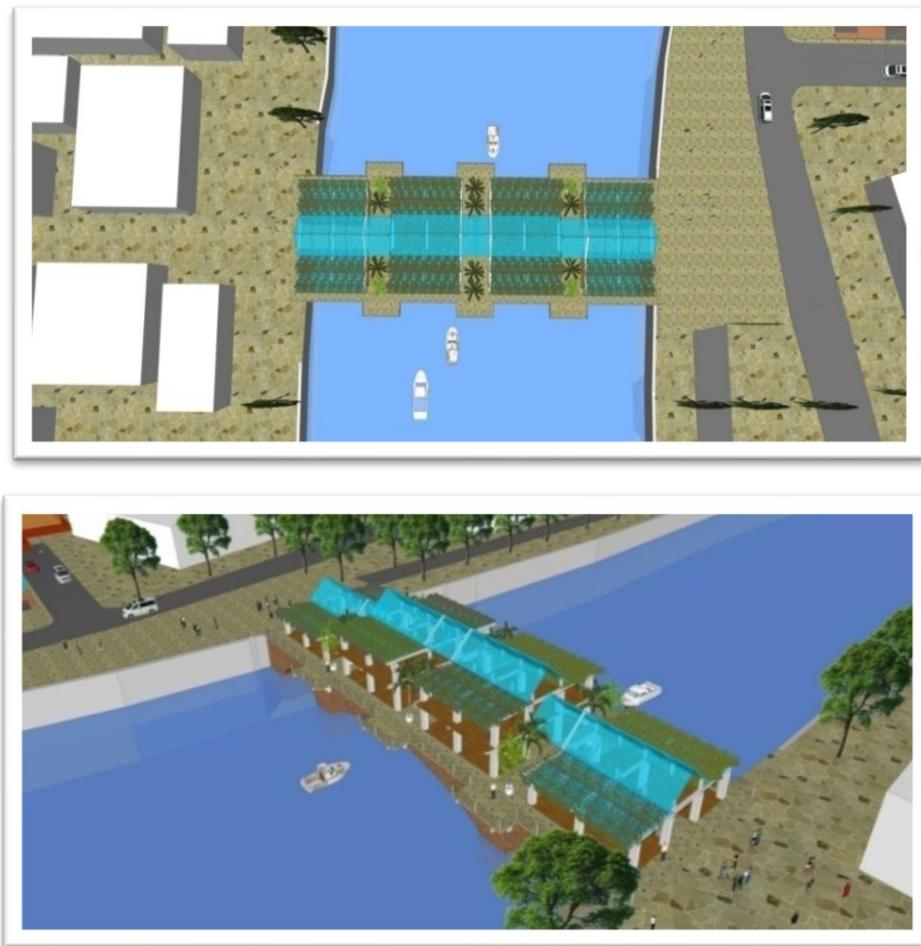
Rencana Pengembangan Kawasan CBD Peunayong terdiri atas dua rencana pengembangan; (1) Pengembangan Kawasan Terminal Keudah, yang terintegrasi dengan zona komersial; dan (2) Pengembangan Jembatan Penyebrangan Pedestrian Keudah-Peunayong. Pengembangan kawasan ini adalah untuk me-revitalisasi kawasan Pusat Kota Lama kawasan Peunayong.

Pengembangan Kawasan Terminal Keudah bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik di Kota Banda Aceh, meningkatkan akses dan kenyamanan publik terhadap transportasi publik. Rencana pengembangan kawasan ini mengadaptasikan konsep *mix-use building*, dimana Kawasan Terminal Keudah akan diarahkan untuk menjadi kawasan *one-stop shopping*, sehingga kawasan ini mampu untuk menjadi titik transit bagi pengguna angkutan umum.



Gambar 1.12 Rencana Pengembangan Central Bussiness District (CBD) Keudah
Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

Jembatan penyebrangan pedestrian Keudah-Peunayong direncanakan selain berfungsi sebagai jembatan penyebrangan pedestrian, juga akan memiliki fungsi sebagai daya tarik antara Peunyong dan Keudah, jembatan ini diarahkan untuk dapat menciptakan ruang publik yang terpadu dengan kawasan perdagangan dan jasa (dengan spesialisasi kuliner; restoran, warung kopi, dan cafe).



Gambar 1.13 Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong
Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

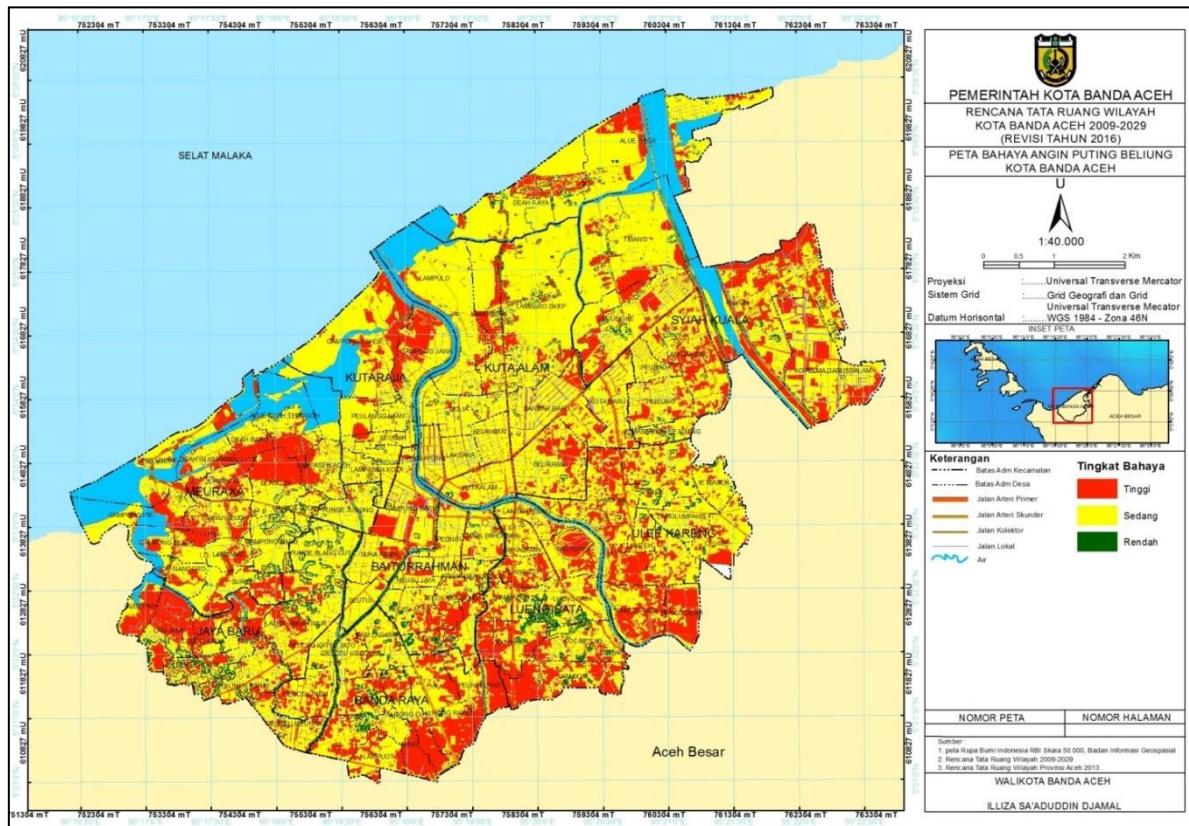
1.1.5 Wilayah Rawan Bencana

Kota Banda Aceh dalam dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki indeks resiko bencana tinggi dengan skor 167, adapun ancaman bencana di Kota Banda Aceh antara lain:

1. Rawan bencana angin puting beliung
2. Rawan bencana banjir
3. Rawan bencana penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
4. Rawan bencana gempa dan
5. Rawan bencana tsunami

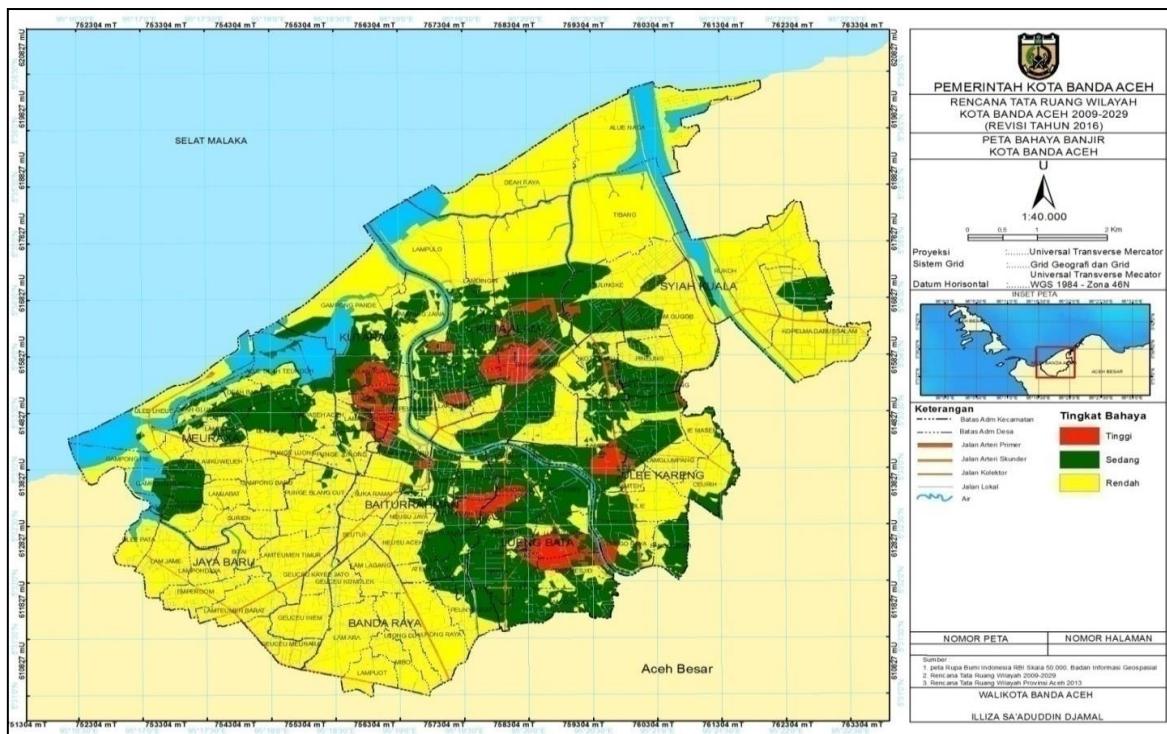
Oleh karena itu, di dalam menentukan arah pembangunan Kota Banda Aceh ke depan baik dari segi penetapan struktur ruang dan pola ruang, maupun dalam menentukan pengaturan bangunan (*building code*) dan manajemen mitigasi bencana telah menetapkan dan mempergunakan kawasan rawan bencana sebagai salah satu pertimbangan yang harus dilaksanakan.

Untuk kawasan rawan bencana Angin putting beliung, banjir, DBD, gempa dan tsunami di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 dan 1.18 secara berurutan seperti berikut ini.

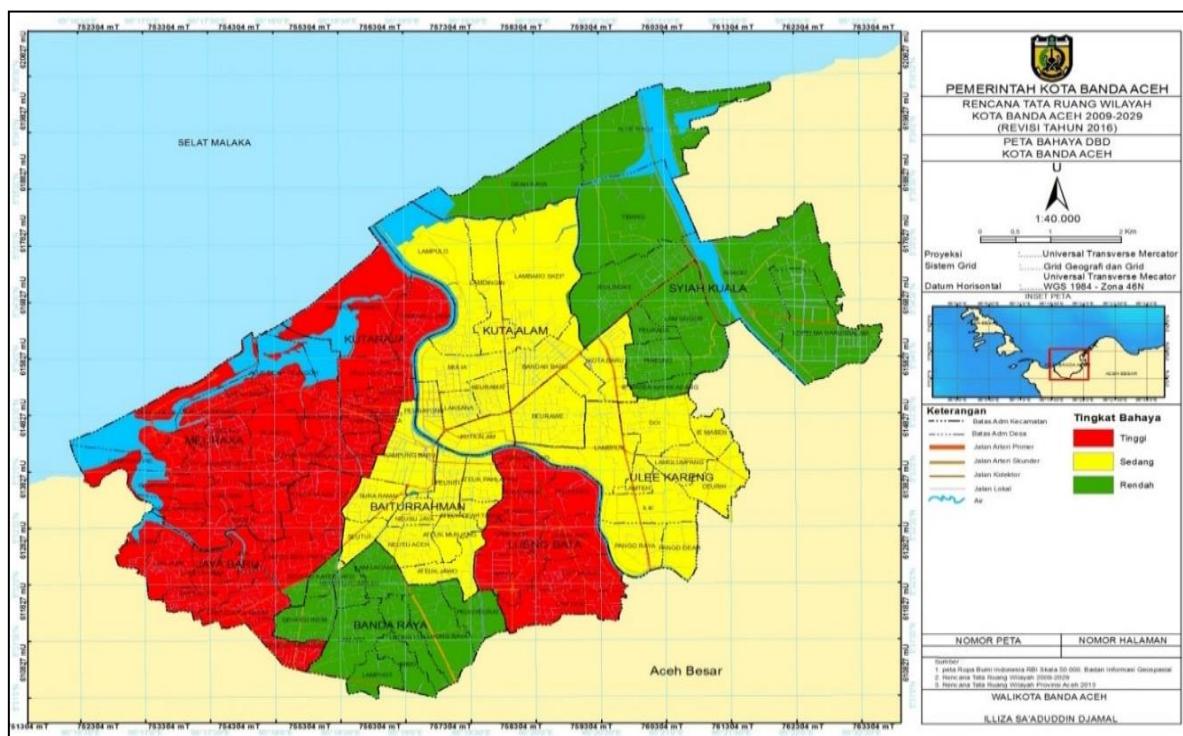


Gambar 1.14 Peta Bahaya Angin Puting Beliung Kota Banda Aceh

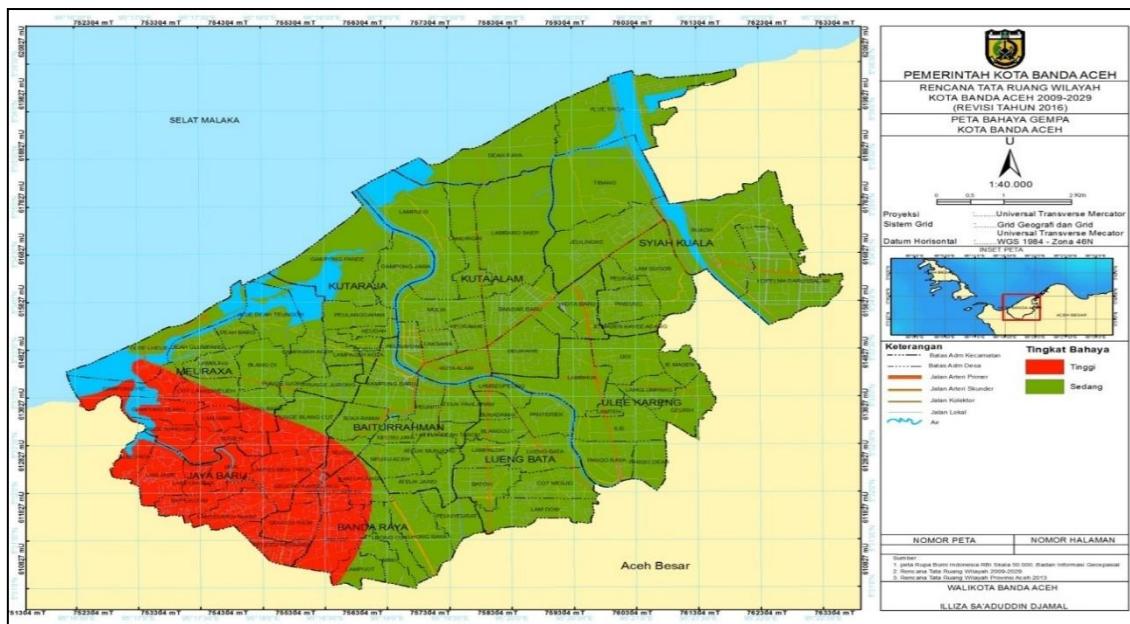
Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)



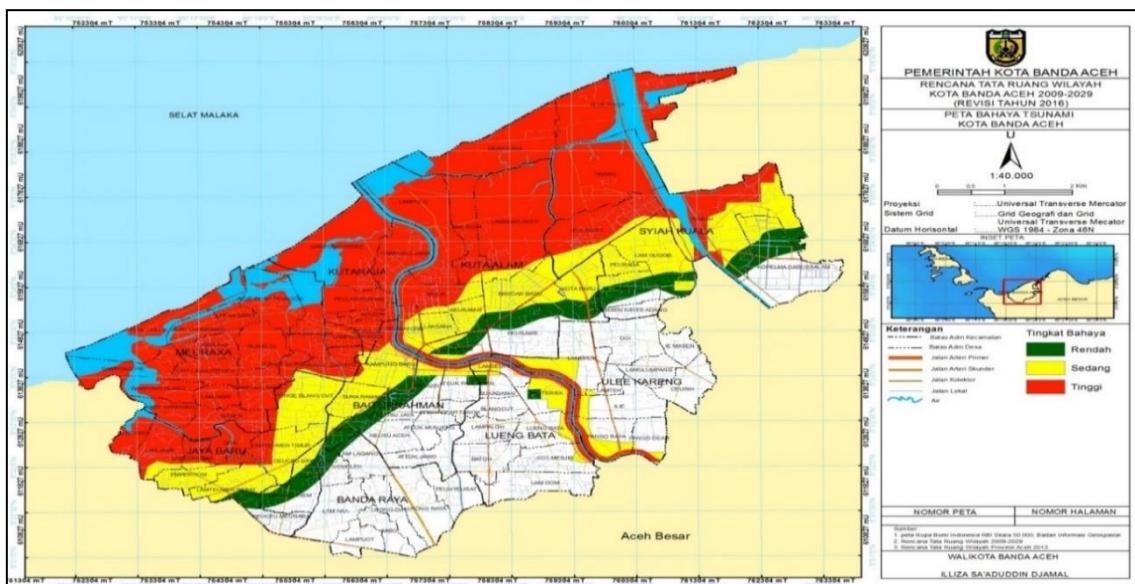
Gambar 1.15 Peta Bahaya Banjir Kota Banda Aceh
Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)



Gambar 1.16 Peta Bahaya DBD Kota Banda Aceh
Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)



Gambar 1.17 Peta Bahaya Gempa Kota Banda Aceh
Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)



Gambar 1.18 Peta Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh
Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2016)

1.2 Isu Strategis

Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, masih ada permasalahan baik eksternal maupun internal yang dihadapi Kota Banda Aceh. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Banda Aceh meliputi infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerja sama regional, dan daya saing ekonomi daerah.

Dimana, didalam dokumen RPJPD Kota Banda Aceh 2007-2027 telah diamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Banda Aceh setiap 5 (lima) tahun selama 4 (empat) priode RPJMD. Dalam dokumen RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Dengan adanya indikator dan target yang ditetapkan tersebut, maka menjadi sangat penting untuk mengetahui kondisi capaian sebagai data dasar bagi perencanaan menengah tahun 2017-2022.

Oleh karena itu, diperlukan isu-isu strategis dalam mendorong pembangunan Kota Banda Aceh. Isu Strategis sendiri adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik: bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik lingkungan, social budaya, ekonomi keuangan dan legal kelembagaan. Adapun isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8 Isu Strategis Kota Banda Aceh

Bidang urusan	Identifikasi masalah	Isu strategis
Syariat islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga keagamaan ini belum memiliki manajemen yang memadai sehingga belum dirasakan kenyamanan dan ketenteraman bagi masyarakat. 2. Sampai saat ini penerapan syariat islam masih menghadapi berbagai permasalahan. Terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan syariat islam menunjukkan belum optimalnya upaya amar ma'ruf nahi munkar. 3. Pembinaan sistem dan kurikulum dayah sebagai basis pendidikan islami belum dibenahi secara optimal 4. Belum adanya standarisasi tentang kebersihan dan kesucian sarana dan prasarana ibadah serta belum maksimalnya manajemen pembinaan lptq secara berjenjang dan berkelanjutan. 5. Dalam aspek ekonomi, banyak praktik rentenir dan riba yang jelas berlawanan dengan prinsip syariah 6. Banyak tanah wakaf yang ada belum dikelola dengan manajemen yang baik dan produktif sehingga tidak dirasakan bernilai guna bagi kemaslahatan umat. 7. Manajemen pengumpulan zakat belum maksimal. Selain daripada itu, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat membayar zakat melalui baitul mal, rendahnya pengawasan dalam penyaluran zakat, dan belum optimalnya sosialisasi terhadap pemanfaatan dana yang terkumpul melalui zakat adalah bagian dari permasalahan yang harus diselesaikan. 8. Munculnya fenomena sosial di antaranya masalah komunitas punk dan lgbt (lesbian, gay, biseks dan transgender) dan wanita tuna susila. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Masih adanya pelanggaran terhadap qanun syariat islam (qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah) b. Belum optimalnya pelaksanaan syiar islam. c. Masih rendahnya variasi kegiatan remaja mesjid dan balai pengajian sehingga akhirnya membuat kevakuman.
Stabilitas ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas sumberdaya manusia yang menjalankan pemerintahan gampong masih relatif rendah dan membutuhkan penguatan, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan gampong. 2. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pendistribusian manfaat pertumbuhan ekonomi yang belum merata. 3. Pembangunan ekonomi yang berlandaskan syariat islam. 4. Penuntasan masalah pembangunan ekonomi, seperti keterbatasan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, kemiskinan, pengangguran, serta ketersediaan lapangan kerja. 5. Rendahnya investasi, tingginya angka pengangguran, pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang masih belum sepenuhnya mengangkat perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah (pad) tidak sebanding dengan potensi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan umkm sebagai ujung tombak pemerataan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja masih rendah 2. Pemberdayaan lembaga keuangan mikro syariah sebagai upaya penegakan ekonomi syariah dan pengurangan praktik riba di kota banda aceh 3. Mendorong tumbuhnya kegiatan produksi produk unggulan disetiap gampong 4. Data potensi dan peluang investasi daerah.

Bidang urusan	Identifikasi masalah	Isu strategis
Sistem transportasi & tik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum seimbangnya panjang jalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, sehingga arus lalu lintas tidak lancar dan menimbulkan kesemrautan dan kemacetan lalu lintas 2. Ketersediaan lahan/kawasan parkir masih sangat terbatas 3. Kuantitas transportasi umum masal yang dimiliki belum mencukupi dan masih ada ruas-ruas jalan yang belum dilalui oleh moda tersebut. 4. Belum tersedianya sarana dan prasarana tik yang terpadu beserta dokumen perencanaan yang representatif sampai dengan saat ini mengakibatkan tersendatnya aplikasi it sebagai penunjang di dalam optmalisasi sistem transportasi, khususnya pada pengumpulan data perencanaan dan pembangunan kota. 5. Interkoneksi data antar skpk, serta instansi pemerintahan terkait juga belum berjalan baik. 6. Ketersediaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi seperti sarana komunikasi untuk penyebar luasan informasi pembangunan kota terutama unit siaran informasi seperti radio dan televisi, baliho pemko, dan surat kabar atau bulletin, sehingga penyampaian informasi tentang kebijakan pemerintah dan pengembangan pembangunan masih sangat terbatas dalam implementasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Kegiatan promosi investasi. 1. Pengembangan sistem transportasi terpadu untuk memperlancar kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa serta peningkatan aksesibilitas bagi manusia ataupun barang dan jasa. 2. Pengembangan sistem transportasi yang mengutamakan pada sistem angkutan umum massal yang bersinergi dengan angkutan darat (penyediaan <i>feeder</i>), penataan manajemen parkir berbasis teknologi informasi 3. Pengintegrasian sistem transportasi antara banda aceh dan kabupaten aceh besar. 4. Pemasangan sistem yang dapat mengontrol dan mengendalikan lalu lintas di persimpangan melalui pengembangan atcs (<i>area traffic control system</i>) yang berfungsi untuk mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi. 5. Penataan kawasan parkir dan inovasi dalam sistem pengelolaan perparkiran agar mampung menampung jumlah kendaraan yang terus meningkat dan memberikan efek pada penerimaan pad. 6. Peningkatan jumlah jaringan intrakoneksi yang komprehensif, pengembangan sdm tik, pemeringkatan e-government, konsistensi open data, guna menunjang kelancaran hubungan antar skpd 7. Penyempurnaan dan peningkatan media penyampaian informasi dan peran

Bidang urusan	Identifikasi masalah	Isu strategis
Linkungan perumahan & permukiman kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran perumahan baru dan renovasi/peningkatan kapasitas rumah belum diimbangi dengan penyediaan pelayanan infrastruktur yang memadai, seperti jalan gampong/ kecamatan dan drainase yang masih belum memenuhi standar pelayanan minimum (sdm). 2. Masih terdapat permukiman kumuh dan rumah tidak layak. 3. Adanya permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 4. Sanitasi yang buruk serta tidak tersedianya instalasi pengolahan air limbah (ipal) komunal di wilayah padat penduduk 5. Infrastruktur permukiman dalam kota banda aceh yang layak dan memadai belum terbangun secara optimal. 6. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota yang disyaratkan paling sedikit 20% dari luas wilayah kota juga belum dapat dipenuhi hingga saat ini 	<p>semua pihak baik skpd maupun gampong untuk penyebarluasan informasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat terutama masyarakat golongan menengah kebawah. 2. Kurangnya pembinaan penyuluhan tentang rumah sehat sehingga masih adanya kawasan-kawasan kumuh. 3. Masih banyak rumah tangga yang menggunakan jenis septictank tidak kedap sehingga merusak air tanah 4. Belum tegasnya sanksi terhadap bangunan tanpa imb, belum semua masyarakat memahami tentang qanun rtrw dan kurangnya ketaatan dalam mengurus imb. 5. Masih belum maksimalnya fungsi saluran karena pengaruh sedimentasi, sampah, dinding saluran yang colaps dan menutup saluran, penyempitan dimensi saluran dan gorong-gorong, hambatan akibat bangunan lain seperti pipa pdam, tiang listrik, tiang telepon, sisa-sisa dan sebagainya 6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.
Pariwisata & budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya peraturan daerah tentang rencana induk pariwisata halal kota banda aceh. 2. Tidak terukur kontribusi pariwisata dalam pad kota banda aceh 3. Kurangnya promosi dan pemasaran kepariwisataan, 4. Tumpang tindih pengelolaan objek wisata, 5. Rendahnya kualitas infrastruktur kepariwisataan, 6. Masih rendahnya koordinasi antar pelaku usaha pariwisata dalam rangka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tertatanya dan terpeliharanya situs cagar budaya dalam wilayah kota banda aceh, 2. Masih rendahnya karakter dan jati diri warga kota banda aceh sebagai warga bangsa yang multikultural 3. Belum optimalnya aspek ekonomi dan

Bidang urusan	Identifikasi masalah	Isu strategis
	<p>mensinerjikan promosi produk dan pelayanan pariwisata,</p> <p>7. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kepariwisataan</p> <p>8. Belum adanya blueprint pariwisata kota banda aceh yang mengakibatkan perencanaan pembangunan di bidang kepariwisataan belum berkembang dengan maksimal</p> <p>9. Belum adanya pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya pariwisata dilaksanakan secara bersama-sama</p> <p>10. Belum optimalnya pelaksanaan wisata halal di kota banda aceh</p> <p>11. Kota banda aceh saat ini juga belum banyak memiliki sarana dan prasarana hiburan perkotaan yang memadai dalam rangka menciptakan suasana yang lebih menggairahkan bagi warga kota untuk menikmati suasana rekreasi di tengah kota sehingga banyak warga kota yang ingin menikmati hiburan dan liburan harus ke luar daerah.</p>	<p>kesejahteraan warga kota banda aceh dalam pengembangan kebudayaan.</p>
Pendidikan	<p>1. Masih lemahnya kompetensi guru, meliputi bidang pedagogik, penguasaan materi, dan penguasaan metodologi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan (paikem)</p> <p>2. Standar nasional pendidikan (snp) yang belum terpenuhi.</p>	<p>1. Peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan (snp)</p> <p>2. Peningkatan kompetensi guru</p> <p>3. Optimalisasi penggunaan K-13 sehingga tercipta sistem pengajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan.</p> <p>4. Meningkatkan Minat dan budaya membaca di kalangan siswa</p>
Kesehatan	<p>1. Manajemen data informasi kesehatan yang akurat, administrasi kesehatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan pembangunan kesehatan, pengembangan dan penyesuaian sumberdaya manusia kesehatan untuk memenuhi kebutuhan serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan yang <i>paper less</i>.</p> <p>2. Belum mencukupinya tenaga dokter spesialis dan perawat di rumah sakit, dan belum memadainya peralatan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dokter spesialis.</p> <p>3. Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular, penyakit <i>local spesifik</i> seperti masih adanya kasus <i>demam berdarah dengue</i> (dbd) dan <i>tuberculosis</i> (tb) di masyarakat.</p> <p>4. Penanganan pada limbah dan sampah keluarga serta industri juga masih sangat</p>	<p>1. Penerapan ISO pada beberapa puskesmas, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi layanan kegawatdaruratan serta peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kesehatan.</p> <p>2. Peningkatan peran serta masyarakat di dalam mendukung program kesehatan.</p> <p>3. Penerapan regulasi kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas dan mencukupi.</p>

Bidang urusan	Identifikasi masalah	Isu strategis
RTH (ruang terbuka hijau) &pencemaran lingkungan	<p>membutuhkan perhatian pemerintah</p> <p>3. Keterbatasan lahan yang dimiliki pemerintah Kota Banda Aceh, serta keterbatasan biaya untuk pembebasan perluasan RTH.</p> <p>4. Peningkatan volume sampah, konsumsi energi dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Laju pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh yang relative tinggi</p>	<p>5. Masih kurangnya ruang terbuka hijau</p> <p>6. Penambahan tempat pembuangan sampah,</p> <p>7. Perlu adanya daur ulang sampah, pemisahan sampah, pengolahan air limbah belum maksimal,</p> <p>8. Masih adanya industri kecil yang membuang limbah ke saluran air dan sungai sehingga perlu penanganan yang lebih spesifik terhadap pengelolaan air limbah baik domestik, pasar dan industri kecil di Kota Banda Aceh.</p>
Air bersih	<p>1. Cakupan pelayanan air minum belum 100 %</p> <p>2. Perlunya sumber air bersih PDAM yang baru</p> <p>3. Belum optimalnya jaringan pelayanan air minum kawasan tertentu.</p> <p>4. Kualitas pelayanan air minum perpipaan masih perlu ditingkatkan</p> <p>5. Masih adanya Kebocoran pada jaringan air minum PDAM.</p>	<p>1. Pengembangan pengelolaan air bersih dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan PDAM serta meningkatkan kualitas jaringan perpipaan dan manajemen pengelolaan serta memperluas cakupan pelayanan PDAM</p>
Energi	<p>1. Pasokan daya listrik untuk Kota Banda Aceh belum mencukupi kebutuhan warganya</p> <p>2. Adanya warga kota yang menggunakan sambungan illegal untuk memasuk kebutuhan daya listrik ke rumah atau tempat usahanya</p>	
Mitigasi bencana	<p>1. Belum adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan bencana, sebagai acuan para pihak dan finalisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).</p>	<p>1. Penguatan lembaga atau intansi bencana yang dapat menjadi Leading Actor lintas sektor dan organisasi</p> <p>2. Peningkatan Manajemen tanggap bencana</p> <p>3. Penginisiasian dan penguatan organisasi atau forum PRB di tingkat Komunitas.</p>
Pembangunan berbasis kependudukan & gender	<p>1. Kota Banda Aceh belum memiliki dokumen Grand Design Kependudukan sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan berbasis kependudukan belum optimal</p> <p>2. masih rendahnya kualitas partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan baik dilegislatif maupun eksekutif</p>	<p>1. Perencanaan pembangunan kependudukan harus diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan</p>

Bidang urusan	Identifikasi masalah	Isu strategis
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Belum optimalnya peran kelembagaan dan penerapan regulasi untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan 4. masih rendahnya penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) yang didukung dengan data terpilah baik ditingkat kota, kecamatan dan gampong. 5. Masih kurangnya instrumen hukum yang melindungi perempuan dan anak 6. Banyak bermunculan berbagai tindakan kekerasan di media online, menyebabkan kerentanan perempuan dan anak mengalami kekerasan, yang biasanya dalam bentuk eksplorasi ekonomi dan eksplorasi seksual serta <i>bullying verbal</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> sektoral 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan melalui penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) 3. peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas dalam rangka tumbuh kembang anak termasuk layanan dasar yang inklusif untuk anak rentan (berkebutuhan khusus) 4. pembinaan dan peningkatan kapasitas untuk menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan bagi kaum perempuan. 5. Peningkatan Indeks pemberdayaan Gender 6. Penguatan peran tokoh agama dalam upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memberikan penekanan posisi agama sebagai cara <i>fixing the problem</i> perlu digalakkan
Reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Kota ramah birokrasi adalah melakukan reformasi di bidang pelayanan publik khususnya etika pelayanan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan e-government dalam optimalisasi pelayanan publik, optimalisasi penegakan peraturan perundang-undangan, peningkatan SDM aparatur yang berintegritas, profesional dan sejahtera serta memiliki budaya melayani.
Kepemudaan & olahraga	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peran pemuda di Kota Banda Aceh dalam proses pembangunan belum terlibat secara maksimal 2. Belum optimalnya program /kegiatan dalam menggali potensi kepemudaan di kota Banda Aceh 3. Dukungan keberlanjutan terhadap organisasi kepemudaan masih rendah serta masih kurangnya program yang mendukung kearah profesionalisasi tenaga kerja muda yang handal. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelibatan peran pemuda di Kota Banda Aceh dalam proses pembangunan. 2. Peningkatan akses masyarakat dalam melakukan aktivitas fisik serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, baik menyangkut fisik,

Bidang urusan	Identifikasi masalah	Isu strategis
	<p>4. Upaya pembentukan manusia yang berkualitas masih belum berjalan optimal</p> <p>5. upaya pemerintah kota dalam mengembangkan potensi olahraga di kota Banda Aceh belum bersinergi dengan baik.</p>	<p>mental spiritual, dan sosial secara menyeluruh.</p> <p>3. Pembangunan sekolah khusus olahraga disertai pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar, regulasi terkait dengan keolahragaan dan kepemudaan</p> <p>4. Peningkatan kemitraan dengan lembaga pendidikan formal dan perusahaan/ CSR (Corporate Social Responsibility) dengan pola kerja sama untuk pengembangan pemuda.</p> <p>5. Pengembangan potensi olahraga di kota Banda Aceh yang bersinergi dengan baik.</p>

Sumber: RPJM D Kota Banda Aceh 2017 - 2022

1.3 Analisis Tren dan Perkembangan Daerah

Banda Aceh merupakan sebuah kota sedang, dengan jumlah penduduk sekitar dua ratus lima puluh ribu penduduk. Kota pintar adalah visi penting dalam era informasi saat ini atau disebut juga era digital, di mana ekonomi, industri, pembangunan, serta pemerintahan sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi. Dimana, pada bagian ini akan ditunjukkan segala upaya, pengalaman, pencapaian dan perencanaan dari Kota Banda Aceh dalam mengembangkan kota pintar dan berkelanjutan.

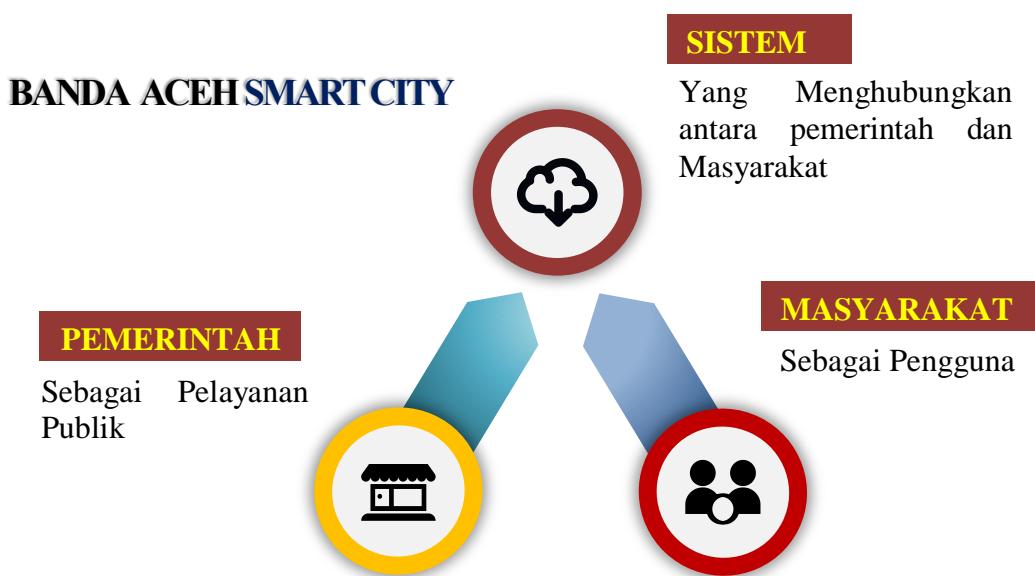
Jika mengutip pernyataan dari UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) “Kota pintar berkelanjutan (*smart-sustainable city*) adalah kota inovatif yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan cara inovatif lain untuk meningkatkan kualitas hidup, operasionalisasi dan pelayanan perkotaan yang efektif, dan meningkatkan kompetensi kota sekaligus memastikan agar dapat kebutuhan masa sekarang dan masa depan dalam aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan.”-

Dimana, konsep kota pintar itu sendiri adalah salah satu topik penting yang diharapkan mampu membantu dalam upaya untuk membangun Kota Banda Aceh di abad ke-21. Pertumbuhan besar dalam teknologi informasi diharapkan mampu menyediakan sejumlah besar alat dan strategi untuk pengembangan Kota Banda Aceh kedepannya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan layanan publik yang berkualitas dengan cara yang jauh lebih efisien. Dengan demikian, Kota Banda Aceh melihat kota pintar sebagai visi mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan masyarakat yang inovatif, kreatif, inklusif dan kompetitif, untuk menggunakan sumber daya secara efisien, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

Menjadi kota yang cerdas dan berkelanjutan juga harus menghormati kearifan lokal yang telah ada. Dimana, Islam telah menjadi identitas orang Aceh selama ratusan tahun. Pada tahun 2018, sebuah visi terkait *Smart City* Kota Banda Aceh sudah pernah dibuat. Visi *Smart City* tersebut adalah dengan cara menggabungkan tujuan *Smart City* dengan kearifan lokal. Visi *Smart City* tersebut adalah:

“Menjadi Kota Pintar Islami yang Inovatif dan Kompetitif ”.

Salah satu isu utama yang dapat mempercepat kemajuan pembangunan adalah hubungan antara pemerintah sebagai pelayan publik dengan rakyat, sebagai sasaran pembangunan. Teknologi informasi dapat menghubungkan pemerintah dan rakyatnya secara lebih efisien. Jika dikaji lebih jauh, TI sendiri dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Jadi keterlibatan mereka dalam pembangunan tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai kontributor. Sehingga, harapan kedepannya adalah TI dapat membantu pemerintah kota Banda Aceh tidak hanya untuk memantau kinerja PNS, melainkan juga memberikan layanan publik yang efisien dan berkualitas kepada masyarakat, memantau pembangunan dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses pembangunan.



Gambar 1.19 Interaksi Antara Pemerintah, Sistem dan Masyarakat Terkait *Smart City*

Konsep pelaksanaan *Smart City* Kota Banda Aceh sudah dimulai sejak tahun 2016, dengan didukung oleh adanya dokumen ITMP (IT *Master Plan*) Kota Banda Aceh 2010 – 2014. Saat ini, Kota Banda Aceh juga sedang melakukan finalisasi dari dokumen ITMP Kota Banda Aceh 2019 – 2023. Konsep *Smart City* Banda Aceh sendiri memiliki Pilar - pilar yang terus berkembang sampai dengan saat ini.

Tabel 1.9 Perkembangan Konsep *Smart City* Banda Aceh dari Tahun ke Tahun

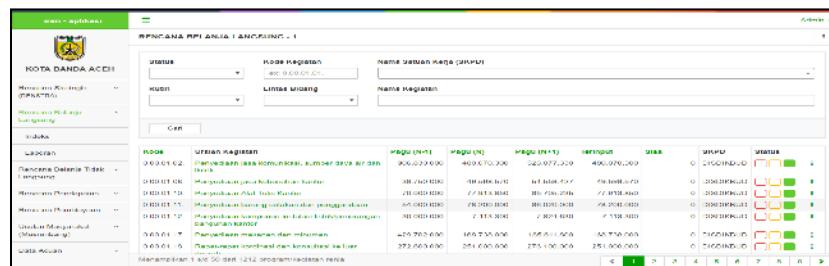
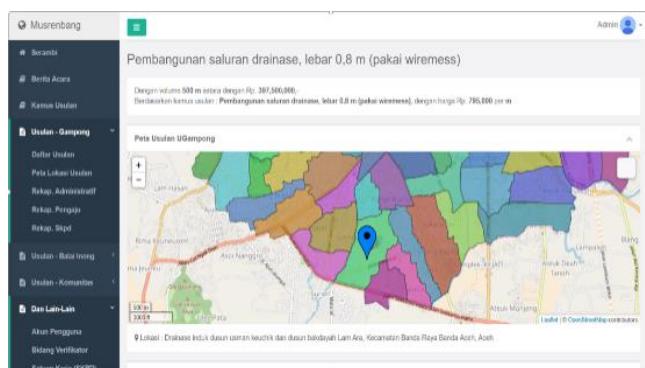
2016	2018	2019
Smart Government	Smart Governance	Smart Governance
Smart Economy	Smart People	Smart Branding
Smart Education	Smart Transportation	Smart Economy
Smart Health	Sustainable Infrastructure	Smart Living
Smart Information	Inclusive Community	Smart Society
	Resilient City	Smart Environment

Jika melihat penerapan-penerapan *Smart City* di tahun-tahun sebelumnya, maka tentunya akan dapat ditarik sebuah garis lurus bahwa penerapan *Smart City* ini terus berlangsung secara berkesinambungan. Sehingga ketika membahas 6 (enam) pilar *Smart City* Kota Banda Aceh 2019 terkait dengan tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharaan lingkungan (*smart environment*) tentu tidak akan lepas dari pada kegiatan-kegiatan dan program yang telah dilakukan sebelumnya.

A. *Smart Governance*

Terkait dengan *Smart Governance*, sejak tahun 2016 Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan penerapan e-kinerja, yang digunakan untuk mengukur kinerja aparatur pemerintahan secara terukur. Selain itu, juga sudah dilakukan penarapan pemakaian aplikasi e-disiplin (www.disiplin.bandaacehkota.go.id) terhadap pegawai aparatur pemerintahan.

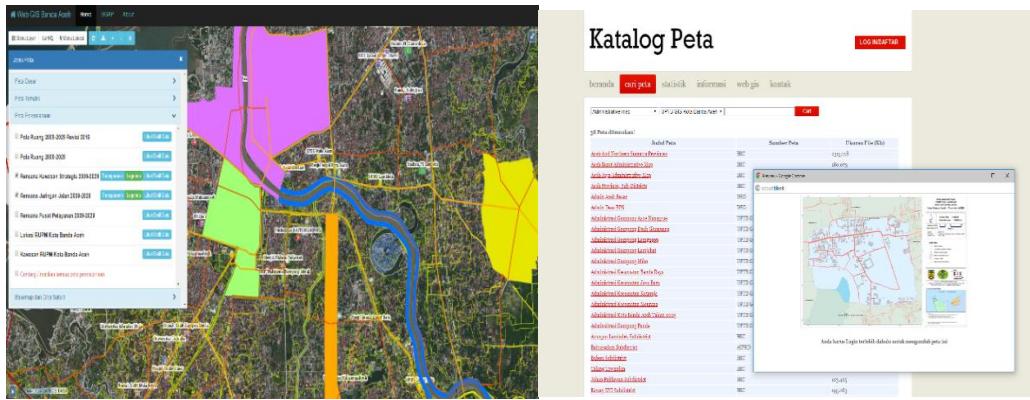
Pemerintah Kota Banda Aceh juga sudah menerapkan sistem perencanaan berbasis elektronik sejak tahun 2017. Dimana dimulai dengan penggunaan aplikasi E-Musrenbang. E-Musrenbang adalah aplikasi untuk memasukkan program yang dihasilkan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang akan dimasukkan ke dalam penganggaran kota. Dilanjutkan dengan Iren yang merupakan aplikasi penganggaran untuk membantu Pemerintah Kota merencanakan anggaran Kota dan mengakomodasi aspirasi dari E-Musrenbang dan E-Pokir.



Gambar 1.20 Tampilan Aplikasi E-Musrenbang dan IREN

Dimana E-Pokir itu sendiri merupakan aplikasi terkait dengan Pokok – Pokok pikiran dewan di legislatif yang diakomodir oleh kegiatan di SKPD. Selain Aplikasi E-Pokir, Para anggota legislatif juga memiliki aplikasi E-Reses yang aplikasi untuk memasukkan permintaan pembangunan dari warga negara ke legislatif melalui forum konsultasi selama periode reses.

Selain daripada aplikasi tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh juga sudah memiliki layanan tambahan lainnya terkait dengan webgis, open data management sistem, layanan pengaduan masyarakat, data penduduk online dan lain- lain.



Gambar 1.21 *User Interface* dari Aplikasi WebGis dan Katalog Peta

UPTD GIS Bappeda Kota Banda Aceh telah mengembangkan Webgis, sebuah Sistem Informasi Geografis berbasis web, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses data spasial dengan mudah secara rinci. Selain Webgis, sebuah katalog peta juga telah dikembangkan yang terdiri dari peta tematik yang dapat diunduh dalam format pdf. Dimana, Unit GIS juga telah membentuk Sistem Pemantauan Program Kesejahteraan Sosial di Banda Aceh, yang mengumpulkan data semua rumah tangga miskin di Banda Aceh, *by name* dan *by address*. Sebagai tambahan, UPTD GIS Bappeda Kota Banda Aceh juga telah mengembangkan aplikasi SIGAP, yang merupakan sebuah aplikasi GIS partisipatif dan adaptif, yang menyediakan layanan koordinasi untuk lembaga-lembaga di Banda Aceh perencanaan pembangunan tata ruang di kota Banda Aceh

Terkait dengan kebijakan Open Data, Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah mengembangkan portal Open Data. Portal Open Data menyediakan data yang dapat diakses oleh warga dengan format data terbuka. Dimana, portal tersebut dapat diakses melalui halaman www.data.bandaacehkota.go.id. Tren daripada langkah penggunaan Open Data Kota Banda Aceh ini dibagi kedalam 3 Tahapan.

1. Open Data Banda Aceh 1.0 (2014 – 2017)

Target yang ingin dicapai pada tahap ini adalah **kuantitas** (keterlibatan) SKPK untuk dapat berpartisipasi dalam program / kegiatan open Data.

2. Open Data Banda Aceh 2.0 (2014 – 2017)

Pada tahap 2.0 diharapkan adanya **kontinyuitas** (keberlanjutan) publikasi data oleh SKPK.

3. Open Data Banda Aceh 3.0 (2014 – 2017)

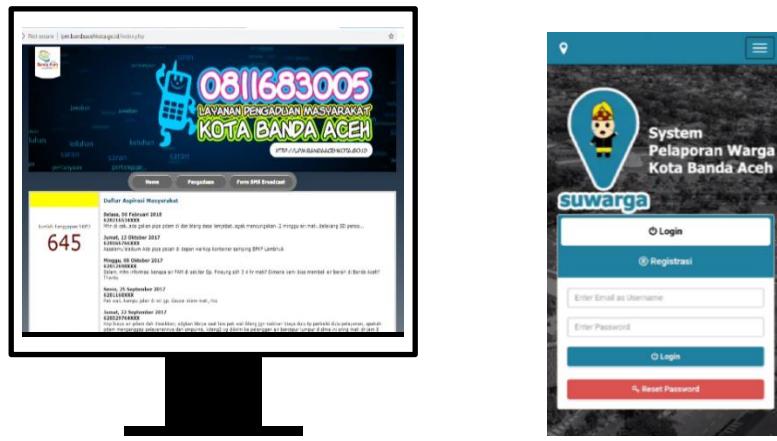
Ditahapan ini diharapkan sudah mencapai pada tahapan **kualitas** (standarisasi) dari semua data yang diberikan oleh SKPK.



Gambar 1.22 Tampilan Portal Open Data

Pemerintah kota juga mendirikan aplikasi SiMPEL. Aplikasi ini adalah merupakan aplikasi pemantauan dan evaluasi yang memantau perkembangan proyek yang terdapat di Kota Banda Aceh dan dapat diakses melalui www.simpel.bandaacehkota.go.id.

Terkait dengan layanan pengaduan masyarakat, Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki media seperti LPM (Layanan Pengaduan Masyarakat), dengan harapan meningkatnya peran partisipasi warga Kota Banda Aceh dalam menyampaikan pengaduan mereka. Ditambah lagi dengan aplikasi suwarga (suara warga), yang merupakan sebuah sistem pengaduan, di mana warga dapat menulis pengaduan mereka bersama dengan lokasi pengaduan.



Gambar 1.23 Media Layanan Pengaduan Masyarakat

Terkait dengan sistem Tata Ruang Kota, Kota Banda Aceh membangun SIMTARU (Sistem Informasi Tata Ruang/Sistem Informasi Spasial). SIMTARU memberikan informasi tentang perencanaan tata ruang di Banda Aceh. Ini termasuk peta dan data spasial serta dokumen

pendukung yang membantu warga dalam mengajukan permohonan izin penggunaan lahan. Sistem ini dapat diakses di simtaru.bandaacehkota.go.id.

Perubahan-perubahan terkait dengan *Smart governance* di tahun-tahun mendatang akan menuju kepada proses integrasi dan interoperabilitas data antar semua SKPK di Kota Banda Aceh. Dengan harapan kedepannya seluruh kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan perencanaan dan perkembangan Kota dapat dilakukan berdasarkan data. Hal ini dikarenakan aplikasi yang digunakan sudah dapat membantu untuk memberikan data yang akurat sehingga dapat mengambil kebijakan dengan akurat.

Dengan tren yang sudah ada saat ini, masyarakat Kota Banda Aceh sudah mulai terlibat dan memiliki andil didalam proses perencanaan dan perkembangn Kota Banda Aceh secara efektif dan efisien. Pemerintah Kota Banda Aceh juga sudah transparan dalam setiap program/kegiatan yang dilakukan.

B. *Smart Branding*

Kota Banda Aceh dikenal dengan kota Serambi Mekkah. Kota Banda Aceh sangat kental dengan nuansa islam dan memiliki sejarah yang panjang tentang masuknya islam pada zaman dahulu. Nuansa islami dan sejarah ini telah menjadi identitas kota Banda Aceh. Di era serba digital ini, tentu kita tidak ingin identitas dan nilai-nilai tersebut hilang dari Kota Banda Aceh. Dengan tren digital seperti saat ini, Kota Banda Aceh diharapkan dapat menjadi kota pariwisata islami yang terintegrasi dengan teknologi yang ada.

Harapannya kedepan adalah Kota Banda Aceh akan menyediakan satu portal untuk mengakses segala informasi tentang kota Banda Aceh, baik berupa informasi wisata islami sampai informasi lengkap tentang sejarah kota yang dapat memudahkan wisatawan luar maupun dalam negeri untuk mengeksplorasi Kota Banda Aceh.

Besar harapan Kota Banda Aceh akan menjadi kota pariwisata islami yang terintergrasi dengan teknologi yang sesuai syari`ah dan mampu mengintegrasikan seluruh tempat wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan tipe pembayaran yang dapat dilakukan secara digital/*cashless*.

C. *Smart Economy*

Smart economy di tahun 2016 telah diterapkan dengan penerapan prinsip ekonomi dengan penerapan perizinan, *database* penduduk miskin dan *database* penerima bantuan. Dimana, dalam perancanaan Kota Banda Aceh elemen pertama dari pembangunan *Smart City* adalah membangun pemerintahan yang cerdas. Salah satu indikator terpenting dalam hal ini adalah menyediakan layanan terpadu satu pintu yang efisien yang dapat mempercepat layanan publik, seperti izin usaha, mal layanan publik yang mengintegrasikan layanan publik dalam satu atap.

Layanan terpadu satu atap menyediakan sistem perizinan online, Gerai Pelayanan Perizinan, mal pelayanan publik yang mengintegrasikan 30 institusi dan 10 ruang layanan serta

sarana dan tracking sistem. Pengembangan sistem *one stop services* dan beberapa layanan yang disediakan seperti terlihat pada gambar.



Gambar 1.24 Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selain itu, Badan pelayanan satu atap juga merilis peta geospasial rencana umum pemananaman modal yang dapat membantu investor mengidentifikasi area rencana investasi attractive di Kota Banda Aceh.

Selain daripada itu, Dinas Pengelolaan Aset dan keuangan daerah juga telah mengembangkan beberapa aplikasi yang mengintegrasikan manajemen keuangan dan aset, untuk membantu membangun manajemen keuangan dan aset yang transparan dan efisien, seperti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Mi Abang (Informasi anggaran berbasis mobile), SIPD (aplikasi manajemen PAD) dll.



Gambar 1.25 Aplikasi Terkait dengan Perencanaan Keuangan Daerah

Untuk pasar, saat ini sedang dikembangkan aplikasi e-pasar. Aplikasi ini dapat menampilkan informasi yang terkait dengan pasar seperti:

- Manajemen retribusi pasar
- Harga komoditas, dan
- Kartu identitas penjual

Aplikasi ini dikembangkan dan dimanfaatkan oleh dinas koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan Pemerintah Kota Banda Aceh dan dapat diakses di pasar.bandaacehkota.go.id.



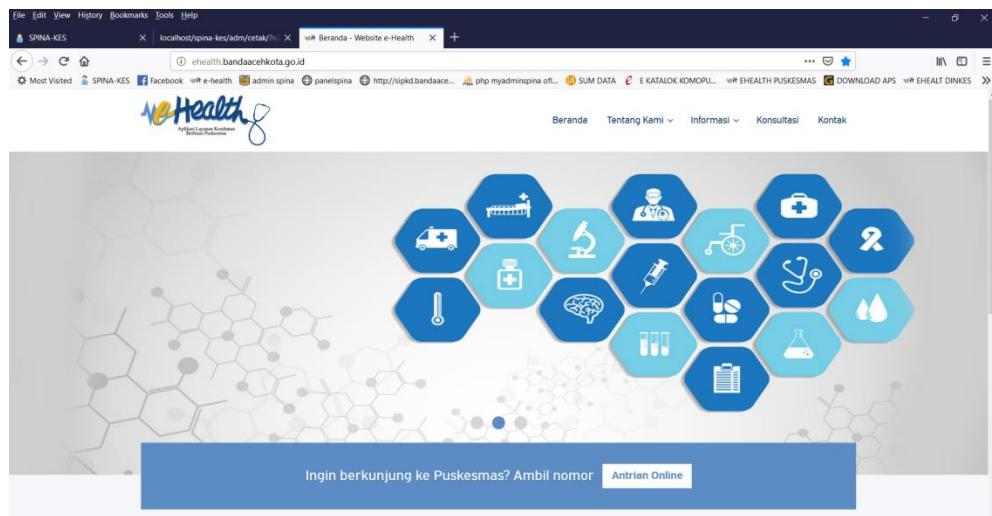
Gambar 1.26 Tampilan website pasar.bandaacehkota.go.id

D. *Smart Living*

Terkait dengan *Smart living* ini merupakan pengembangan dari *Smart health* yang telah dijalankan di Kota Banda Aceh, dengan penerapan, e-health (aplikasi integrasi kebijakan kesehatan), E-BOK, SPINAKES, Sistem pencatatan kelahiran dan kematian secara online dan lain- lain.

Terkait aplikasi E-Health, E-Health merupakan aplikasi layanan kesehatan berbasis puskesmas. Layanan-layanan aplikasi ini merupakan aplikasi publik yang dapat diakses melalui ehealth.bandaacehkota.go.id. Pengguna aplikasi ini adalah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 11 Puskesmas Kota Banda Aceh dan Masyarakat Umum. Dimana didalam aplikasi E-Health tersebut tersedia fitur sebagai berikut:

1. Informasi puskesmas (informasi masing-masing puskesmas untuk 11 puskesmas)
2. Pendaftaran pasien secara online
3. Konsultasi dengan dokter secara online
4. Terintegrasi dengan aplikasi p-care BPJS kesehatan
5. *Include* di mesin antrian di puskesmas
6. Semua rekapan laporan pelayanan di puskesmas



Gambar 1.27 Tampilan Aplikasi E-Health

Aplikasi terkait dengan *Smart living* lainnya adalah E-BOK yang merupakan aplikasi untuk Biaya Operasional Kesehatan. E-BOK membantu puskesmas untuk membuat perencanaan yang efisien, Anggaran Puskesmas, dan keseimbangan budget.

Untuk membangun sistem *Smart living*, Kota Banda Aceh juga telah menggunakan SPINAKES *online*, yang digunakan untuk sistem administrasi tenaga kesehatan. Sistem ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan surat izin praktek dokter. SPINAKES juga memungkinkan warga untuk mendapatkan informasi tentang tenaga kesehatan. Aplikasi ini dapat diakses melalui spinakes.bandaacehkota.go.id



Gambar 1.28 Konten yang terdapat di dalam aplikasi SPINAKES

Selain dari pada itu, untuk meningkatkan efisiensi pencatatan sipil, pemerintah Kota Banda Aceh juga telah membuat beberapa aplikasi, seperti akta kelahiran online, akta kematian online, dan antrian online untuk membantu warga agar cukup menunggu dalam waktu yang lebih singkat dalam proses kepengurusan.

Gambar 1.29 *Interface Aplikasi Antrian Online Dinas Pencatatan Sipil*

Gambar 1.30 *Interface Aplikasi Akta Kelahiran Online Dinas Pencatatan Sipil*



Gambar 1.31 *Interface* Aplikasi Akta Kematian Online Dinas Pencatatan Sipil

Sebagai tambahan, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh baru saja meluncurkan program inovasi “CLBK (Curhat Langsung Bersama Kesehatan)” tepat pada hari anak nasional 28 juli 2019. CLBK merupakan bentuk layanan konseling yang di tujuhan kepada masyarakat yang ingin melakukan konsultasi secara langsung. Diharapkan dengan adanya CLBK ini dapat membantu masyarakat mengatasi masalah-masalah kesehatan yang sedang dihadapinya. Konseling ini juga ditujukan untuk remaja dan anak sekolah untuk mengatasi permasalahan kenakalan di tingkat remaja, sehingga mereka tidak salah dalam mengambil keputusan dan bisa menyebabkan mereka terjerumus terhadap hal – hal yang negatif.

E. Smart Society

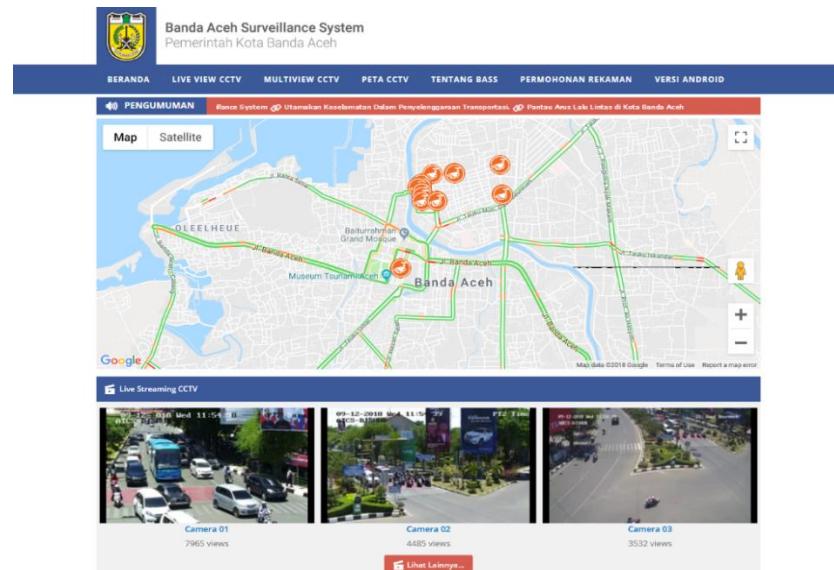
Konsep masyarakat cerdas (*Smart society*) difokuskan pada pendidikan dengan tujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dan. Sistem pendidikan Kota Banda Aceh telah memanfaatkan teknologi informasi secara signifikan. Para Guru diberikan pengetahuan teknologi informasi untuk mendukung sistem pendidikan berbasis IT dan siswa mulai menggunakan ujian berbasis komputer. Selain itu, penerapan TIK di sistem pendidikan sudah memanfaatkan sistem penerimaan peserta didik (PPDB) baru berbasis online.

Sebagai tambahan Kota Banda Aceh juga telah juga memperkenalkan aplikasi Sistem Informasi Sekolah, yaitu aplikasi layanan sekolah yang menjembatani guru dengan orang tua siswa atau wali murid. Informasi tentang siswa ditampilkan dalam aplikasi ini termasuk kehadirannya, guru, kurikulum, nilai, jadwal dll. Dimana, salah satu fiturnya adalah absen tanpa kertas. Dengan menggunakan fitur ini, guru dapat melaporkan ketidakhadiran siswa dan informasi tersebut akan langsung dikirim ke orangtua siswa. sehingga orang tua akan langsung tahu jika anak mereka tidak hadir di sekolah.



Gambar 1.32 Aplikasi Sinan Sikula

Terkait dengan *Smart society*, selain di bidang pendidikan, Kota Banda Aceh juga memanfaatkan sistem BASS (Banda Aceh Surveillance Sistem) terkait dengan sistem pengawasan Kota Banda Aceh. Sistem pengawasan ini mengawasi pusat kegiatan dan tempat-tempat penting di Banda Aceh.



Gambar 1.33 Tampilan Beranda daripada BASS

Sistem ini saat ini terdiri dari 47 CCTV, sebagian besar terletak di pusat kota. Dimana, diharapkan lebih banyak pemasangan CCTV yang akan dilakukan pada masa mendatang. Selain itu, beberapa komunitas juga memasang CCTV mereka sendiri, seperti di masjid, gerai perbelanjaan, dll.

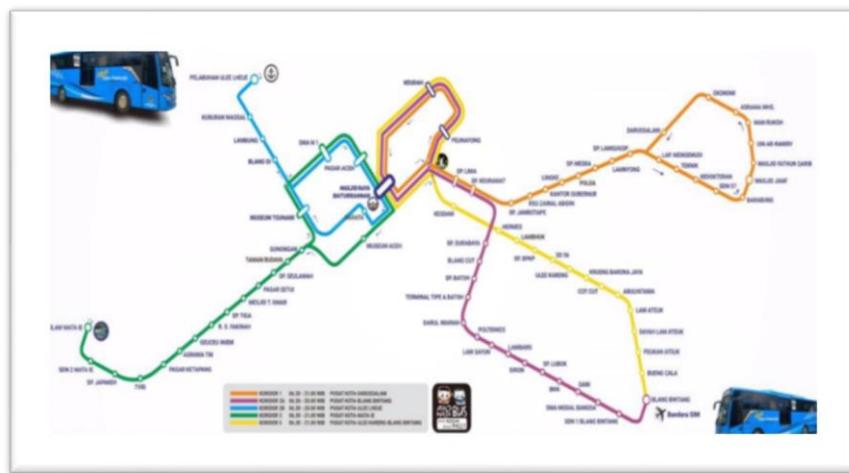
Kota Banda Aceh juga telah memiliki uji coba E-Parking pada ruas Jalan T Nyak Makam. Pemberlakuan E-Parking ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan yang

diakibatkan oleh adanya kendaraan yang diparkirkan sembarangan. Tren kedepan, akan dibangun beberapa kawasan E-Parking lainnya di Kota Banda Aceh.

Sebagai tambahan, sektor transportasi adalah penyumbang utama emisi gas rumah kaca di Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan oleh kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi dimana 4 dari 5 penduduk memiliki kendaraan pribadi, menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat untuk transportasi tidak bermotor.

Kota Banda Aceh pernah memiliki moda transportasi umum tradisional yang dikenal sebagai labi-labi. Namun, jumlahnya menurun secara signifikan dalam dekade terakhir karena tidak dapat bersaing dengan kendaraan pribadi dalam hal kenyamanan, kecepatan, kehandalan dan keamanan.

Untuk meningkatkan kualitas angkutan umum, Pemerintah Aceh mengoperasikan sistem bus rapid transit (BRT) bernama Trans koetaradja di Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Saat ini, bus tersebut sudah beroperasi di empat koridor dan diharapkan beroperasi pada total rencana enam koridor yang diharapkan dapat segera terlaksana dalam beberapa tahun mendatang.



Gambar 1.34 Rute Trans Koeta Radja

Pengembangan Transportasi Umum BRT yang terkoneksi dengan simpul-simpul transportasi di Bandar Udara SIM, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Pusat Bisnis Pasar Aceh dan Peunayong serta pusat aktivitas pendidikan di darussalam sangat membantu Masyarakat dalam berpindah tempat dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum sehingga dapat mencegah kemacetan dan polusi udara. Penggunaan BRT Transkutaraja telah menunjukkan pengaruh yang baik pada transportasi umum karena telah banyak masyarakat yang menggunakannya sebagai mode alternatif, meskipun masih harus ditingkatkan okupansi/ jumlah penumpangnya.

Untuk meningkatkan jaringan jalan kami, Pemerintah Kota Banda Aceh berencana untuk mengembangkan Jalan Lingkar Luar Banda Aceh/ Banda Aceh Outer Ring Road (BORR) untuk mengubah pola jalan dari pola radial menjadi pola lingkaran-cincin, sehingga dapat membantu mengurangi lalu lintas di pusat kota. BORR memiliki panjang 48,8 km, meliputi wilayah Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.



Gambar 1.35 Rencana Banda Aceh Outer Ring Road (BORR)

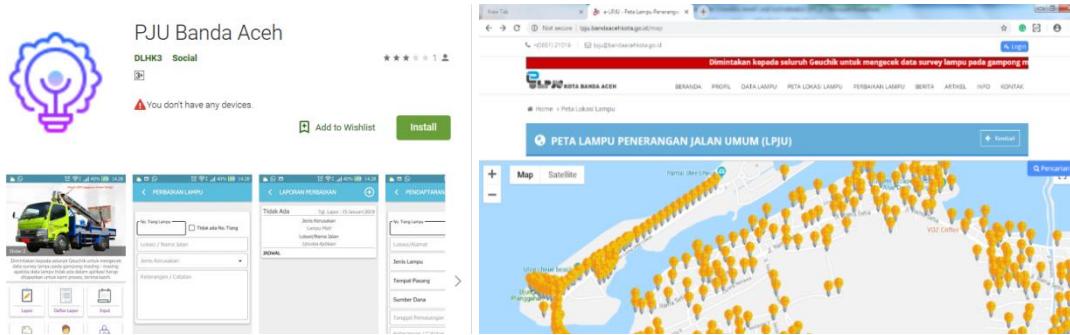
Unsur terakhir dari *Smart society* Kota Banda Aceh adalah terkait dengan Kota tangguh. Banda Aceh adalah kota yang rawan bencana. Rawan tsunami, gempa bumi, banjir, cuaca ekstrim, dan kebakaran. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh juga didasarkan pada mitigasi bencana. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan infrastruktur, Kota Banda Aceh mengembangkan infrastruktur yang mendukung mitigasi bencana seperti *escape building*, jalan evakuasi, pembangunan gedung logistik, dan memanfaatkan sistem peringatan dini tsunami.

Sementara untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang tangguh, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan beberapa program seperti mengintegrasikan mitigasi bencana sebagai kurikulum sekolah dari tingkat dasar hingga sekolah menengah, latihan tsunami di sekolah dan kerja sama dengan universitas lokal.

F. Smart Environment

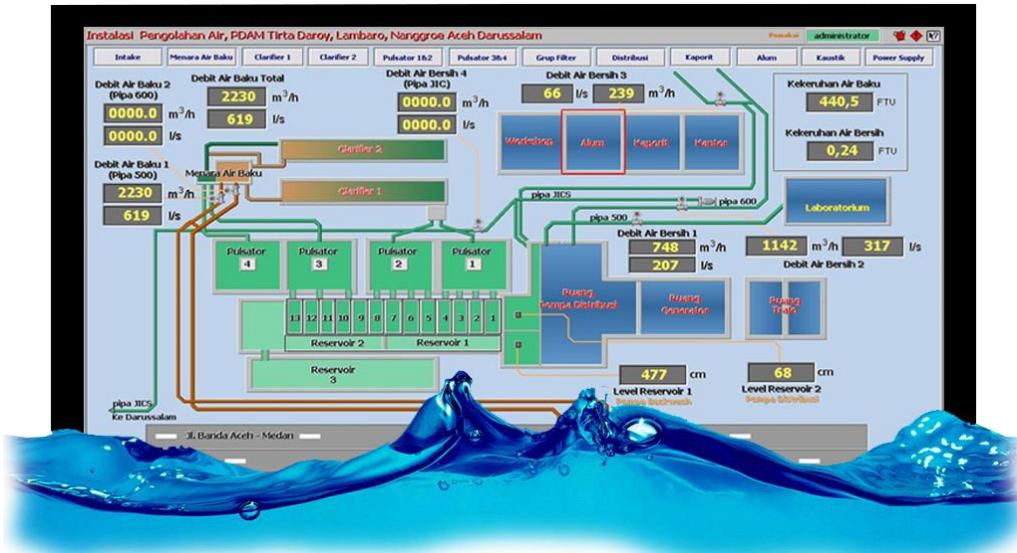
Terkait dengan *Smart environment*, yang artinya *Smart City* juga harus menjadi kota yang hemat energi. Untuk mendukung efisiensi energi, Kota Banda Aceh memasang banyak lampu LED untuk mengganti lampu merkuri. Saat ini terdapat lampu penerangan jalan sebanyak 10.935 lampu, terdiri dari 88% lampu merkuri, 10% LED, dan 2% lampu panel surya. Dimana jumlah ini selalu diusahakan untuk meningkatkan jumlah lampu LED dan lampu tenaga surya setiap tahun agar menjadi lebih ramah lingkungan. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan

kerusakan Lampu Gampong Anda Kepada Team LPJU agar dapat diperbaiki. Layanan ini dapat diakses melalui aplikasi berbasis android maupun melalui website lpju.bandaacehkota.go.id.



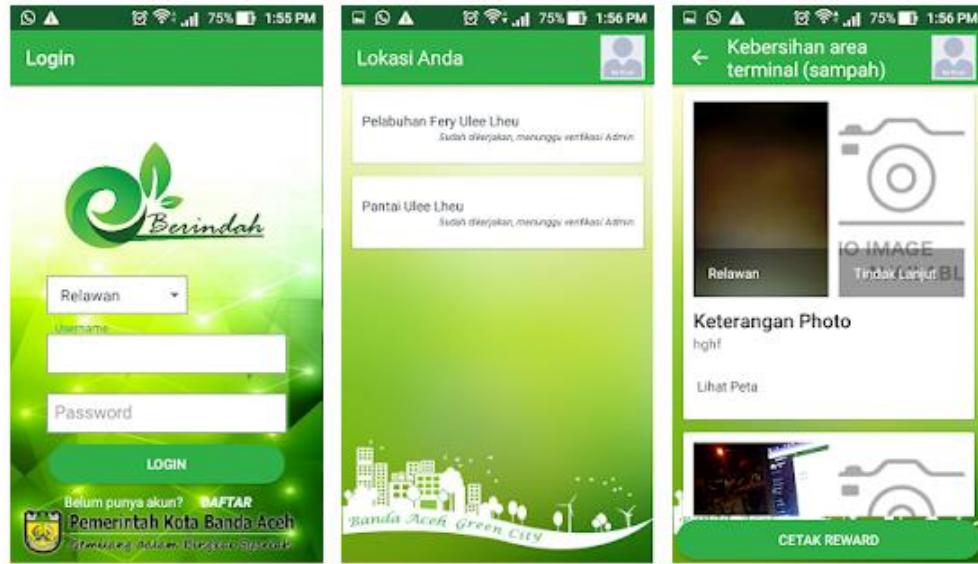
Gambar 1.36 Aplikasi Android dan Website Ipju Banda Aceh

Terkait dengan pengelolaan air bersih, aplikasi SCADA (*Supervisory control and data acquisition*) atau sistem pengawasan dan akuisisi data. SCADA dapat membantu mengontrol sistem air bersih dengan cara mengontrol atau menonaktifkan perangkat, menampilkan data operasional *real time*, menyediakan sistem pemantauan dalam skala peralatan dan skala sistem, memperoleh data trend, dan alarm.



Gambar 1.37 Tampilan Aplikasi SCADA

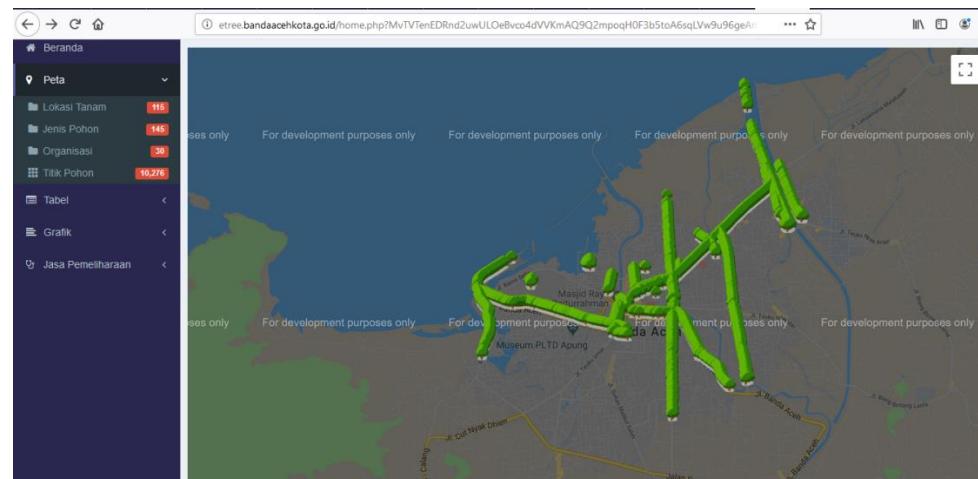
Terkait dengan kebersihan dan keindahan kota, Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah menyediakan sebuah aplikasi e-Berindah yang merupakan sebuah aplikasi untuk sistem pengawasan kualitas kebersihan dan keindahan. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, masyarakat atau relawan dapat langsung melakukan monitoring kebersihan dan keindahan sejumlah fasilitas atau ruang publik seperti jalan, halte, drainase, sungai, taman, dan TPS. Aplikasi tersebut telah tersedia dan dapat diunduh di Google Playstore.



Gambar 1.38 Tampilan Aplikasi E-Berindah

Laporan dari masyarakat lengkap dengan foto kemudian dianalisis untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas DLHK3.

Kota Banda Aceh berkomitmen untuk membuka 20% ruang terbuka hijau publik. Saat ini, Banda Aceh sudah memiliki dua hutan kota: Hutan Kota Tibang dan Hutan Kota Peulanggahan. Untuk melestarikan kota, pemerintah kota mengembangkan *database* pohon Banda Aceh yang disebut e-tree. E-tree menampilkan informasi tentang pohon seperti jenis pohon, usia, donatur, dan titik koordinat. Aplikasi E-Tree dapat diakses melalui etree.bandaacehkota.go.id.



Gambar 1.39 Tampilan Aplikasi E-Tree

Sebagai tambahan, berdasarkan data terakhir, Kota Banda Aceh menghasilkan 220 ton sampah per hari atau 0,8 kg sampah / kapita / hari. Kondisi saat ini, 88% limbah dibuang ke TPA

gampong jawa. Sementara, persentase sampah yang didaur ulang hanya 11%. Daur ulang sampah menghasilkan kantong plastik daur ulang dan aksesoris lampu. Cakupan pengumpulan sampah adalah 88%. Cakupan sampah dilayani dengan berbagai kendaraan pengumpulan sampah, seperti *dump truck* yang melayani jalan lebar. Sedangkan gang dengan jalan sempit dilayani oleh motor gerobak sampah. Proses pengomposan hanya dilakukan untuk 2% sampah. Kompos diproduksi oleh rumah kompos. Sementara ini, 3% sampah tidak terkumpul karena masih ada warga yang membakar sampahnya.

Saat ini, Kota Banda Aceh telah memulai program WCP (*Waste Collecting Point*/titik pengumpulan sampah). WCP adalah sistem pengumpulan sampah berdasarkan partisipasi masyarakat. Saat ini untuk pilot project baru dilaksanakan di 3 desa dengan 15 WCP secara total melayani 173 rumah tangga.



Gambar 1.40 Aktivitas di Titik Pengumpulan sampah (WCP)

Selain itu, Kota Banda Aceh memiliki TPA *sanitary landfill* Gampong Jawa yang berteknologi untuk menghasilkan gas metana. Metana dikumpulkan melalui 20 pipa vertikal dan digunakan menjadi sumber energi terbarukan. Gas metana ini kemudian didistribusikan ke rumah tangga di sekitarnya sebagai kompensasi.



Gambar 1.41 Proses Penghasilan Gas Metan dan Distribusi kepada Warga Sekitar

Untuk proses pengolahan Limbah tinja dilakukan dan diolah di Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Gampong Jawa, yang terletak di dekat dengan TPA. Kota Banda Aceh juga telah memiliki Instalasi pengolahan air hitam menggunakan dua jenis teknologi yaitu kolam oksidasi dan DEWATS (Sistem Pengolahan Air Limbah Terdesentralisasi). Kolam oksidasi

memiliki kapasitas 50 m³ & kapasitas idle 50 m³ dan sistem DEWATS memiliki kapasitas 85 m³ yang menggunakan teknologi aerobik dan anaerobik.



Gambar 1.42 Fasilitas Kolam Oksidasi dan DEWATS

Terkait dengan *Renewable energy*, Pemerintah Kota Banda Aceh berencana untuk melakukan investasi terkait dengan pemasangan solar panel per tahunnya. Saat ini, baru instansi Bappeda Kota Banda Aceh yang telah mulai memanfaatkan sistem energi terbarukan dengan menggunakan solar panel. Sistem yang sudah terpasang di Bappeda Kota Banda Aceh adalah sebesar 1.6 kWh dengan kapasitas penyimpanan energi sebesar 12 kWh.



Gambar 1.43 Fasilitas Solar Panel di gedung Bappeda Kota Banda Aceh.

1.4 Analisis Daya Saing Daerah

Banda Aceh memiliki visi pemerintahan “**Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah**”. Pemahaman **Gemilang** memiliki 3 pilar utama (1) Agama, (2) Ekonomi dan (3) Pendidikan dengan tujuan untuk mencapai Kota Banda Aceh menjadi kota yang menerapkan prinsip Syariah sehingga berhasil menjadi pionir serta contoh kemandirian dan keberhasilan di daerah Provinsi Aceh dalam lingkup khusus dan NKRI dalam lingkup yang lebih luas. Pemahaman **Bingkai Syariah** memiliki 3 pilar utama yaitu (1) Pemerintahan, (2) Pembangunan dan (3) Sosial Kemasyarakatan dengan arah kebijakan sesuai Syariat Islam.

A. Gemilang dalam Pilar Agama

Masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas adalah pemeluk Agama Islam, namun juga memiliki masyarakat yang memeluk Kristen, Hindu, Budha dan beberapa umat agama lain. Dengan masing-masing pengikut agama memiliki tempat ibadah dan kegiatan agama masing-masing yang ditransformasikan menjadi wajah toleransi antar umat beragama, kemajemukan masyarakat, keamanan serta kenyamanan umat beragama di Kota Banda Aceh. Fasilitas ibadah yang terdapat di Kota Banda Aceh.

- Masjid : 104 Unit
- Meunasah : 91 Unit
- Mushalla : 90 Unit
- Gereja : 4 Unit
- Kuil : 1 Unit
- Klenteng : 1 Unit

Selain itu pemerintah Kota Banda Aceh juga memberikan ruang kegiatan keagamaan, antara lain perayaan Thaipusam di Kuil Hindu Palani Andawer, adanya kegiatan ini di inisiasi oleh warga Tionghoa di Banda Aceh.

B. Gemilang dalam Pilar Ekonomi

Banda Aceh adalah Kota Administrasi yang terdiri dari 17 kemukiman dan 90 gampong, dengan catatan penerimaan PAD Kota Banda Aceh (terhitung pada tahun 2017, red) yang mencapai 96,19% dari target 100% pendapatan PAD ditahun 2017. Diambil dari sumber informasi di Publikasi Kota Banda Aceh 2018.

Banda Aceh juga menerapkan zakat sebagai salah satu sumber PAD dan memiliki kaitan dengan pajak daerah, dasar hukum yang digunakan adalah pasal 4 UU No.17 tahun 2000, pasal 191 UU No.11 tahun 2006 dan pasal 22 UU No.23 tahun 2011 (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Zakat Penghasilan Pegawai. Jurnal Vol.2, ISSN 2580-9059 / 2549-

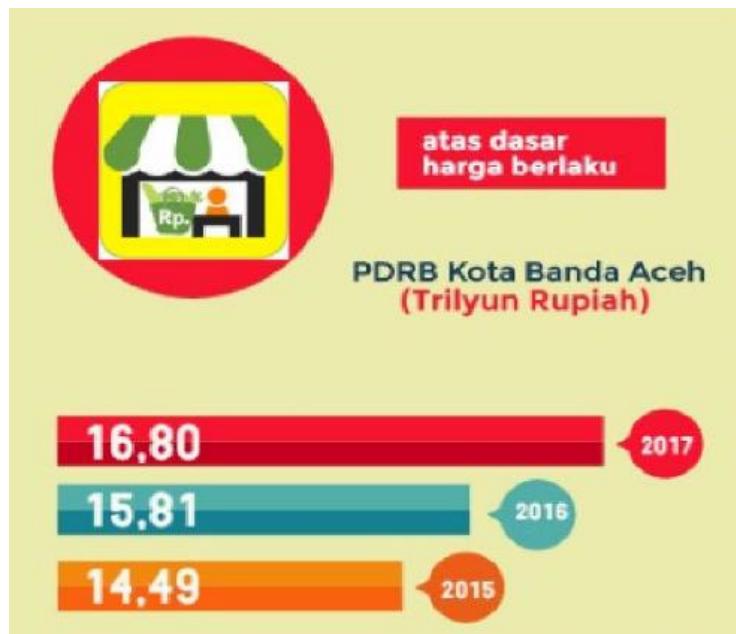
1741, red). Tahun 2017 jumlah pendapatan zakat, infaq dan shadaqah sejumlah Rp.14.639.943.516,- dengan penyaluran Rp.19.563.132.341,- dengan 11.531 penerima.

Pilar Ekonomi Kota Banda Aceh juga bersumber dari ketersediaan tenaga produktif kota, Banda Aceh berdasarkan dari data kependudukan dan ketenagakerjaan terhitung dari 2010 antara lain adalah 24,29% berada diumur 0-14 tahun, 73,15% berada diumur 15-64 tahun, 2,56% berada diumur 65 tahun. Dari serapan data yang tersedia maka dari 2020 sampai dengan 2030, Kota Banda Aceh memiliki potensi jumlah ledakan penduduk dalam lingkup usia produktif mencapai kurang lebih dari 70% dari total populasi penduduk Kota Banda Aceh.

Dengan jumlah ledakan populasi di usia produktif maka diperlukan serapan lembaga pendidikan yang efektif dalam menyiapkan tenaga kerja, antara lain adalah terdapat 7 lembaga pendidikan setingkat Menengah Atas (SMK, red), 40 Kampus vokasi dan Non-vokasi yang terdapat di kota Banda Aceh dengan jumlah serapan pelajar setiap tahun mencapai -/+ 150 ribu peserta ajar setingkat mahasiswa (yang terlapor dan serapan data dari keseluruhan jumlah Prov.Aceh, red). Lembaga pendidikan non-gelar seperti BLK di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 menampung -/+ 1.546 peserta ajar.

Maka berdasarkan dari jumlah penduduk produktif yang kurang lebih dari 70% penduduk Kota Banda Aceh (jumlah penduduk kota Banda Aceh berdasarkan sensus 2010 adalah 259.913 jiwa, red) dan dengan laju pertumbuhan penduduk adalah 1,96%. Jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah tempat belajar tenaga kerja maka jumlah lembaga pencetak tenaga kerja profesional perlu ditambah, baik dari pengembangan sumber daya manusia, sertifikasi dan dikembangkan dengan proyeksi mempersiapkan tenaga yang siap kerja.

Jika dilihat secara faktor ekonomi, ekonomi Kota Banda Aceh terus berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan pendapatan warga. Pendapatan asli daerah juga terus meningkat dan belanja daerah terus bertambah setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi berkembang pesat.



Sumber: Banda Aceh dalam angka 2018

Gambar 1.44 PDRB Kota Banda Aceh dari tahun 2015 -2017

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kota Banda Aceh (Juta Rupiah) di tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,03%. Tahun 2017 PDRB atas dasar harga konstan Kota Banda Aceh (juta rupiah) sebesar 13.940.316,5. Sektor perdagangan dan administrasi pemerintahan masih memegang peranan penting dalam PDRB di Kota Banda Aceh.

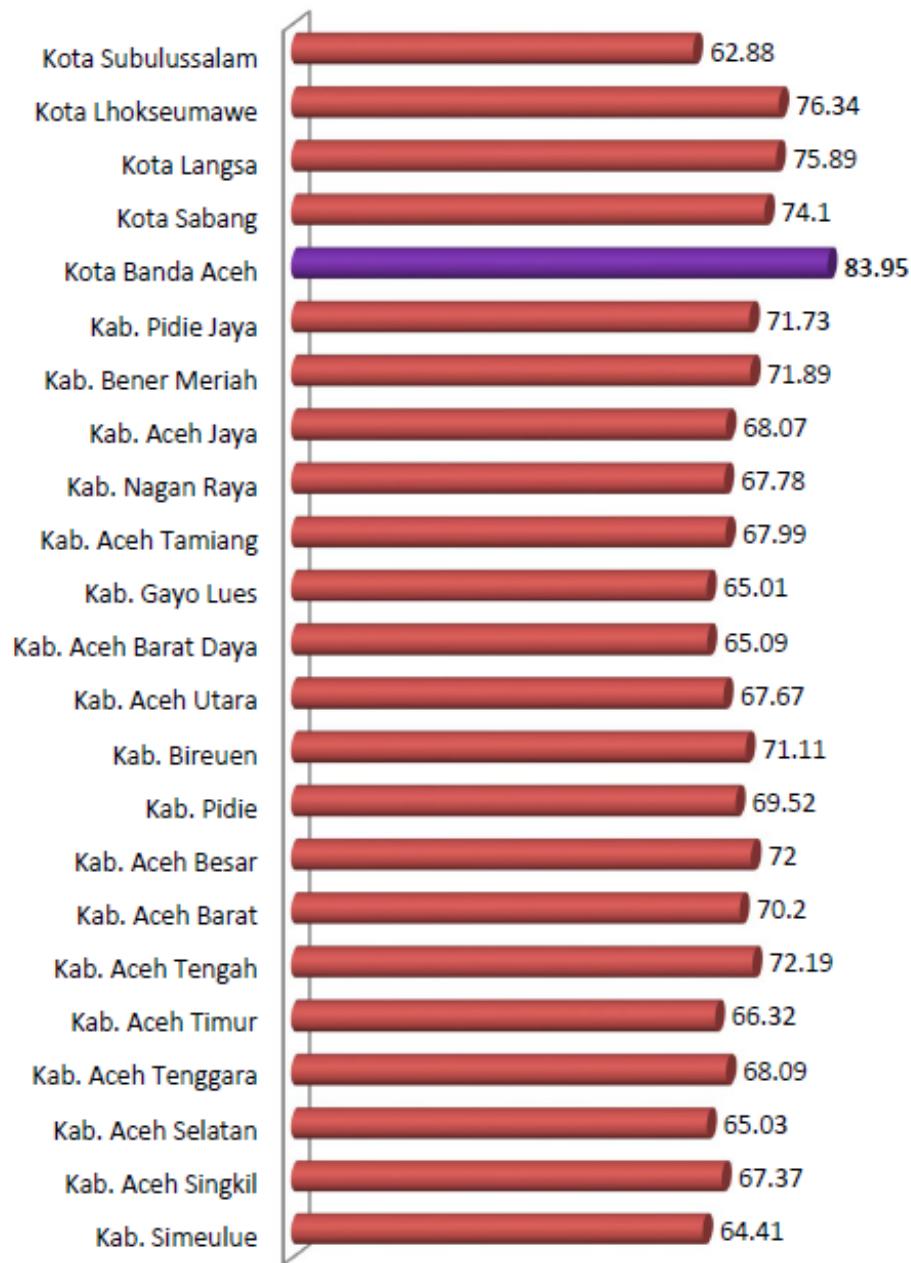
Jumlah pelaku bisnis kreatif meningkat dan partisipasi pemuda produktif yang meningkat serta terpantau oleh Pemerintahan Nasional Indonesia sehingga mendapatkan predikat Kota Kreatif Indonesia.

Meskipun demikian, Banda Aceh masih menghadapi masalah ekonomi berupa kemiskinan dan pengangguran. Dimana, Pengangguran menjadi salah satu permasalahan utama mengingat tingginya komposisi penduduk usia produktif di Banda Aceh serta migrasi tenaga kerja.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2017 sejumlah 1.155 orang. Hal ini menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya sejumlah 440 orang dengan kelompok umur tertinggi sebagai pencari kerja sejumlah 689 orang di umur 30 - 44 dan kelompok umur terendah sejumlah 29 orang di umur 45-54. Dimana, Balai Latihan Kerja merupakan instansi pemerintah yang menyediakan fasilitas pelatihan untuk siswa-siswi yang ingin melakukan latihan kerja mandiri. Di tahun 2017 siswa yang mengikuti pelatihan kerja sejumlah 1.546 orang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Tahun

2017 Kota Banda Aceh berhasil mencapai angka 83,95 untuk IPM. Ini menggambarkan bahwa Kota Banda Aceh sudah semakin baik kehidupan masyarakatnya baik dalam bidang pencapaian angka harapan hidup, kesehatan dan juga melek huruf.



Sumber: Banda Aceh dalam Angka 2018

Gambar 1.45 Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Provinsi Aceh 2014-2017

Sektor ekonomi Banda Aceh antara lain adalah dari Pariwisata, Sektor Ekspor - Impor, Industri, Konstruksi dan Infrastruktur, Produk Domestik, Jasa Transportasi, sektor Pertanian dan Pertambangan. Beberapa sektor utama antara lain adalah Pariwisata yang bersifat administratif dan mensupport beberapa daerah lain yang memiliki sumber daya alam untuk Pariwisata, dengan

laju kenaikan kunjungan dan interaksi yang mencapai 1,5% setiap tahun maka Pariwisata di Kota Banda Aceh juga menyokong sektor lain seperti sektor Industri, Produk Domestik, Jasa Transportasi dan Ekspor-import barang perdagangan.

C. Gemilang dalam Pilar Pendidikan

Kota Banda Aceh sebagai ibukota propinsi Aceh, memiliki kelebihan dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana dari pendidikan dengan jumlah tingkat dasar sampai dengan menengah atas. Jumlah fasilitas Pendidikan Kota Banda Aceh.

- Pendidikan dibawah KEMDIKBUD Negeri : 71 Unit
- Pendidikan dibawah KEMDIKBUD Swasta : 64 Unit
- Pendidikan dibawah KEMENAG Negeri : 18 Unit
- Pendidikan dibawah KEMENAG Swasta : 11 Unit

Ditambah dengan jumlah tempat atau lembaga pendidikan tingkat lanjut adalah sebanyak 2 Kampus setingkat Universitas Negeri dengan jumlah mahasiswa rata adalah -/+ 20.000 peserta ajar aktif dengan daya tampung setiap tahun -/+ 5.000 peserta ajar baru, 1 Kampus vokasi negeri dan kurang lebih 28 Kampus Swasta aktif. Jumlah peserta didik aktif tersebut bukan hanya berasal dari Banda Aceh akan tetapi dari beberapa daerah lain. Jumlah peserta didik tingkat siswa menengah atas -/+ 9.245 siswa, jumlah peserta didik tingkat menengah pertama adalah -/+ 8.988 siswa, peserta didik tingkat sekolah dasar -/+ 23.577 siswa, dan jumlah peserta didik tingkat taman kanak-kanak yaitu -/+ 8.321 siswa (sumber data <https://s.id/bandaacehdalamangka>). Melihat perbandingan yang lumayan jauh antara jenjang pendidikan Sekolah Dasar dengan tingkat lanjut dan menengah dengan perbandingan 4:1 yang menunjukkan beberapa jumlah putus sekolah dan atau perpindahan peserta didik dari Banda Aceh menuju ke daerah lain di Indonesia.

Maka dapat diberikan analisis bahwa terdapat kekurangan dari kualitas pendidikan baik dari sektor dasar, lanjut serta tingkat akhir seperti kampus setingkat Universitas atau Politeknik. Dan ini juga dikarenakan jumlah tenaga pengajar yang tersedia yang masih kekurangan dalam segi jumlah rasio adalah 1 pengajar berbanding -/+ 10 ~ 15 peserta didik, maka diperlukan sinergi pendidikan lebih inklusif dan transparan.

D. Bingkai syariah dalam Pilar Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintahan kota Banda Aceh memiliki jumlah pegawai negeri mencapai -/+ 4.307 orang terhitung dari tahun 2017 dengan jenjang pendidikan terbanyak adalah Strata 1 dengan jumlah gender tertinggi adalah perempuan yaitu -/+ 1553 orang.

Dari sektor pengembangan kota Banda Aceh memiliki peringkat dari dua instansi setingkat kementerian yaitu PEGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia, red) dan SPBE

(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, red). Banda Aceh tahun 2015 mendapatkan rerata 2.60 dengan kategori baik, meningkat dari kategori kurang di tahun 2014 dan tahun 2013 (sumber: <https://s.id/pegibandaaceh>). Dan pada tahun 2018, Banda Aceh mendapatkan Indeks SPBE dengan rerata 2.42 dengan kategori cukup (sumber: <https://s.id/spbebandaaceh>).

Penyelenggaraan pemerintahan dengan standar dari SPBE dan Banda Aceh selalu aktif dalam menyusun dan meningkatkan peran dan kebijakan pemerintahan Kota Banda Aceh sehingga menjadi kota dengan perkembangan yang cukup signifikan. Baik dari infrastruktur, suprastruktur dan infostruktur yang terus diperbaiki dan berkembang. Dengan kebutuhan pengembangan lanjut adalah dibidang kebijakan dengan koordinasi administrasi dan sekretariat daerah. Komitmen kota Banda Aceh dalam mendukung perkembangan Penyelenggaraan Pemerintah tertuang dalam Peraturan Walikota no.40 tahun 2018 tentang tata kelola Pemerintahan Berbasiskan TIK (sumber: <https://s.id/perwal80bandaaceh>) dan Peraturan Walikota no.26 tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data (sumber: <https://s.id/pp26tahun2018bandaaceh>).

E. Bingkai syariah dalam Pilar Kehidupan Sosial Kemasyarakatan

Perkembangan Kota Banda Aceh dibidang Sosial dan Kemasyarakatan terdapat beberapa konsentrasi antara lain pendidikan, kesehatan perumahan dan lingkungan, bencana dan penegakan hukum, agama, kemiskinan dan pembangunan daerah. Pendidikan Kota Banda Aceh adalah salah satu amanat undang-undang yang tertera pada pasal 31 ayat 2, maka pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas daerah, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah guru setiap tahun dengan kualitas yang juga terus dikembangkan, Guru pada tingkat Taman kanak-kanak, meningkat dari 758 orang tahun 2016, meningkat 902 orang tahun 2017, hal yang sama juga terjadi pada peningkatan jumlah tenaga pengajar di tingkat dasar sampai dengan lanjut yang meningkat dari 3.047 orang ditahun 2016 dengan kualitas pendidikan yang terus ditingkatkan dengan menunjuk salah satu Pilar *Smart City* Kota Banda Aceh adalah sistem pendidikan berbasiskan partisipasi masyarakat dan TIK (sumber: <https://s.id/bandaacehdalamangka>).

Dibidang kesehatan jumlah tenaga kesehatan Kota Banda Aceh adalah 2.503 orang, akan tetapi mengalami penurunan hampir 600 orang. Hal ini bisa dikarenakan menurunnya jumlah Rumah Sakit dari 14 Rumah Sakit menjadi 13 Rumah sakit. Dengan jumlah penduduk Banda Aceh maka terjadi ketimpangan atau kekurangan tenaga medis dan perlu ditingkatkan peran masyarakat bersinergi dengan Pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan Kota Banda Aceh.

Pada bidang perumahan dan lingkungan hidup juga mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017 dengan kepemilikan rumah tangga 50,36% di tahun 2016 menurun 47,04% di tahun 2017. Ditambahkan dengan kualitas pemanfaatan air sebagai sumber informasi pemanfaatan kebersihan masyarakat Kota Banda Aceh sangat tergantung pada besar pengelolaan

air dalam kemasan sebesar 92,22% dari jumlah total penduduk Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh masih sangat tergantung pada air olahan.

Dibidang Bencana dan Penegakan Hukum, Kota Banda Aceh mengalami peningkatan fluktuasi dari tahun 2015, 2016 dan 2017. Pada tahun 2017, 370 kasus terjadi pada rentang umur di atas 18 tahun. Dan terjadi peningkatan kasus tingkat tinggi (peredaran narkotik, penipuan/*fraud* dan penggelapan, red) dari 101 kasus ditahun 2016 meningkat menjadi 168 kasus ditahun 2017.

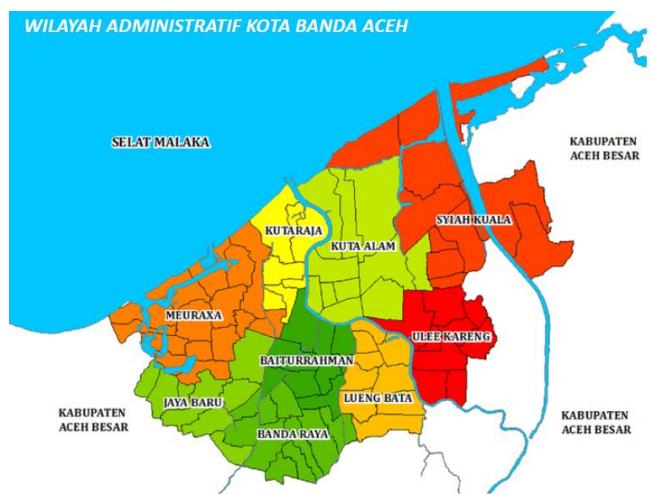
Selain itu, kasus perceraian Kota Banda Aceh juga meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2017. Beberapa hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya kasus kejahatan baik dari internal keluarga dan masyarakat, dimana berbanding lurus dengan penurunan jumlah peserta didik dan jumlah populasi masyarakat. Maka MIND MIGRATION, menjadi konsentrasi untuk Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kualitas kota dengan menerapkan konsep *Smart City* berbasiskan pada *Smart people* dan atau *Smart community/citizen*.

Kota Banda Aceh meningkatkan partisipasi masyarakat berdasarkan Penta Helix dimana Kota Banda Aceh memberikan ruang partisipasi dari sisi Pemerintah, Masyarakat atau Komunitas, Pelaku Usaha/Bisnis, Akademisi dan peran Media. Diberikan ruang kerja sama dibidang TIK dengan Banda Aceh melakukan MoU dan menuju MoA dengan pengambil kebijakan APJII yang dilakukan penandatanganan pada tanggal 30 Agustus 2019.

2. Analisis Kesiapan Daerah

2.1 Struktur

Analisis struktur daerah dilakukan untuk mengetahui kondisi dari unsur utama yang menjadi penggerak dalam pembangunan sebuah daerah. Struktur atau komponen inti dari sebuah daerah mencakup sumber daya manusia, kapasitas keuangan daerah, dan sumber daya pemerintah daerah.



Gambar 2.1 Wilayah Administratif Kota Banda Aceh

Sumber: Profil Kota Banda Aceh

2.1.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, jumlah penduduk Kota Banda Aceh secara administrasi tahun 2017 sebesar 259.913 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 133.728 jiwa dan perempuan 126.185 yang tersebar pada sembilan Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Jumlah penduduk selalu mengalami pertumbuhan pada kurun tiga tahun terakhir. Pertumbuhan penduduk disebabkan karena adanya kelahiran, kematian dan pindah datang penduduk. Secara rinci perkembangan penduduk Kota Banda Aceh disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh (2015-2017)

No	Tahun	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	2015	128 982	121 321	250 303

2.	2016	131 010	123 894	254 904
3.	2017	133 728	126 185	259 913

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2018

Persebaran jumlah penduduk Kota Banda Aceh dapat dikatakan cukup baik dan tidak terlalu jauh. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi berada pada kecamatan Kuta Alam yakni berjumlah 51.614 jiwa (19.86%) dan Kecamatan Baiturrahman dengan jumlah 36.721 jiwa (14.13%). Hal tersebut dipengaruhi oleh letak kedua kecamatan tersebut yang berada di tengah pusat kota serta dekat dengan pusat pemerintahan, kantor swasta, bank, dan industri ekonomi lainnya. Secara rinci persebaran jumlah penduduk Kota Banda Aceh berdasarkan Kecamatan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan (2017)

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Meuraxa	19.770	7,61
2	Jaya Baru	25.503	9,81
3	Banda Raya	23.919	9,20
4	Baiturrahman	36.721	14,13
5	Lueng Bata	25.607	9,85
6	Kuta Alam	51.614	19,86
7	Kuta Raja	13.365	5,14
8	Syiah Kuala	37.193	14,31
9	UleeKareng	26.221	10,09
Jumlah		259.913	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2017

Berdasarkan komposisi umur diketahui pada tahun 2017 jumlah penduduk usia produktif merupakan kelompok yang paling. Apabila di total, kelompok usia produktif (usia 20-64) mengisi 59,67% dari total jumlah penduduk Kota Banda Aceh. Angka tersebut diharapkan dapat menunjang *performance* kualitas sumber daya manusia Kota Banda Aceh dalam melaksanakan konsep *Smart City*. Secara rinci jumlah penduduk Kota Banda Aceh berdasarkan rentang usia dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Berdasarkan Rentang Usia

No	Rentang Usia (5 Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	0-4	27.247	10,48
2.	5-9	19.391	7,46

No	Rentang Usia (5 Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Percentase (%)
3.	10-14	16.559	6,37
4.	15-19	24.442	9,40
5.	20-24	39.922	15,36
6.	25-29	29.902	11,50
7.	30-34	22.768	8,76
8.	35-39	19.138	7,36
9.	40-44	16.475	6,34
10.	45-49	13.811	5,31
11.	50-54	10.305	3,96
12.	55-59	8.050	3,10
13.	60-64	5.249	2,02
14.	65+	6.654	2,56
Jumlah		259.913	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2018

Tingkat literasi masyarakat terhadap konsep *Smart City* meskipun belum merata, namun sudah cukup menjadi modal bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan persentase literasi masyarakat yang bukan hanya sekedar tahu dan bisa, tetapi juga mampu mensosialisasikan *Smart City awareness* kepada lingkungannya.

Tabel 2.4 Analisis Kualitas SDM Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Jumlah komunitas minat bakat/ hobi / kreatif di daerah	50	✓		
2.	Adanya komunitas pengembang /developer perangkat lunak TIK di daerah	Ada	✓		
3.	Adanya digital start up di daerah	Ada	✓		
4.	Adanya perguruan tinggi di daerah	15 Perguruan Tinggi	✓		
5.	Jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi dari pemerintah daerah	Inisiasi Data	✓		
6.	Jumlah tindakan pelanggaran ketertiban umum dalam satu tahun	183 Pelanggaran (Satpol PP & WH Kota Banda Aceh, 2017)	✓		
7.	Jumlah angka kriminalitas	1301 Angka Kriminalitas	✓		

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
	dalam satu tahun	(Polres Kota Banda Aceh, 2017)			
8.	Jumlah tindakan perusakan fasilitas umum dalam satu tahun	29 Kasus (Polres Kota Banda Aceh, 2017)	✓		
9.	Jumlah kegiatan tawuran antar kelompok warga dalam satu tahun	0	✓		

Berlandaskan analisis terhadap komponen kualitas sumber daya manusia daerah di Kota Banda Aceh dijelaskan bahwa tingkat kapasitas masyarakat dalam menerima, mengembangkan, atau mengimplementasikan konsep *Smart City* dalam interpretasi yang baik. Secara kualitatif Kota Banda Aceh memiliki banyak komunitas dan relawan TIK. Hanya saja hingga saat ini belum ada data riil mengenai jumlah Komunitas di Banda Aceh. Namun beberapa komunitas seperti DILO (*Digital Innovation Lounge*) dan MIT (*Masyarakat Information Technology*) cukup aktif melakukan inovasi terkait pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perguruan tinggi juga sangat responsif terhadap perkembangan *Smart City*. Unsyiah salah satu universitas yang terlibat aktif dalam pengembangan TIK bersama Pemkot Banda Aceh. Pemerintah Kota juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM dengan menyelenggarakan beasiswa terhadap putra putri daerah terbaik. Beasiswa tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk yang memiliki prestasi akademis, tapi juga untuk kemampuan non-akademis seperti olahraga dan seni. Selain itu ada juga beasiswa untuk santri dan masyarakat yang memiliki bakat dalam membaca al-quran serta tausyiah. Walaupun menuju kota pintar yang akan berbasis pada teknologi, Kota Banda Aceh tidak akan melupakan identitasnya sebagai kota yang islami.

Dari segi keamanan Kota Banda Aceh sangatlah kondusif. Tawuran antar warga sangat jarang terjadi. Jumlah pelanggaran ketertiban umum juga masih dalam keadaan baik tidak sampai mengganggu ketertiban umum. Dalam satu tahun, hanya ditemukan 29 kasus perusakan fasilitas umum. Angka yang sangat baik jika dibandingkan dengan kota-kota lain. Angka kriminalitas yang relatif rendah tersebut terwujud karena nilai-nilai islami yang ditanamkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Konflik antar warga sangat jarang terjadi karena masyarakat dibimbing untuk mengamalkan nilai keislaman dalam keseharian. Wali Kota Banda Aceh juga rutin menyelenggarakan program dzikir akbar yang dibalut dengan tausyiah untuk mengeratkan ukhuwah dan tali persaudaraan. Program ini bahkan diminati dan diikuti oleh kota-kota lain di Indonesia, bahkan ke luar negeri seperti Malaysia.

2.1.2 Sumber Daya Pemerintah

Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh sehingga wilayah ini menjadi pusat pemerintahan. Oleh karena itu, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berkewajiban untuk mendorong filosofi pembangunannya sebagaimana tujuan pembangunan

nasional dengan tetap memperhatikan serta memahami peran dan posisi daerahnya. Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan dan 90 gampong. Pendapatan per kapitanya mencapai 62 juta/kapita/tahun atau sekitar 4.300 dolar.

Tabel 2.5 Nama Ibukota Kecamatan di Kota Banda Aceh 2017

No.	Kecamatan District	Ibu Kota Capital	Jumlah Kemukiman Number of Kemukiman	Jumlah Gampong Number of Villages
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meuraxa	Ulee Lheue	2	16
2	Jaya Baru	Lampoh Daya	2	9
3	Banda Raya	Lamlagang	2	10
4	Baiturrahman	Neusu Jaya	2	10
5	Lueng Bata	Lueng Bata	1	9
6	Kuta Alam	Bandar Baru	2	11
7	Kuta Raja	Keudah	1	6
8	Syiah Kuala	Lamgugob	3	10
9	Ulee Kareng	Ulee Kareng	2	9
Jumlah		2017	17	90
<i>Total</i>		2016	17	90
		2015	17	90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap sumber daya pemerintahan Kota Banda Aceh, didapat tingkat kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan program *Smart City* sudah bernilai cukup baik dimana telah ada upaya untuk melakukan integrasi dan interoperabilitas di dalam proses bisnis pemerintah daerah dan diterbitkan dalam sebuah dokumen *Information Technology Master Plan* (ITMP) untuk mewujudkan komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan Teknologi Informasi. Kekuatan sumber daya di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh saat ini sebanyak 4.307 pegawai dimana 2.210 pegawai adalah lulusan D4/S1 dan 322 pegawai adalah lulusan S2 serta lulusan S3 sebanyak 2 pegawai. Sebanyak 29 pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan Teknologi Informasi.

Hingga saat ini terdapat 123 layanan aplikasi yang digunakan di lingkungan instansi pemerintahan Kota Banda Aceh untuk meningkatkan pelayanan. Aplikasi tersebut terdiri dari aplikasi layanan publik sebanyak 98 buah dan aplikasi internal sebanyak 23 buah. Selain itu, pemerintah daerah juga telah merilis 107 website untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Website tersebut terdiri dari 45 web milik Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Pemko Banda Aceh dan 62 web Gampong Kota Banda Aceh.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh

No.	Pendidikan <i>Education</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SD	17	3	20
2	SMP	36	3	39
3	SLTA	502	477	979
4	D1	3	55	58
5	D2	22	210	232
6	D3	98	347	445
7	D4	20	37	57
8	S1	600	1553	2153
9	S2	155	167	322
10	S3	2	-	2
Jumlah		2017	1 455	2 852
<i>Total</i>		2016	1 523	2 882
		2015	1 939	3 859
				4 307
				4 405
				5 798

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Banda Aceh

Jaringan infrastruktur telekomunikasi sudah tersedia di seluruh Kota Banda Aceh, baik yang berbasis kabel *Fiber Optic* (FO), maupun yang menggunakan koneksi *wireless*. Jangkauan (*coverage*) internet di Kota Banda Aceh sudah menjangkau seluruh wilayah kecamatan. Sebagian SKPK sudah terhubung menggunakan jaringan FO, sedangkan untuk kelurahan masih beberapa yang sudah terhubung. *Data center* telah dibangun oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh dengan kapasitas 8 server. Selain Diskominfotik, beberapa SKPK juga memiliki server yang ditempatkan di unit kerjanya sehingga perlu regulasi untuk membuat server ini terpusat pada satu *data center* saja. *Data Center* kota yang dikelola masih belum memenuhi standar kelayakan *data center* dan belum mampu menjadi *Data Recovery Center*.

Walaupun dengan keterbatasan tersebut, kebutuhan tersebut akan terus bertumbuh dan berkembang setiap tahunnya sesuai dengan peningkatan kebutuhan dan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik berbasis internet dan teknologi informasi. Pengamanan data yang dilakukan dengan memberlakukan password untuk akses data dan menggunakan *firewall barracuda* untuk server di *data center*. Operator data center melakukan

backup data dan aplikasi secara berkala baik secara manual maupun otomatis. Untuk aplikasi internal atau tertentu menggunakan intranet, sedangkan aplikasi publik menggunakan *subdomain*. Kemudian penggunaan subnet yang berbeda untuk membedakan antara akses publik dengan akses jaringan internal. Untuk lebih menjamin pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik dan TIK, Kota Banda Aceh masih perlu membangun rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan secara komprehensif.

Tabel 2.7 Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Persentase pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas	324 Pegawai (7.5%)	✓		
2.	Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan Ilmu Komputer/Teknik Informatika	29 Pegawai		✓	
3.	Jumlah relawan TIK di daerah	Inisiasi Data	✓		
4.	Persentase jumlah unit komputer (PC &Laptop) terhadap jumlah pegawai	Inisiasi Data	✓		
5.	Persentase pegawai berusia 50 tahun ke atas terhadap jumlah pegawai	N/A			
6.	Persentase pegawai berusia 40 -50 tahun terhadap jumlah pegawai	N/A			
7.	Persentase pegawai berusia 25 -40 tahun terhadap jumlah pegawai	N/A			
8.	Jumlah sistem informasi yang digunakan di pemerintah daerah	123	✓		
9.	Persentase ketersediaan jaringan broadband access terhadap jumlah kantor pemerintahan	100%	✓		
10.	Persentase ketersediaan jaringan LAN/WAN di kantor pemerintahan	100%	✓		
11.	Jumlah lokasi wireless internet (hotspot) di kawasan perkantoran pemerintahan	Inisiasi Data			
12.	Ketersediaan data center (baik yang dikelola sendiri maupun manage service) untuk kepentingan pemerintahan	Ada	✓		
13.	Ketersediaan rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan	Tersedia	✓		
14.	Ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	I-Rencana	✓		

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
	yang interoperable				
15.	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang interoperable	E-Budgeting, SIPKD	✓		
16.	Ketersediaan sistem informasi kantor virtual pemerintah daerah yang interoperable	bandaacehkota.go.id	✓		
17.	Ketersediaan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang interoperable	EMONPU, OMSPLAN, SIMPEL, LPM	✓		
18.	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan kepegawaian daerah yang interoperable	E-Kinerja, E-Disiplin, SIMPEG	✓		
19.	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan legislasi daerah yang interoperable	N/A			
20.	Ketersediaan sistem informasi Pelayanan publik yang interoperable	Ada	✓		

Sebagai unsur yang menjadi penggerak dari *Smart City*, saat ini kesiapan Pemerintah Kota Banda Aceh di dalam melaksanakan *Smart City* merupakan faktor kunci keberhasilan *Smart City*. Hal tersebut turut ditunjang oleh visi Diskominfotik dalam upaya terwujudnya penyelenggaraan TIK menuju masyarakat Banda Aceh gemilang yang Islami.

2.1.3 Kapasitas Keuangan Daerah

Kapasitas Keuangan Daerah digambarkan melalui proyeksi APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagai kerangka keuangan Kota Banda Aceh untuk masa yang akan datang, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pemberian yang wajib dan mengikat serta merupakan prioritas utama.

Sebelum dialokasikan berbagai pos belanja dan pengeluaran besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan antara lain:

- Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan pelayanan dimana retribusi tersebut dipungut.

- b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk menghasilkan tingkat pengembalian investasi.
- c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintah daerah.
- d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- e. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Selanjutnya untuk menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.8 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh

No	Uraian	Data Tahun Dasar 2017	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
1.	Pendapatan	1.247.693.437.876	11.26%	1.2 T	1.3 T	1.5 T	1.7 T	1.9 T
2.	Pencarian Dana Cadangan	0		-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0		15 M				
	Total Penerimaan	1.247.693.437.876	11.26%	1.2 T	1.3 T	1.5 T	1.7 T	1.9 T
	Dikurangi							
4.	Pengeluaran Pembiayaan	14.300.000.000		11.8 M				
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.233.393.437.876		1.2 T	1.3 T	1.5 T	1.7 T	1.9 T

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh 2017

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai:

- a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dan belanja tidak terduga.
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicate*) kepala daerah seperti meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bidang aqidah, syariah, dan akhlak, meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dan meningkatkan dan memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pendanaan alokasi kapasitas riil keuangan Daerah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.9 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

No	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		%	Rp.								
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	100%	1.2 T	100%	1.3 T	100%	1.5 T	100%	1.7 T	100%	1.9 T
1.	Prioritas I	51.03%	619 M	51.14%	695 M	51.07%	778 M	50.99%	872 M	50.98%	976 M
2.	Prioritas II	35.82%	434 M	35.71%	485 M	37.43%	572 M	37.79%	647 M	38.35%	738 M
3.	Prioritas III	13.16%	159 M	13.15%	178 M	11.50%	174 M	11.22%	191 M	10.67%	203 M

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh 2017

Sumber daya yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mensukseskan pelaksanaan *Smart City* hingga saat ini harus diakui masih sangat terbatas. Belanja untuk peningkatan dan pengembangan kapasitas e-government pada Diskominfotik Kota Banda Aceh

dinilai masih sangat kurang. Untuk dapat mewujudkan salah satu cita-cita layanan e-government dengan jaminan layanan sebesar 99,5% dengan estimasi *support* biaya mencapai 4% APBD, diharapkan pemerintah daerah dapat memperkirakan alokasi sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan dan keuangan yang dapat dialokasikan untuk program *Smart City* dengan jumlah anggaran yang memadai.

Demi memperoleh layanan teknologi informasi yang andal dan prima dibutuhkan biaya atau sumber daya finansial dengan jumlah yang sesuai dengan fitur serta kualitas yang diinginkan. Oleh karena itu maka setiap kebutuhan biaya harus dihitung secara cermat dan mendapatkan komitmen persetujuan pimpinan untuk dialokasikan atau dibayarkan kepada penyedia jasa layanan teknologi informasi ataupun dalam proses swakelola.

Dikarenakan beberapa hal keterbatasan kemampuan pendanaan di atas, Perangkat Daerah ke depannya juga dapat didorong untuk mulai mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif atau sumber pembiayaan pihak ketiga lainnya sebagai sumber daya dalam hal keuangan untuk menjalankan program *Smart City*, seperti misalnya dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), donasi sukarela, *sponsorship*, promosi terbuka dan bentuk lainnya.

Yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam pemilihan pola penganggaran TIK Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu:

- Umur ekonomis sumber daya TIK
- Ketersediaan anggaran
- Tingkat kecepatan keusangan (*obsoleteness*)
- Nilai strategis TIK
- Karakteristik proyek (skala, risiko, dan lain- lain)
- Urgensi
- Ketersediaan pemasok
- Ketersediaan sumber daya
- *Capital budgeting*
- Visi dan misi institusi.

Perlu diperhatikan juga bahwa tidak ada rumus tunggal (*one size fit all*) dalam penentuan pola tersebut sehingga diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh mempertimbangkan semua faktor secara komprehensif. Indikator keberhasilan dari Managemen Belanja/Investasi TIK menurut Permen Kominfo Nomor 41/2007 adalah:

- a) Digunakannya sumber-sumber pendanaan yang efisien.
- b) Kesesuaian realisasi penyerapan anggaran TIK dengan realisasi pekerjaan yang direncanakan.
- c) Diperolehnya sumber daya TIK yang berkualitas dengan melalui proses belanja/investasi TIK yang efisien, cepat, bersih dan transparan

Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang jelas dan komitmen pemimpin daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan *Smart City* yang maksimal. Selain itu, dibutuhkan perencanaan yang matang serta memprediksi *impact* yang akan dihasilkan setelah mengimplementasikan konsep *Smart City*.

Tabel 2.10 Analisis Kapasitas Keuangan Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Persentase Nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	23%	✓		
2.	Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu	Rp.79.270.315.576	✓		
3.	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah	46,5%	✓		
4.	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Total Belanja Daerah	34%	✓		
5.	Jumlah Anggaran untuk Belanja <i>Smart City</i> yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2019	Inisiasi Data		✓	
6.	Jumlah Anggaran untuk Belanja <i>Smart City</i> yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2020	Dalam Tahap Pembahasan			
7.	Jumlah program pembangunan untuk mendukung <i>Smart City</i> di daerah	Inisiasi Data	✓		
8.	Nilai investasi masuk yang mendukung pembangunan daerah	N/A			
9.	Jumlah sumber-sumber pendanaan pembangunan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung <i>Smart City</i>	N/A			

Kontribusi Nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh pada tahun 2017 cukup tinggi. Total pendapatan Kota Banda Aceh mencapai Rp 1,24 Triliun dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 270 Miliar atau mencapai 23%. Sedangkan komposisi belanja dari total belanja mencapai Rp 1,22 Triliun terdiri atas belanja langsung Rp 594 Miliar dan belanja tidak langsung Rp 619 Miliar dengan persentase belanja pegawai (baik langsung maupun tidak langsung) cukup sehat sebesar 46,5%. Adapun pembiayaan infrastuktur yang dhitung dari belanja modal Rp 412 Miliar atau mencapai 34%.

2.2 Infrastruktur

2.2.1 Infrastruktur Fisik

Kesiapan infrastruktur fisik di Kota Banda Aceh memberi gambaran dan ukuran kondisi sarana dan prasarana fisik yang menjadi titik tolak dalam pembangunan *Smart City* daerah. Saat ini dalam hal infrastruktur fisik jalan, sepanjang 569,780 m dalam kondisi baik, 92,110 m jalan dalam kondisi moderate (sedang dan layak digunakan). Dengan kata lain sebesar 93% kondisi jalan di Kota Banda Aceh dalam kondisi baik dengan total panjang jalan keseluruhan sepanjang 707,343 m. Sepanjang 672,989 m merupakan jalan kota dan 34,554 m merupakan jalan desa. Jalan di Kota Banda Aceh juga sudah menyediakan trotoar bagi pejalan kaki di beberapa daerah perkotaan. Permukaan jalan yang ada di Kota Banda Aceh sudah menggunakan aspal secara menyeluruh. Persentase penggunaan lampu jalan hemat energi sebanyak 12.3 %. Sarana lalu lintas juga cukup lengkap seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11 Banyaknya Sarana Lalu Lintas Jalan di Kota Banda Aceh

No	Sarana Lalu Lintas Jalan	Satuan	Jumlah (2017)
1.	Rambu Jalan	Unit	2.104
2.	Marka Jalan	M	85.085
3.	RPPJ	Unit	96
4.	<i>Traffic Light</i>	Titik	21
5.	<i>Warning Light</i>	Titik	2
6.	Halte	Unit	89
7.	Papan Nama Jalan	Unit	1.090

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Untuk kawasan bisnis dan perkantoran tersebar di pusat Kota Banda Aceh antara lain di ruas Jl. T. Nyak Arief, Jl. Tengku Imum Lueng Bata, Jl. Tgk. Abu Lam U, Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh. Untuk pasar dengan pelayanan skala regional terdapat Suzuya Superstore yang berada di kecamatan Baiturrahman. Untuk kegiatan pasar tradisional perdagangan masyarakat tersebar di beberapa kecamatan Kota Banda Aceh antara lain yang terbesar berada di ruas Jl. Pangeran Diponegoro (Pasar Aceh), Peunayong (Pasar Ikan dan Pusat Cinderamata), dan Ulee Kareng (Pasar Tradisional Simpang Tujuh). Daftar pasar tradisional berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.12 Daftar Pasar Tradisional Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2017

No	Kecamatan	Nama Pasar
1.	Meuraxa	Pasar Wisata Ulee Lheue
2.	Jaya Baru	Pasar Lam Jamee*
3.	Banda Raya	-
4.	Baiturrahman	Pasar Atjeh

No	Kecamatan	Nama Pasar
		Pasar Kampung Baru Pasar Peuniti Pasar Seutui
5.	Lueng Bata	Pasar Newton Pasar Rakyat Batoh
6.	Kuta Alam	Pasar Kartini Pasar Ikan Pasar Daging Pasar Bumbu Pasar Unggas Pasar Nasabe Pasar Rex Pasar Lampulo
7.	Kuta Raja	-
8.	Syiah Kuala	Pasar Rukoh*
9.	Ulee Kareng	Pasar Ulee Kareng

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh (* belum terdata)

Pada aspek konektivitas, terdapat pelabuhan Ulee Iheue yang merupakan gerbang laut keluar masuk Aceh. Sangat strategis untuk perdagangan dan ekonomi. Jumlah kendaraan pribadi di Kota Banda Aceh berjumlah 221.074, relatif sangat tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Banda Aceh. Pada tahun 2017 banyaknya kendaraan bermotor wajib uji umum sebanyak 6.279 kendaraan sedangkan wajib uji TU sebanyak 8.882 kendaraan. Adapun angka kecelakaan lalu lintas terbilang relatif tinggi mencapai 357 kasus sepanjang 2017. Jam kemacetan erjadi selama jam kerja (07.00 - 19.00) dengan durasi kurang lebih selama 3 jam.

Tabel 2.13 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik	90,53%	✓		
2.	Persentase panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal	Inisiasi Data		✓	
3.	Persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik	Inisiasi Data	✓		
4.	Persentase rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik	Inisiasi Data	✓		
5.	Adanya kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis	Ada	✓		

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
6.	Adanya kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat	17 Pasar Tradisional/Modern	✓		
7.	Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik	Inisiasi Data	✓		
8.	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik	Inisiasi Data	✓		

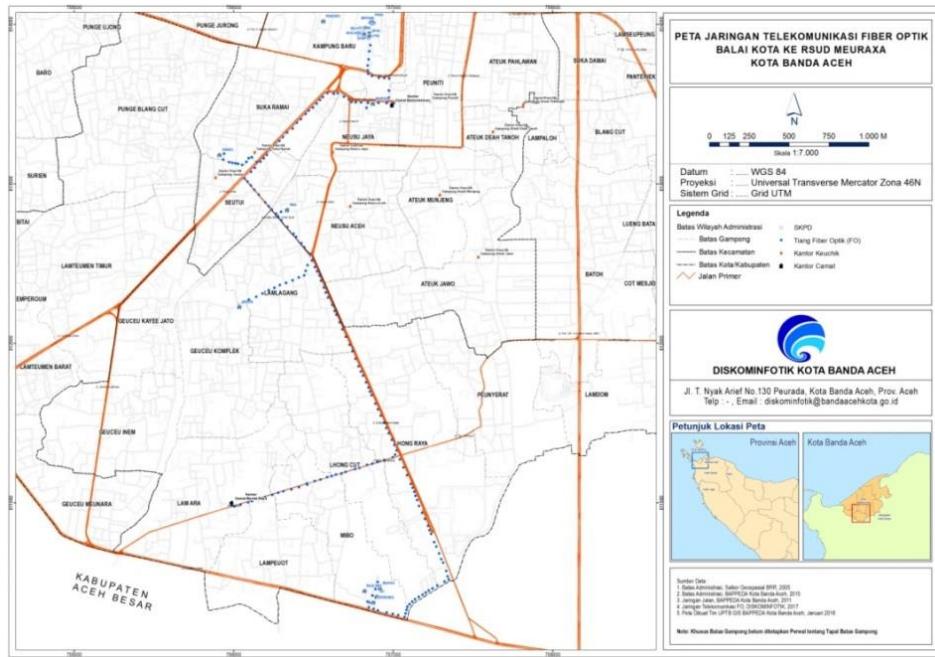
Di bidang pendidikan, dari 324 sekolah negeri/swasta, hanya terdapat beberapa yang harus mendapatkan prioritas rehabilitasi dan revitalisasi. Pada umumnya kondisi gedung dan ruang kelas secara umum sudah baik. Hal ini tentunya bersifat dinamis sejalan dengan usia manfaat dan usia fisik dari gedung dan prasarana/sarana itu sendiri. Maka pemerintah daerah akan dapat mengukur seberapa banyak pembangunan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mencapai visi *Smart City* daerah.

Ditinjau dari sektor kesehatan, dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sangat membantu dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2017 Kota Banda Aceh memiliki 13 unit rumah sakit, yang terdiri dari rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah dan swasta. Secara umum sarana dan prasarana rumah sakit yang tersedia sudah dapat dikatakan baik. Beberapa rumah sakit juga sudah menerapkan sistem berbasis elektronik dalam hal pelayanan dan administrasi. Untuk lebih lengkap megenai infrastruktur rumah sakit dapat dilihat pada bagian infrastruktur social.

Di sektor keamanan dari bencana, pemerintah kota memiliki tiga gedung *escape building*. Ketiga *escape building* di Kecamatan Meuraxa, masing-masing berada di Gampong Lambung, Deah Glumpang dan Gampong Alue Deah Tengoh. Ketiga gedung ini sudah berumur 12 tahun dan selama itu pula fungsi utamanya sebagai tempat evakuasi saat terjadi bencana. Tapi, gedung itu belum pernah terpakai, karena sejauh ini Allah masih menjauhkan Kota Banda Aceh dari bencana.

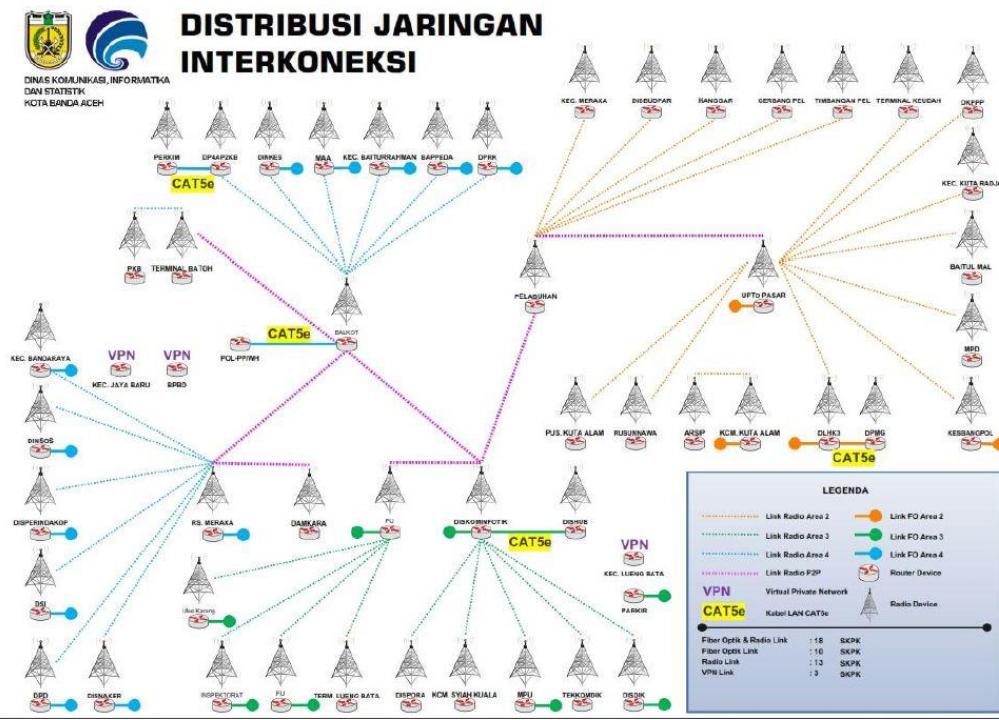
2.2.2 Infrastruktur Digital

Peran teknologi komunikasi dan informatika merupakan salah satu penopang dalam pengoperasian konsep *Smart City*. Oleh Karena itu diperlukan dukungan dari provider jasa telekomunikasi dan *supply listrik* yang berkesinambungan serta tidak terputus. Di Kota Banda Aceh, persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G sudah 100% dengan skala layanan jaringan berayun di level bagus dan sangat bagus. Jaringan intra dan antara perangkat daerah sudah menggunakan insfrastruktur jaringan *fiber optic* (FO), begitu pula dengan layanan jaringan FO di perumahan-perumahan.



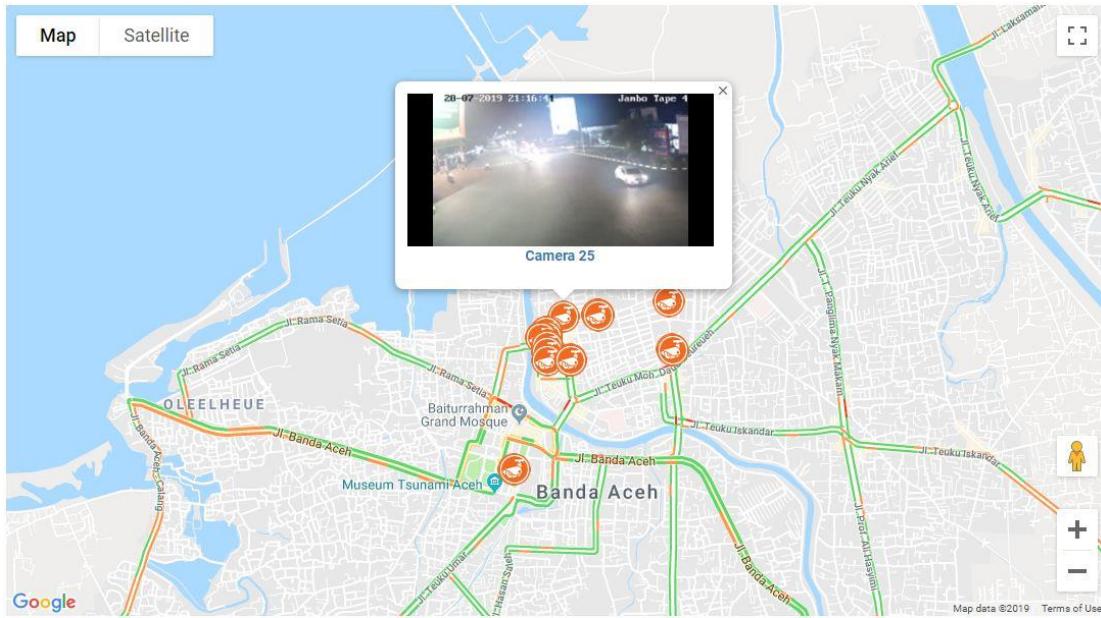
Gambar 2.2 Peta Jaringan Telekomunikasi *Fiber Optic* Balai Kota ke RSUD Meuraxa

Jaringan Intranet Pemerintah Kota Banda Aceh menggunakan *Fiber Optic* (FO) tetapi ada beberapa OPD yang belum terdistribusi FO dan masih ditransmisikan melalui Radio, maka sangat disarankan perlu distribusi FO secara menyeluruh ke tiap OPD yang untuk memperkuat *backbone* intranet Kota Banda Aceh.



Gambar 2.3 Distribusi Jaringan Interkoneksi dalam Lingkungan Pemkot Banda Aceh
 Sumber: Hasil Survey Dinas Kominfo Kota Banda Aceh Tahun 2018

Surveillance Sistem adalah sistem yang digunakan untuk mengawasi tempat- tempat tertentu, dan mengambil input menggunakan kamera CCTV. Area Traffic Control Sistem atau yang lebih dikenal dengan istilah ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan. Di Kota Banda Aceh sendiri sistem ini dikenal dengan Banda Aceh *Surveillance Sistem* (BASS). Dengan BASS diharapkan menjadi cikal bakal lahirnya sistem yang lebih besar dan pintar seperti *City Operation Center* dengan segala inovasinya. Masyarakat juga dapat melihat hasil tangkapan CCTV secara *real time* dengan mengakses situs BASS.bandaacehkota.go.id. CCTV ini juga diperuntukkan untuk membantu kepolisian memantau dan menyelidiki kasus kecelakaan lalu lintas dan kriminal. Bahkan jika petugas pemantau melihat langsung adegan kriminalitas melalui CCTV, petugas akan melaporkannya kepada polisi. Masyarakat juga dapat meminta untuk melihat/menggandakan video tangkapan CCTV untuk dijadikan alat bukti tindakan kriminal seperti pencurian motor atau jambret. Namun dengan ketentuan dan syarat dan SOP yang diberlakukan oleh Dishub Pemkot Banda Aceh.



Gambar 2.4 Titik Lokasi Penempatan CCTV di Kota Banda Aceh

Di Kota Banda Aceh kamera pemantau dibedakan beberapa jenis sesuai fungsinya. Ada kamera *traffic light* dan kamera pemantau *existing*. Selain itu ada juga kamera pemantau keramian dan pemantau bencana. Kamera pemantau (CCTV) tersebut dikelola oleh beberapa instansi seperti Dishub Provinsi, Dishub Pemkot Banda Aceh, dan Diskominfoik Kota Banda Aceh. Secara keseluruhan kamera CCTV yang tersebar di dalam kota Banda Aceh mencapai 100 unit. Namun saat ini masih 40 kamera yang terhubung secara optik dan dapat diawasi secara langsung oleh petugas di Madani Center. Tempat-tempat yang sudah terpantau CCTV yaitu ruas jalan protokol seperti Jalan Daud Beureueh, Jalan Panglima Polem, Jalan Pocut Baren, Pasar Peunayong, Taman Sari, perkantoran dan sejumlah fasilitas publik dan objek wisata di Banda Aceh.

Madani Center digunakan untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat seperti mengawasi lalu lintas, ketertiban pasar, kebersihan, serta membantu penegak hukum dalam penyelidikan kasus hukum. Dengan kamera kontrol itu, Dishub juga dapat memantau aktivitas dan kinerja petugas di lapangan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Ke depan Pemkot Banda Aceh berkomitmen terus menambahkan jumlah kamera CCTV. Sehingga semua sudut kota Banda Aceh akan terpantau melalui Madani Center. Tujuannya agar keberadaan fasilitas itu akan memberi kemudahan bagi Pemkot Banda Aceh dan Masyarakat. Bahkan data rekaman aktivitas kota yang terekam dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, swasta, universitas, dan para peneliti. Untuk jumlah dan titik lokasi penempatan dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.14 Kamera *Traffic Lights* dan Kamera Pemantau dalam Kota Banda Aceh

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Nama Instansi
I	CCTV Simpang Traffic Light		
	Simpang PDAM	3	Provinsi (Diskomintel Aceh)/ Dishub
	Simpang Jambo Tape	4	Provinsi (Diskomintel Aceh)/ Dishub
	Simpang DODIK	4	Provinsi (Diskomintel Aceh)
	Simpang BMCK	3	Provinsi (Diskomintel Aceh)
	Simpang JAM	2	Provinsi (Diskomintel Aceh)
	Simpang Mesjid Raya	2	Provinsi (Diskomintel Aceh)
	Simpang BPKP	3	Provinsi (Diskomintel Aceh)
	Simpang Keuangan	3	Provinsi (Diskomintel Aceh)
	Simpang Pocut Baren	3	Provinsi (Diskomintel Aceh)/ Dishub
	Simpang MAN	3	Provinsi (Diskomintel Aceh)/ Dishub
	Simpang Surabaya	4	Provinsi (Diskomintel Aceh)
	Simpang KODIM	3	Provinsi (Diskomintel Aceh)
	Simpang 5	-	Provinsi (Diskomintel Aceh)
	Simpang AMD	2	Provinsi (Diskomintel Aceh)
	Simpang Dharma (Depan DLHK3)	4	Dishubkominfo
II	CCTV Keramaian		
	Kawasan Pasar Sayur Peunayong (Jl. Kartini)	11	Dishubkominfo
	Kawasan Simpang 5 Peunayong (Jl. TP. Polem)	3	Dishubkominfo
	Taman Sari	3	Dishubkominfo
	TOTAL	60	

Tabel 2.15 Kamera Pemantau Keramaian Kota Banda Aceh TA. 2017 (Otsus)

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Nama Instansi
I	CCTV Keramaian		
	Kawasan Pasar Ikan Peunayong	10	Diskominfotik
	Kawasan Pasar Sayur Peunayong	10	Diskominfotik
	Taman Sari	10	Diskominfotik
	Kawasan Simpang Mesra	3	Diskominfotik
	Kawasan JL. Imam Bonjol	4	
II	Kamera Counting		
	Depan Dinas PU	3	Diskominfotik

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Nama Instansi
	Jembatan SDN 54 Jl. T. Nyak Arief	3	Diskominfotik
III	Kamera Pemantau Bencana		
	Gedung Pasar Sayur Peunayong	4	Diskominfotik
	Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh	4	Diskominfotik
	Total	51	

Pusat data (*Data Center*) merupakan pusat pemrosesan data dengan didukung perangkat pengolahan data. Pusat data disebut juga dengan pusat komputerisasi. Pusat data merupakan server data terpusat dari jaringan di suatu jaringan, baik dalam jaringan lokal ataupun global. Dalam penerapan ini harus dipastikan terlebih dahulu bahwa interkoneksi antar OPD sudah stabil (sangat direcomendasikan telah di topang dengan *Fiber Optic*). Saat ini Pusat Data Pemkot Banda Aceh terletak di Diskominfotik, namun penempatan server SKPK belum terpusat seluruhnya di Pusat Data Diskominfotik. Beberapa server masih tersebar di beberapa SKPK seperti yang terlihat pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5 Jumlah Server Serta Lokasi Penempatan Server di Kota Banda Aceh

Pembangunan sistem informasi di Pemerintahan Kota Banda Aceh masih ada yang saling terpisah dan tidak terintegrasi. Sistem yang dibangun dengan teknologi tertutup (*closed-source*) dan tidak sedikit pula yang dibangun tanpa menggunakan skema *database* terstandar sehingga sangat sulit untuk dinTEGRASIKAN dengan sistem lain. Untuk itu diperlukan kerangka kerja (*framework*) dan aplikasi yang bisa menerapkan interoperabilitas dari setiap sistem informasi yang ada pada masing-masing OPD agar pengelolaan informasi bisa lebih efisien dan efektif. Dengan penerapan aplikasi ini, diharapkan dapat diambil manfaatnya pada sistem informasi yang sedang dikembangkan maupun yang sudah berjalan. Usaha untuk mengintegrasikan data sistem informasi dari sumber informasi lainnya yang heterogen baik dari sisi spesifikasi perangkat lunak, perangkat keras, atau format data dapat diwujudkan tanpa perlu mengubah secara

keseluruhan sistem yang ada serta tidak perlu membangun aplikasi terpusat dengan biaya yang tidak sedikit.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam komitmennya membangun *Smart City* telah menyediakan jaringan *broadband access* untuk masyarakat dan sejumlah lokasi *wireless* untuk publik di kantor-kantor instansi pemerintah dan menyediakan fasilitas *wireless* (WiFi) di taman yang ada di pusat Kota Banda Aceh. Untuk bidang pendidikan, setiap satuan pendidikan di semua jenjang saat ini telah wajib menggunakan aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang berlaku secara nasional dan ada sebagian sekolah yang telah menyelenggarakan ujian secara online, secara umum beberapa sekolah di Kota Banda Aceh telah memiliki akses internet walaupun belum semuanya mampu menyediakan akses layanan internet secara prima. Begitu pula halnya dengan fasilitas kesehatan di Kota Banda Aceh. Rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah Kota telah memberikan layanan berbasis elektronik/digital.

Tabel 2.16 Ketersediaan Infrastruktur TIK Kota Banda Aceh

No	Ketersediaan Infrastruktur TIK	Ya/ Tidak	Keterangan (Jumlah, Sebaran, Kapasitas, Status)
1.	Ketersediaan jaringan 4G/3G	Ya	-
2.	Ketersediaan Broadband Access	Ya	-
3.	Akses internet terpusat (didistribusikan)	Tidak	Biaya internet dianggarkan di masing-masing Dinas/instansi
4.	Jaringan antar SKPD (Instansi pemerintah)	Ya	Sudah tersedia jaringan interkoneksi di 45 OPD, melalui radio/wireless 21 OPD \pm 5 mbps dan Fiber Optik 24 OPD \pm 300mbps
5.	Ketersediaan Hotspot untuk internal Pemerintah dan untuk publik	Ya	-
6.	Data Center Pemerintah	Ya	Dikelola oleh beberapa instansi/dinas yaitu: Diskominfoik Kota Banda Aceh dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Banda Aceh
7.	Data Center Recovery Pemerintah	Tidak	Masih dalam perencanaan

Pasokan listrik di Kota Banda Aceh secara umum cukup baik meskipun masih ditemukan kejadian pemadaman listrik secara bergilir. Hingga saat ini tercatat jumlah langganan PLN sebanyak 219.822 nomor langganan dengan besar daya tersambung 392.684.492 VA. Kesiapan

infrastruktur digital daerah diperlukan untuk mengukur kesiapan daerah dalam melaksanakan program *Smart City*, mengingat di dalam konsep *Smart City*, teknologi merupakan *enabler* yang dapat memberikan percepatan terhadap hasil capaian dari *Smart City*. Secara umum Kota Banda Aceh telah memiliki kesiapan yang baik dalam hal infrastruktur digital.

Tabel 2.17 Beberapa Aplikasi Layanan Publik/Internal Pemko Banda Aceh

No	Sektor	Daftar Aplikasi
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - PPDB Online - Web2SMS Gateway - Data Pokok (DAPO) - VERVALPTK - Data Sekolah - SIKULA - VervalPD - Ujian Berbasis Komputer (UBK) - Sistem Informasi Daya Terpadu (SIDARA)
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - SIKDA GENERIC - SITT Online - SPINAKES (Sistem Informasi Pengendalian Tenaga Kesehatan <i>Online</i>) - E-Puskesmas - SITT <i>Offline/Desktop</i> - Siskohatkes (Sistem Informasi Kesehatan Haji Terpadu) - E-Health
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - ROTROID – Membangun dengan Data - EMONPU (<i>Electronic Monitoring</i> Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh) - SIMTARU (Sistem Informasi Tata Ruang) - E-GADIS (<i>Electronic Gambar Desain</i>)
4.	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - INFO KERJA - SINAKER (Sistem Informasi Tenaga Kerja)
5.	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - E-LPJU (Aplikasi Penerangan Jalan Umum) - Pengelolaan Data Pertamanan - Nabung Sampah DLHK3 - E-Retribusi DLHK3 - E-Tree (Pengelolaan Data Pohon Kota Banda Aceh) - Web HKBNI - E-Monev Berindah

No	Sektor	Daftar Aplikasi
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> - ANTRIAN ONLINE - Sistem Pendaftaran Akta Kelahiran Online - SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) - Akte Kematian Online
7.	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - SIM-KAPAL - Panel Hosting Aplikasi Dishubkominfo - BASS (Banda Aceh <i>Surveillance Sistem</i>) - Sistem Informasi Jadwal Kapal - SIM-PKB PRIVATE - Pas Masuk - E-Angkutan - SIM-PKB Public - SIPERI (Sistem Informasi Penerimaan Retribusi) - SIPELOR (Sistem Informasi Pencatatan Pelaporan Pelanggaran)
8.	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> - SIM-PPID - Layanan Banda Aceh - SAMAN (<i>Statistical Analysis Media and News</i>) - <i>Open Data</i> Banda Aceh - CPanel Hosting Website SKPK - Cpanel Hosting Aplikasi SKPK - Suwarga - AGAM (Aplikasi Agregator Gampong) - INONG (Informasi Nanggroe) - Jempol (Jembatan Informasi Pusat Online)
9.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - SISKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa) - OMSPAN (<i>Online Monitoring Sistem Anggaran Negara</i>)
10.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - E-Pasar
11.	Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - PERIZINAN ONLINE - SIMSATU (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Satu pintu)
12.	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Banda Aceh Tourism (<i>Mobile</i>) - SIAWI (Sentralisasi <i>Database</i> Pariwisata)
13.	Administrasi dan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> - SIMARA (Sistem Informasi Manajemen Rapat) - JUWARA (Jurnalisme Warga Kuta Raja)

No	Sektor	Daftar Aplikasi
	Umum	
14.	Administrasi Legisasi	<ul style="list-style-type: none"> - JDIH
15.	Manajemen Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Pengadaan Secara Elektronik - E-MOPPRID - DIGDOC (<i>Digital Document</i>) - SIMPEL (Sistem Informasi Monitoring dan Pelaporan) - LPM (Sistem Informasi Monitoring dan Pelaporan) - SIPBM (Simstem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) - E-Delegasi
16.	Manajemen Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - E-SP2D - SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) - E-Setor/Guardian Kasda - SIMBADA (Sistem Informasi Barang Daerah) - SIPDA (Sistem Informasi Pajak Daerah) - PBB Online - MI ABANG (<i>Mobile Information</i> Anggaran Banda Aceh Gemilang) - SISMIOP NG (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak <i>Next Generation</i>) - FASTEN - E-lapor Pajak Daerah
17.	Manajemen Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - E-Kinerja - E-Disiplin - SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) - SIP ASN (Sistem Informasi Pelayanan Aparatur Sipil Negara) - Seleksi JPT - KPOBKPP (Kenaikan Pangkat Otomatis) - Sistem Informasi Tata Naskah BKPSDM

Dengan demikian, dari segi infrastruktur digital Kota Banda Aceh sudah siap untuk menyelenggarakan konsep *Smart City*. Hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan interoperabilitas beberapa aplikasi untuk memaksimalkan dan mengefisiensikan pelayanan.

Tabel 2.18 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			baik	Sedang	buruk
1.	Persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G	100%	✓		
2.	Tersedianya jaringan broadband access untuk masyarakat	Ada	✓		
3.	Jumlah lokasi wireless untuk publik	Ada	✓		
4.	Persentase rumah tangga yang terlayani listrik	100%	✓		
5.	Adanya kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis	Ada	✓		
6.	Jumlah kejadian pemadaman listrik setiap bulan (dalam jam)	Jarang	✓		
7.	Jumlah sekolah yang memiliki akses internet	Inisiasi Data	✓		
8.	Jumlah rumah sakit yang menggunakan sistem layanan elektronik/online	Inisiasi Data	✓		

2.2.3 Infrastruktur Sosial

Infrastruktur sosial merupakan fasilitas yang dibangun untuk memudahkan kemudahan keperluan masyarakat umum dalam melakukan aktivitas sosial keseharian mereka. Pemerintah bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur sosial tersebut, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Selain daripada itu, pihak swasta pun turut mengambil peran penting dalam pengadaan dan penyediaan infrastruktur sosial, mengingat ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi 100% kebutuhan bagi warganya. Di Kota Banda Aceh telah terbangun infrastruktur pendidikan dimulai dari TK sebanyak 95 sekolah, SD sebanyak 85 sekolah, SMP sebanyak 32 sekolah, SMA sebanyak 28 sekolah, dan SMK sebanyak 10 sekolah.

Tabel 2.19 Jumlah Fasilitas Pendidikan berdasarkan Kecamatan di Kota Banda Aceh pada Tahun 2017

No	Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA	SMK
1.	Meuraxa	3	9	3	3	0
2.	Jaya Baru	12	8	2	0	1
3.	Banda Raya	9	9	3	4	3
4.	Baiturrahman	12	14	6	5	3

No	Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA	SMK
5.	Lueng Bata	8	4	3	1	0
6.	Kuta Alam	21	14	9	10	3
7.	Kuta Raja	5	6	2	2	0
8.	Syiah Kuala	15	14	3	2	0
9.	Ulee Kareng	10	7	1	1	0
Jumlah		95	85	32	28	10

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Sektor layanan kesehatan, masyarakat ditopang oleh layanan 13 rumah sakit umum/swasta dengan jumlah tempat tidur sebanyak 2.064 *beds*, 11 Puskesmas dan 27 Puskemas Pembantu.

Tabel 2.20 Fasilitas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2017

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit (Umum + Swasta)	13
2.	Rumah Bersalin	7
3.	Puskesmas	11
4.	Puskesmas Pembantu	27
5.	Polindes/Poskesdes	34
6.	Posyandu	113
7.	Klinik/Balai Kesehatan	46
8.	Puskesmas Keliling	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan kota besar dengan luas wilayah yang relatif kecil/sempit sebesar 61,36. Sebagian dari total wilayah Kota Banda Aceh merupakan kawasan yang sudah terbangun dengan perkiraan kawasan terbangun mencapai lebih dari 60%. Saat ini masih sedikit permukiman di Kota Banda Aceh yang memiliki lahan terbuka (lapangan/taman) untuk aktivitas warganya baik dalam hal seni, budaya, pendidikan, maupun olahraga. Penyediaan lapangan olahraga yang tersebar di Kota Banda Aceh dilaksanakan oleh pihak masyarakat secara privat dan terbatas pada sarana olahraga bulu tangkis dan futsal.

Di bidang vokasi dan literasi, Kota Banda Aceh memiliki 1 Perpustakan Daerah dan beberapa perpustakaan yang dikelola di kecamatan.

Tabel 2.21 Perpustakaan Gampong di Kota Banda Aceh, 2017

No	Kecamatan	Jumlah	Desa/Gampong
1.	Meuraxa	3	1. Surien

No	Kecamatan	Jumlah	Desa/Gampong
			2. Deah Glumpang 3. Lambung
2.	Jaya Baru	6	1. Geuceu Meunara 2. Bitai 3. Emperom 4. Lamteumen Barat 5. Lamteumen Timur 6. Punge Blang Cut
3.	Banda Raya	6	1. Lamlagang 2. Geuceu Komplek 3. Geuceu Kayee Jato 4. Lhong Raya 5. Mibo 6. Peunyerat
4.	Baiturrahman	4	1. Neusu Aceh 2. Seutui 3. Ateuk Munjeng 4. Ateuk Pahlawan
5.	Lueng Bata	4	1. Lueng Bata 2. Blang Cut 3. Lamseupeung 4. Panteriek
6.	Kuta Alam	6	1. Beurawe 2. Bandar Baru 3. Lamdingin 4. Lampulo 5. Keuramat 6. Lambaro Skek
7.	Kuta Raja	5	1. Pande 2. Peulanggahan 3. Merduati 4. Lampaseh Kota 5. Keudah
8.	Syiah Kuala	4	1. Lamgugob 2. Ie Masen Kayee Adang 3. Jeulingke 4. Pineung
9.	Ulee Kareng	5	1. Ilie

No	Kecamatan	Jumlah	Desa/Gampong
			2. Pango Raya 3. Ie Masen Ulee Kareng 4. Doy 5. Ceurih
Jumlah	43		

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh

Mengingat selama 12 tahun ketiga *escape building* tidak dimanfaatkan karena memang dibangun khusus menanggulangi bencana, sehingga kesannya menjadi kusam, kurang terawat, dan tidak ada aturan tentang kewenangan pengelolaannya. Hal itulah, akhirnya yang mendasari BPBD untuk memanfaatkan *escape building* itu sebagai pusat komunikasi masyarakat yang akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna dan sedikit banyak akan mendongkrat perekonomian masyarakat Kota Banda Aceh. Namun tanpa menghilangkan fungsi sebagai tempat evakuasi yang harus tetap terpelihara. BPPD berinisiatif menjadikan *escape building* ini lebih bermanfaat dan berdampak kepada masyarakat dengan tetap mengacu pada peraturan Wali Kota tentang kewenangan pemanfaatan gedung *escape building*. Pemanfaatan *escape building* tersebut, rencananya akan menjadi sarana pusat kegiatan masyarakat, meliputi sebagai sarana tempat pesta dan musyawarah masyarakat. Lalu tempat pelatihan dan pendidikan kebencanaan serta tempat edukasi bagi anak sekolah. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai tempat pertemuan dan kajian, dan sarana berolah raga hingga tujuan wisata. BPPD juga merencanakan gedung *escape building* akan digunakan sebagai tempat sarana pasar rakyat dan masih banyak hal yang dapat dimanfaatkan.



Gambar 2.6 *Escape Building* Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh

Dari uraian di atas, Kota Banda Aceh sudah siap menerapkan konsep *Smart City* terkait dengan infrastruktur sosial, baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan juga literasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah dengan memaksimalkan penggunaan infrastruktur tersebut dengan cara aktif mensosialisikannya kepada masyarakat. Kemudian turut serta melakukan *maintenance* secara rutin agar fasilitas tersebut dapat dipakai dalam jangka panjang. Untuk memudahkan melihat kesiapan infrastruktur sosial Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.22 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	sedang	buruk
1.	Adanya pusat kegiatan belajar masyarakat di tingkat kelurahan/desa	Inisiasi Data		✓	
2.	Adanya Ruang Terbuka Publik di tingkat RW	Ada	✓		
3.	Adanya aula/balai warga di tingkat kelurahan/desa	Ada	✓		
4.	Jumlah fasilitas olahraga di tingkat kelurahan/desa	Inisiasi Data		✓	
5.	Ketersediaan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah	Ada	✓		

2.3 Superstruktur

Superstruktur merupakan langkah penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City*.

2.3.1 Kesiapan Kebijakan Daerah

Kebijakan merupakan salah satu aspek yang diperlukan bagi pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan sebuah program pembangunan. Begitu pun dengan inisiatif *Smart City* yang dilaksanakan di daerah, memerlukan seperangkat kebijakan untuk menjamin pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar dan berkelanjutan. Untuk itu, saat ini Wali Kota Banda Aceh telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Banda Aceh nomor 40 tahun 2018 tentang Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selain itu, Wali Kota juga telah membentuk dan menetapkan Dewan *Smart City* Kota Banda Aceh yang tertuang dalam Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 392 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Banda Aceh Nomor 392 Tahun 2019. Target selanjutnya adalah pembuatan kebijakan terkait penyelenggaraan *Smart City* dengan menyesuaikan arah kebijakan Kota Banda Aceh.

Berdasarkan arah kebijakan Kota Banda Aceh tahun 2017-2022, meskipun belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan *Smart City* di Kota Banda Aceh, saat ini penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis TIK diatur mengikuti Buku Perencanaan Induk Pengembangan E-Government Kota Banda Aceh Tahun 2018-2023.

Perangkat aturan tersebut diharapkan mampu menjadi sarana dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis TIK serta mampu mendorong lahirnya aturan tentang penyelenggaraan *Smart City* di Kota Banda Aceh. Saat ini *Masterplan Smart City* dan Peraturan Walikota yang mengatur penyelenggaraan *Smart City* Kota Banda Aceh sedang dalam proses penyusunan oleh Tim Pelaksana *Smart City* Kota Banda Aceh. Kepastian terhadap keberlanjutan program *Smart City* dalam jangka panjang di Kota Banda Aceh tentunya tetap mengacu pada RPJMD Kota Banda Aceh.

Tabel 2.23 Peraturan Wali Kota Banda Aceh yang dapat Dijadikan acuan *Smart City*

Tahun	Nomor	Tentang	Dimensi
2018	13	Sistem Informasi Gampong	<i>Smart Society</i>
2018	17	Pedoman Pemberian Bantuan Paket Persalinan Bagi Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir	<i>Smart Living</i>
2018	24	Mekanisme Pemanfaatan Escape Building di Kota Banda Aceh	<i>Smart Environment</i>
2018	27	Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh	<i>Smart Economy</i>
2018	29	Sistem Satu Data Banda Aceh	<i>Smart Governance</i>
2018	30	Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Tata Ruang Kota Banda Aceh	<i>Smart Living</i>
2018	31	Aplikasi Mobile Informasi Anggaran Banda Aceh Gemilang	<i>Smart Economy</i>
2018	33	Standar Operasional Prosedur Perizinan Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kota Banda Aceh	<i>Smart Branding/Economy</i>
2018	40	Pemerintahan Berbasis teknologi Informasi dan komunikasi	<i>Smart Governance</i>
2018	41	Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita	<i>Smart Living/Economy</i>
2018	46	Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<i>Smart Environment/Society</i>
2018	51	Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Kota Banda Aceh	<i>Smart Society</i>
2018	76	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran	<i>Smart Economy</i>

Tahun	Nomor	Tentang	Dimensi	
		2019		
2018	79	Sistem Informasi Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Banda Aceh	<i>Smart Governance</i>	
2017	7	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat dengan sistem Waste Colecting Point (WCP)	<i>Smart Environment</i>	
2017	10	Akselarasi Perencanaan Pembangunan melalui Aplikasi Perencanaan terpadu E-Musrenbang dan i-ren	<i>Smart Governance/Society</i>	
2017	13	Sistem Monitoring dan pelaporan Kegiatan Pembangunan	<i>Smart Governance</i>	
2017	14	Perencanaan Pembangunan Inklusif	<i>Smart Society</i>	
2017	16	Pembentukan Gampong Siaga Kebakaran Kota Banda Aceh	<i>Smart Society/Living</i>	
2017	26	Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Toko Tradisional dan Toko Swalayan	<i>Smart Economy/Branding</i>	
2017	31	Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik	<i>Smart Governance/Society</i>	
2017	32	Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	<i>Smart Governance</i>	
2016	7	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh	<i>Smart Living</i>	
2016	16	Penyelenggaraan Produk Pangan Halal dan Higienis	<i>Smart Branding/Economy</i>	
2016	17	Penyelenggaraan Wisata Halal	<i>Smart Branding</i>	
2016	18	Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan telekomunikasi	<i>Smart Governance</i>	
2016	19	Program Pengawasan Pengelolaan Keuangan Gampong Berbasis Digitalisasi	<i>Smart Economy</i>	

Dengan beberapa perwali yang ada pada Tabel 2.17 diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun regulasi penyelenggaraan konsep *Smart City* sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah tetap berkelanjutan dan ditampung dalam satu wadah. Dengan demikian pengalokasian anggaran juga lebih mudah dipetakan untuk menentukan prioritas.

Tabel 2.24 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Adanya Peraturan Daerah tentang Dewan <i>Smart City</i> Daerah	Tahap Pembuatan			
2.	Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Tim Pelaksana <i>Smart City</i> Daerah	Tahap Pembuatan		✓	
3.	Adanya masterplan <i>Smart City</i> daerah	Tahap Pembuatan			
4.	Adanya Peraturan Daerah tentang Masterplan <i>Smart City</i> Daerah	N/A			
5.	Adanya visi pembangunan <i>Smart City</i> yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah	Ada	✓		
6.	Adanya kepastian terhadap keberlanjutan program <i>Smart City</i> dalam jangka panjang	Ada	✓		
7.	Adanya mekanisme evaluasi dan apresiasi kinerja terhadap aparatur dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program <i>Smart City</i>	N/A	✓		

Berdasarkan data yang ada pada tabel 2.18, kesiapan Kota Banda Aceh dari segi suprastruktur sudah sangat baik dengan adanya regulasi pembentukan tim dewan dan tim pelaksana *Smart City*. Namun hal yang masih kurang adalah jaminan keberlanjutan konsep *Smart City*. Tentu perlu dibuatkan *master plan* atau rencana induk sebagai dasar pengembangan *Smart City* sekaligus untuk menjamin keberlanjutan program *Smart City* ke depan.

2.3.2 Kesiapan Lembaga Daerah

Kelembagaan daerah merupakan perangkat non-fisik selanjutnya setelah kebijakan yang sangat menentukan keberlanjutan pelaksanaan *Smart City* di daerah dari sisi pengelola kota, yaitu pemerintah daerah. Pemerintah Kota pada tahun 2018 telah membentuk lembaga khusus Komite Pengarah TIK Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan SK nomor 221 Tahun 2018 dan juga pada tahun 2019 membentuk khusus yang berperan secara kelembagaan dalam *Smart City* sesuai Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 393 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Dan Keputusan Wali Kota nomor 392 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Banda Aceh Tahun 2019.

Setiap perangkat daerah terlibat dalam Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* yang dilengkapi dengan kewenangan tugas/fungsi sebagai berikut:

- Dewan *Smart City*:

- ✓ Memberikan arahan strategis pengembangan *Smart City* sesuai dengan visi, misi dan perkembangan kebutuhan.
 - ✓ Memberikan persetujuan dan dukungan bagi usulan kebijakan, rencana induk *Smart City*, rencana kerja dan inisiatif pengembangan *Smart City*.
 - ✓ Melakukan *Monitoring* dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan dan implementasi *Smart City*.
- b. Tim Pelaksana *Smart City*:
- ✓ Memberikan usulan program dan kegiatan pembangunan *Smart City* dalam sektor tertentu maupun lintas sektor.
 - ✓ Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan *Smart City* dalam sektor tertentu maupun lintas sektor secara terkoordinasi melalui kajian kebutuhan, perencanaan, perancangan, pembangunan, implementasi, monitoring dan evaluasi.
 - ✓ Menindaklanjuti arahan dewan *Smart City*.
 - ✓ Merumuskan inisiatif inovasi terkait *Smart City* di berbagai sektor/perangkat daerah dan mengusulkan kepada dewan *Smart City* untuk arahan dan persetujuan.
 - ✓ Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan dan implementasi *Smart City* secara terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektor (lintas perangkat daerah).
 - ✓ Melaporkan hasil kegiatan perencanaan, pengembangan dan implementasi *Smart City* kepada dewan *Smart City*.
 - ✓ Memfasilitasi forum-forum dan bentuk program lain yang mewadahi partisipasi pelaku usaha, komunitas dan masyarakat luas.
 - ✓ Melakukan koordinasi kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan *Smart City*.
 - ✓ Membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pengembangan *Smart City*.

Tabel 2.25 Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	sedang	buruk
1.	Adanya Dewan <i>Smart City</i> Daerah	Ada	✓		
2.	Adanya Tim Pelaksana <i>Smart City</i> Daerah	Ada	✓		
3.	Adanya SOP <i>Smart City</i> daerah	N/A			
4.	Adanya tata pamong yang bertugas sebagai anggota Tim Pelaksana <i>Smart City</i> di setiap OPD	Ada	✓		

Dengan dibentuknya Dewan *Smart City* yang terdiri dari berbagai elemen baik pemerintahan, akademisi, swasta dan masyarakat Kota Banda Aceh telah memiliki cikal bakal pembentukan forum *Smart City* agar pelaksanaannya berkelanjutan dan timbul semangat ingin memajukan Kota Banda Aceh. Namun perlu adanya penyusunan SOP *Smart City* agar program tersebut terus berjalan dan terpantau. SOP dengan sendirinya akan menggerakkan semua elemen untuk melakukan tugasnya terhadap program *Smart City* yang akan dibangun. Bila perlu dibuatkan tim khusus dengan tupoksi khusus untuk menjalankan program *Smart City*.

2.3.3 Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

Disamping aspek kebijakan dan kelembagaan, terdapat satu aspek non-fisik selanjutnya yang akan menjadi penentu dari keberlanjutan *Smart City* di daerah. Aspek tersebut adalah aspek organisasi di masyarakat sipil. Aspek ini menjadi salah satu aspek dalam kesiapan *Smart City* karena di dalam sebuah *Smart City*, aspek partisipasi masyarakat yang digerakkan di dalam organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu inti dari *Smart City*.

Di Kota Banda Aceh terdapat beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Dari beberapa perguruan tinggi tersebut, perguruan tinggi UNSYIAH, memiliki lembaga pengabdian masyarakat dan telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh serta dilibatkan dalam tim pelaksana *Smart City* Kota Banda Aceh. Selain itu, adanya forum-forum swadaya masyarakat yang tergabung dalam komunitas-komunitas hobi dan profesi secara nyata telah mendorong *Smart City* ke arah tatanan implementatif.

Tabel 2.26 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	sedang	buruk
1.	Adanya lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi di daerah	Ada	✓		
2.	Adanya forum-forum swadaya masyarakat pendukung <i>Smart City</i>	Ada	✓		
3.	Jumlah forum swadaya masyarakat pendukung <i>Smart City</i>	Ada	✓		
4.	Dukungan operasional pemerintah terhadap forum pendukung <i>Smart City</i>	Ada	✓		
5.	Jumlah forum pendukung <i>Smart City</i> yang memiliki sekretariat definitif	Ada	✓		
6.	Adanya partisipasi pakar dari perguruan tinggi lokal dalam Dewan <i>Smart City</i> Daerah	Ada	✓		

3. Analisis Kesenjangan

3.1 Analisis Kesenjangan *Smart Governance*

A. Analisis SWOT

Tabel 3.1 Analisis SWOT Dimensi *Smart Governance*

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	Kekuatan	Kelemahan
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Komitmen Kepala daerah terhadap <i>Smart City</i>2. Adanya Keputusan Walikota mengenai Dewan <i>Smart City</i>3. Adanya Keputusan Walikota mengenai Pelaksanaan <i>Smart City</i>4. Jumlah APIP yang memadai untuk melakukan pengawasan5. Terkait erat dengan RPJMD Kota Banda Aceh misi V (Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik) yang memiliki sasaran: Sasaran 1 : Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi Sasaran 2 : Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan yang baik Sasaran 3 : Meningkatnya Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)6. Adanya Rencana Induk TIK Pemerintah Kota Banda Aceh 2019-2023 yang sesuai dengan amanat SPBE	<ol style="list-style-type: none">1. Masih kurangnya SDM IT yang sesuai dengan spesifik keahlian dan banyak tenaga ahli berstatus pegawai tidak tetap2. Sosialisasi internal dan eksternal pemerintah terkait dengan <i>Smart City</i> masih kurang3. Beberapa layanan aplikasi yang belum terintegrasi.4. Kurangnya infrastruktur pendukung (sensor, akses internet, bandwidth) dalam mendukung konsep Banda Aceh <i>Smart City</i>5. Belum adanya SOP tentang keamanan sistem. Perlu adanya ISO 27001 certificate dan SNI tentang keamanan data.6. Rendahnya koordinasi antar SKPK dengan provinsi dan Pusat7. Pengambilan kebijakan belum berbasis data baik eksekutif maupun legislatif.
Faktor Eksternal		

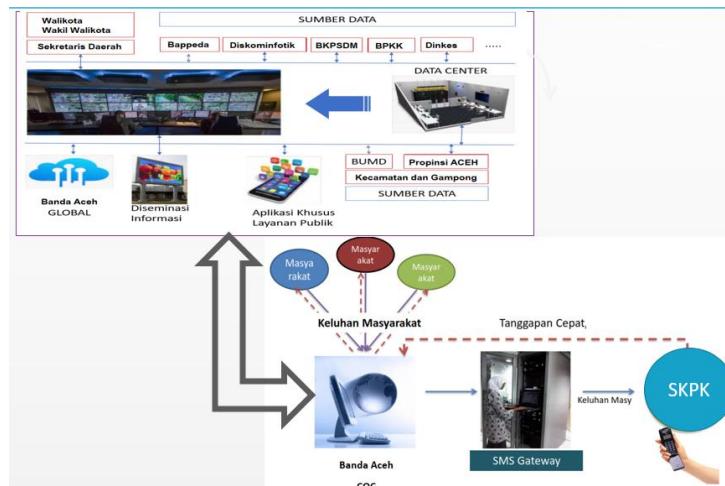
Peluang	Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan infrastruktur di antaranya infrastruktur fisik, digital dan sosial. 2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang layanan aplikasi E-government. 3. Adanya kesempatan merekrut tenaga ahli non PNS 4. Adanya kesempatan membuat forum <i>Smart City</i> 5. Adanya Rencana Induk SPBE Nasional yang dapat digunakan sebagai produk hukum dalam hal pengintegrasian layanan elektronik pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan dan pembangunan infrastruktur fisik, digital dan sosial termasuk didalamnya City Operation Center 2. Pelaksanaan sosialisasi seluruh layanan aplikasi publik kepada seluruh masyarakat, melalui media-media dan official websites. 3. Perekrutan tenaga ahli non PNS sesuai spesialisasi keahlian yang dibutuhkan 4. Pembentukan Forum <i>Smart City</i> 5. Mensosialisasikan Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Capacity Building bagi seluruh staf yang beririsan dengan program <i>Smart City</i> Banda Aceh 2. Pelaksanaan sosialisasi smartcity ke OPD-OPD dalam Pemerintahan Banda Aceh 3. Pendataan seluruh layanan aplikasi dan pelaksanaan integrasinya 4. Penyusunan langkah-langkah strategis untuk mendapatkan ISO 27001 dan SNI tentang keamanan Data 5. Pembuatan sistem untuk memudahkan koordinasi antar SKPK dan dengan Provinsi serta pusat 6. Penguatan sistem satu data
Ancaman <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM untuk jangka waktu yang lama (SDM bidang TIK rata-rata berstatus kontrak). 2. Adanya peluang penyalahgunaan hak akses data oleh penjahat siber karena belum adanya sensor/IDS/IPS untuk mendeteksi ancaman terhadap sistem. 3. Adanya gangguan virus/malware karena belum adanya anggaran dalam pembaharuan license antivirus. 4. Pergantian kepala daerah menyulitkan dalam hal penganggaran program 	Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan perjanjian kerja jangka panjang terhadap pegawai tidak tetap pemerintah diatas 24 (dua puluh empat) bulan. 2. Penerapan keamanan sistem dengan mengimplementasikan sesuai regulasi yang dituangkan oleh BSSN yang termuat dalam Rencana Induk TIK Banda Aceh 2019-2023 3. Memasang sistem sensor ataupun firewall di jalur keluar dan masuk paket data, menerapkan IDS dan IPS sistem dan melaksanakan kerja sama dengan Perusahaan 	Strategi mengurangi kelemahan untuk mengatasi ancaman <ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan anggaran di bidang TIK terkait SPBE. 2. Meningkatkan critical thinking, collaborative, communication dan creative APN dan masyarakat 3. Pelaksanaan capacity building APN yang menangani keamanan jaringan 4. Menyusun anggaran <i>Smart City</i> berdasarkan RPJMD untuk memungkinkan dalam hal penganggaran

	<p>Antivirus.</p> <p>4. Memasukan program <i>Smart City</i> dalam rencana pembangunan jangka panjang Pemerintah Banda Aceh.</p>	
--	---	--

B. Program Inovasi *Smart Governance*

Berdasarkan analisis daripada kondisi masa depan, SWOT, dan kondisi kesiapan daerah, terkait dengan *Smart governance* sebuah inovasi terkait dengan sistem pengolahan data dipilih untuk menjadi salah satu program yang ingin disukseskan. Program tersebut diberi nama **City Operation Center Pemko Banda Aceh**.

Program ini dibuat dilatar belakangi oleh belum adanya sistem informasi “Satu data”, SIE dan DSS untuk pengambilan kebijakan berdasarkan data yang ada. Jadi diperlukan pengintegrasian seluruh data dan layanan yang ada dan terkoneksi dengan beberapa sensor dan surveiliants yang ada.



Gambar 3.1 Sistem Perencanaan City Operation Center

Untuk status awal saat ini, Kota Banda Aceh sudah memiliki banyak layanan aplikasi di SKPK. Oleh karena itu, dengan adanya sistem satu data ini diharapkan semua data tersebut dapat dikumpulkan di satu tempat dan bisa dikelola dengan lebih baik. Saat ini, *City Operation Center* (COC) yang terdapat di Kota Banda Aceh hanya digunakan untuk memonitor CCTV di beberapa area.

Pemanfaatan daripada COC tentu dapat memberikan banyak manfaat kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Dimana dengan adanya *open public* data yang realtime dapat membantu

pemerintah dalam membuat kebijakan berbasis data, selain daripada itu, dari jalur akademisi dan dunia usaha dapat mengambil data dan melakukan penelitian terkait dengan data yang dimiliki. Sehingga kedepannya tedapat kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, pihak akademisi, masyarakat dan para wirausaha.

Potensi pengembangan COC ini sendiri dapat dilakukan dengan cara:

- Penambahan sensor-sensor yang dibutuhkan terkait keamanan, bencana alam dan lain-lain.
- Pengembangan sistem menggunakan *Analytic Big Data* dan *Machine Learning*
- Integrasi dengan SAMAN (*Statistic Analysis Media and News*) untuk menuju *action plan* solusi dari permasalahan
- Sistem energi terbarukan

Agar hal ini bisa terwujudkan, Pemerintah Kota Banda Aceh harus dapat mengatasi beberapa faktor resiko terkait dengan sistem kelistrikan yang mitigasinya dengan penggunaan Rectifier ataupun energi listrik terbarukan dan juga memiliki resiko yang erat berhubungan dengan keamanan jika kendali berpindah tangan ke pihak lain yang tidak bertanggung jawab mitigasinya *Security Operation Center* dan Gangguan bencana alam mitigasinya DRC (*mirroring* ke luar daerah). Untuk menjaga keberlangsungan daripada program ini, maka perlu dilakukan *Capacity Building* bagi SDM yang terlibat dan perawatan terhadap perangkat yang sudah dimiliki.

3.2 Analisis Kesenjangan *Smart Branding*

A. Analisis SWOT

Tabel 3.2 Analisis SWOT Dimensi *Smart Branding*

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none">1. Banda Aceh memiliki keunikan dan keindahan objek wisata;2. Kondisi nyaman dan aman yang berlandaskan syariah;3. Adanya imbauan penggunaan Batik Aceh di hari Jumat sebagai pelestarian kebudayaan dan sekaligus promosi warisan	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya pengembangan objek wisata dan branding daerah;2. Kurangnya regulasi dan sarana prasarana yang mendukung branding daerah dan pariwisata;3. Belum tersosialisasikannya qanun syariah secara merata kepada masyarakat dan

Faktor Eksternal	budaya	pendatang baru/turis untuk mendukung dan menjaga tata wajah Kota Banda Aceh
	<p>4. Banda Aceh dikenal sebagai Kota 1001 Warkop (Warung Kopi) walaupun bukan penghasil komoditas kopi</p> <p>5. Beberapa kali mendapat predikat kota bersih dari adipura provinsi</p> <p>6. Adanya Program Zikir akbar dan Tausyiah yang rutin dilakukan di Pendopo Walikota</p> <p>7. Kawasan strategis dan destinasi yang memiliki akses yang mudah;</p> <p>8. Mempunyai situs/destinasi unik dan berkelas dunia dan menyokong dua daerah sekitar yang memiliki Destinasi Alam yang juga menarik dan unik, dikenal dengan BASAJAN (e.g. Banda Aceh – Sabang – Jantho) dengan wisata religi, wisata tamaddun dunia melayu, wisata kuliner, wisata edukasi tsunami, ecowisata</p> <p>9. Ada pelaku usaha lokal yang memproduksi barang-barang dan makanan ciri khas Aceh;</p>	<p>4. Kurangnya inovasi, atraksi dan event pendamping serta promosi pariwisata</p> <p>5. Kurangnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung branding dan industri pariwisata;</p> <p>6. Kurangnya perawatan terhadap objek wisata dan fasilitas yang sudah ada;</p> <p>7. Kurangnya pemanfaatan alam untuk destinasi wisata seperti pariwisata Air</p> <p>8. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap industri wisata;</p> <p>9. Kurangnya sosialisasi kepada <i>stakeholder</i> pariwisata;</p> <p>10. Kurangnya fasilitas yang ramah kaum disabilitas.</p> <p>11. Belum adanya layanan sistem dan aplikasi yang bisa mempromosikan produk-produk lokal</p>

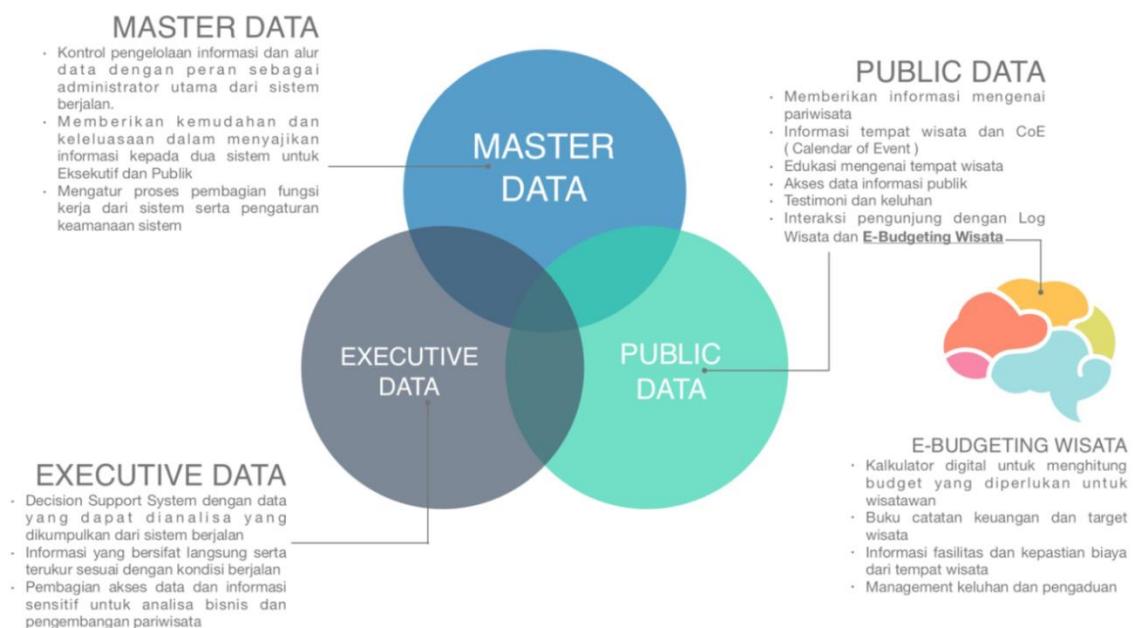
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah menjadikan kota Banda Aceh sebagai destination wisata syariah dan kebencanaan (Tsunami); 2. Termasuk kawasan pengelolaan ekonomi mandiri di daerah support Kota Banda Aceh yaitu Sabang yang memiliki kontrol setingkat Badan Ekonomi (e.g. BPKS) sehingga Terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar; 3. Peningkatan feedback finansial bagi pebisnis lokal (akomodasi transportasi, souvenir, pemandu wisata, restoran); 4. Adanya peluang untuk memasarkan produk khas aceh 	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan literasi secara verbal dan digital untuk mendukung promosi dan branding daerah 2. Penataan penanda,marka dan rambu kota untuk mendukung penataan wajah kota yang lebih menarik 3. Peningkatan kerja sama dengan daerah satelit sekitar Kota Banda Aceh untuk mendukung sektor wisata 4. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah dengan mengimplementasikan TIK 5. Pengembangan sistem terpadu feedback financial yang dapat menarik kerja sama dengan berbagai <i>stakeholder</i> 6. Penggelaran event pasar murah yang menjual produk ciri khas aceh 	<p>Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur penanda wisata dan informasi yang unik dan dikolaborasikan dengan TIK 2. Penerapan big data analytic untuk DSS untuk Pariwisata terpadu 3. Pendataan dan pelaksanaan Bimbingan teknis terhadap pelaku pariwisata 4. Pembuatan sistem pariwisata mulai dari budget wisata sampai pemasaran produk-produk khas Aceh 5. Pemanfaatan produk daerah untuk dijadikan branding daerah dan memanfaatkan digital marketing dan media-media
<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya wisata yang bertentangan dengan syariah Islam; 2. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya keberadaan sebuah objek wisata; 3. Degradasi moral/budaya; 4. Beralihnya wisatawan ke luar destinasi Aceh, contoh adanya pulau dengan nama sama yaitu “Sabang Island” 	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan mengimplementasikan teknologi informasi dalam promosi dakwah 2. Pelaksanaan koordinasi rutin dengan seluruh <i>stakeholder</i> pariwisata yang bisa di monitor dengan sebuah sistem 3. Penyusunan SOP cara pengawasan dan pemberian peringatan terhadap yang 	<p>Strategi mengurangi kelemahan untuk mengatasi ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat regulasi dan rencana induk tentang pariwisata 2. Perbaikan tempat wisata agar lebih menarik dan memperbanyak tempat wisata baik bersifat heritage ataupun tempat wisata yang artificial 3. Menciptakan event peningkatan kualitas dan kesesuaian mentalitas syariah bagi pelaku wisata secara tahunan

5. Berkurangnya kepercayaan kepada <i>stakeholder</i> pariwisata	<p>melanggar serta sanksi yang akan dijatuhkan.</p> <p>4. Pemasaran Potensi Inventasi Ke Negara Tetangga</p>	
--	--	--

B. Program Inovasi *Smart Branding*

Berdasarkan analisis daripada kondisi masa depan, SWOT, dan kondisi kesiapan daerah, terkait dengan *Smart branding* sebuah inovasi terkait dengan sistem pengolahan Big Data Pariwisata dan Digital Marketing yang efektif maka dipilih untuk menjadi salah satu program yang ingin disukseskan. Program tersebut diberi nama ***Decision Support System Wisata dan E-budgeting Wisata***.

Sistem yang dibuat ini adalah bertujuan untuk mengambil data yang memaksimalkan fungsi data dalam pengambilan strategi wisata. Dan E-Budgeting sendiri adalah sebuah sistem yang digunakan oleh wisatawan untuk menghitung berapa beban yang diperlukan sebelum datang ke tempat wisata. Terdapat 4 macam sistem data yang berjalan yaitu Public Data Board, Executive Data Board, Master Data dan E-Budgeting Wisata.



Gambar 3.2 Skema Sistem DSS Wisata dan E-Budgeting Wisata

Terdapat portal data dan e-budgeting yang bisa dimanfaatkan masyarakat atau wisatawan untuk informasi dan branding daerah. Terdapat juga *Executive* data yang bisa dimanfaatkan

untuk pengambil kebijakan atau bahkan pelaku bisnis sebelum mengambil sebuah keputusan atau menempatkan aset investasi. E-budgeting wisata dipergunakan baik oleh wisatawan, masyarakat atau siapa saja yang berkeinginan berkunjung ke suatu daerah dapat menghitung terlebih dahulu kebutuhan dana yang diperlukan sebelum datang ke Banda Aceh. Manfaat untuk pemerintah atau pelaku bisnis di Banda Aceh adalah mendapatkan data serapan mengenai berapa kemungkinan perputaran uang dari sektor pariwisata sehingga dapat juga dibentuk *event* yang efektif ditahun anggaran berikutnya

E-BUDGETING WISATA



Gambar 3.3 Skema Sistem DSS Wisata dan E-Budgeting Wisata

Untuk mendukung *Smart branding* kota Banda Aceh, pengelolaan data adalah salah satu kunci yang harus dimaksimalkan dan dari pengelolaan data maka dapat membuat iklan atau branding daerah yang memang diarahkan ke personal sehingga lebih menarik dan efektif.

3.3 Analisis Kesenjangan *Smart Economy*

A. Analisis SWOT

Tabel 3.3 Analisis SWOT Dimensi *Smart Economy*

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	Kekuatan <ol style="list-style-type: none"> Ekonomi masuk dalam Visi Pemerintah Kota Banda Aceh 	Kelemahan <ol style="list-style-type: none"> Kurangnya pengetahuan kewirausahaan dan kurangnya

Faktor Eksternal	<p>“Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah”. Gemilang dibuat dalam 3 pilar yaitu agama, ekonomi dan pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penguatan Ekonomi kerakyatan termasuk dalam prioritas dalam proses mengatasi kemiskinan tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh 2017-2022. 3. Adanya kawasan usaha makanan dan minuman serta usaha jasa yang menyebar di seluruh kecamatan di Kota Banda Aceh 4. Adanya UMKM yang bersebar di seluruh kecamatan di Banda Aceh, berdasarkan Data Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh tahun 2017 bahwa sampai tahun 2016 berjumlah 9.429 UMKM 5. Adanya program One Village One Product (OVOP) dari Pemerintah. Hasil survey dari Pusat Ekonomi Kreatif Unsyiah terhadap 90 Gampong pada tahun 2016 ada 36 produk yang menjadi prioritas produk OVOP dari 435 produk hasil survey. 6. peningkatan kinerja perekonomian tahun 2016 mencapai 6,31%. 7. Adanya peningkatan jumlah koperasi aktif dari 2012 sampai 2016 8. Adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga 	<p>kreativitas, kemampuan teknologi, inovasi, sistem produksi dan penguatan sentra industri yang kurang mendukung untuk tumbuh kembangnya pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengelolaan keuangan gampong belum maksimal 3. Ketersediaan bahan baku industri lokal masih belum terdata 4. Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat belum maksimal 5. Belum adanya pengembangan model GIS dan IoT untuk industri 6. UKM/IKM perkembangannya belum optimal karena kekurangan modal dan tidak bagusnya pembukuan akuntansi dan manajemen 7. Rendahnya minat <i>entrepreneurship</i> 8. Lapangan pekerjaan yang kurang variatif 9. Belum adanya integrasi data antar lembaga penyalur bantuan warga terkait pemerataan bantuan untuk golongan warga miskin, dhuafa, dan anak yatim 10. Harga barang yang kurang stabil 11. Konversi dari koperasi konvensional ke Syariah belum berjalan 12. simpan pinjam dan perkreditan masih banyak menggunakan sistem bunga ribawi. 13. Masyarakat banyak belum tahu sistem pembiayaan-pembiayaan

	<p>Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), Keberadaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Gampong (ADG), pemodalannya bagi usaha mikro dengan PUEM (Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat) Al Qardhul Hasan (pinjaman tanpa bunga) sejak tahun 2015 dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh</p> <p>9. Surat Keputusan hasil Mudzakarah Ulama MPU Kota Banda Aceh tahun 2012 dengan tema " Melalui Mudzakarah Ulama Kita Berdayakan Ekonomi Umat Yang Berbasis Syariah."</p>	<p>yang ada dan di dukung oleh pemerintah kota</p> <p>14. Belum berkembangnya sistem pembayaran cashless</p> <p>15. Manajemen pengumpulan zakat belum maksimal</p> <p>16. Rendahnya pendekatan pembangunan ekonomi yang dimulai dari gampong</p>
Peluang	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</p> <p>1. Peluang dan pangsa pasar yang dijanjikan oleh ekonomi kreatif masih terbuka lebar</p> <p>2. Industri kreatif sarat kandungan emosional yang mendorong perkembangan industri ini menjadi unggulan.</p> <p>3. Pembiayaan konversi koperasi konvensional ke Syariah oleh Pemerintah Provinsi</p>	<p>Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p> <p>1. Peningkatan pembangunan ekonomi kreatif</p> <p>2. Penguatan pelaksanaan program OVOP</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi tentang konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah</p>
Ancaman	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p> <p>1. Keberadaan pasar modern yang dianggap lebih menguntungkan konsumen menjadi ancaman bagi pedagang kecil terutama pedagang tradisional</p> <p>2. Produksi Barang/makanan hasil</p>	<p>Strategi mengurangi kelemahan untuk mengatasi ancaman</p> <p>1. Pengintegrasian layanan UKM dan IKM dengan koperasi syariah, dan <i>market place local</i></p> <p>2. Pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat tentang</p>

<p>dari UKM/IKM yang expired karena daya beli masyarakat rendah</p> <p>3. Masih banyak praktik rentenir dan riba yang jelas berlawanan dengan prinsip syariah sebagaimana diamanahkan dalam Qanun Pasal 21 Qanun 8 Tahun 2014. Kondisi simpan pinjam dan perkreditan masih banyak menggunakan sistem bunga ribawi.</p>	<p>pembiayaan syariah yang didukung oleh pemerintah kota</p> <p>3. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak</p>	<p>keuangan syariah.</p> <p>3. Peningkatan jumlah investor yang dapat membantu program peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>4. Pengembangan sentra industri dengan pemetaan terhadap potensi Industri</p> <p>5. Peningkatan peran UKM/IKM dan penataan pedagang kaki lima.</p>
--	--	--

B. Program Inovasi *Smart Economy*

Smart Economy merupakan salah satu sumbu dalam perancangan *Smart City* untuk Kota Banda Aceh. *Smart Economy* dapat diartikan sebagai pemanfaatan Teknologi Informasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi secara efektif dan efisien yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Banda Aceh dapat diklasifikasi dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu: pertama, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pendistribusian manfaat pertumbuhan ekonomi yang belum merata; kedua, pembangunan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam, dan; ketiga, penuntasan masalah pembangunan ekonomi, seperti keterbatasan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, kemiskinan, pengangguran, serta ketersediaan lapangan kerja.

Stabilitas ekonomi merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*). Perkembangan situasi stabilitas ekonomi saat ini tidak terlepas peran dari indikator makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan nilai tukar mata uang asing. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh secara sektoral memperlihatkan sektor-sektor unggulan seperti: sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Kemudian untuk laju inflasi di Kota Banda Aceh hampir selalu berada di bawah Provinsi Aceh dan Nasional.

Berikut ini adalah beberapa sektor yang menjadi perhatian pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan *Smart Economy*.

a) Industri: Penataan industri primer, sekunder dan tersier

Penerapan TIK untuk mendukung terciptanya *Smart economy* di bidang industri sangat dipengaruhi oleh ketersediaan informasi. Informasi yang diperlukan sebelum merencanakan

konsep *Smart economy* adalah penyebaran kawasan dan jenis industri di Banda Aceh. Berikut adalah informasi penyebaran industri makanan dan minuman serta industri jasa di Banda Aceh berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 3.4 Informasi Penyebaran Industri Makanan dan Minuman di Banda Aceh

No	Kecamatan	Limun	Sirup	Tebu	Bubuk Kopi	Tempe	Tebu	Kerupuk	Roti	Lainnya
1	Meuraxa	-	2	1	-	1	1	4	2	33
2	Jaya Baru	-	-	-	5	7	2	1	-	33
3	Banda Raya	-	-	-	-	4	4	8	2	29
4	Baiturrahman	1	1	-	1	4	4	4	2	21
5	Lueng Bata	1	1	-	-	-	2	6	4	73
6	Kuta Alam	4	4	-	1	4	4	2	27	63
7	Kuta Raja	-	-	-	1	4	2	-	-	17
8	Syiah Kuala	-	-	1	2	-	-	2	1	38
9	Ulee Kareng	-	-	-	5	2	2	15	1	25
Jumlah		6	6	1	15	25	20	42	39	332

Tabel 3.5 Informasi Penyebaran Industri Jasa di Banda Aceh

No	Kecamatan	Reparasi Sepeda	Reparasi Sepeda Motor	Tambal Ban	Reparasi Mobil	Percetakan	Reparasi Alat-alat Elektronik	Tukang Las	Tukang Mas
1	Meuraxa	2	3	3	3	14	-	17	-
2	Jaya Baru	-	-	-	-	7	-	9	-
3	Banda Raya	1	6	1	6	9	7	18	-
4	Baiturrahman	1	18	2	12	43	2	9	20
5	Lueng Bata	-	8	1	13	13	4	24	-
6	Kuta Alam	2	19	4	20	58	5	17	3
7	Kuta Raja	-	3	3	-	12	6	21	-
8	Syiah Kuala	2	13	2	5	38	4	12	-
9	Ulee Kareng	2	6	3	1	14	1	8	2
Jumlah		10	49	19	60	208	29	135	25

Tabel 3.6 Sambungan Tabel Informasi Penyebaran Industri Jasa di Banda Aceh

No	Kecamatan	Tukang Gigi	Reparasi Jam	Salon/ Rias Pengantin	Fotocopy	Reparasi Kaca mata	Reparasi Dinamo	Reparasi Radiator
1	Meuraxa	3	2	3	17	-	-	-
2	Jaya Baru	1	-	3	2	-	-	-
3	Banda Raya	2	-	4	18	-	-	-
4	Baiturrahman	2	5	18	49	10	3	2
5	Lueng Bata	2	1	9	24	1	1	1
6	Kuta Alam	3	1	41	38	10	2	2

No	Kecamatan	Tukang Gigi	Reparasi Jam	Salon/ Rias Pengantin	Fotocopy	Reparasi Kaca mata	Reparasi Dinamo	Reparasi Radiator
7	Kuta Raja	3	-	9	6	2	2	2
8	Syiah Kuala	-	-	5	20	-	-	-
9	Ulee Kareng	-	1	6	7	-	1	-
Jumlah		16	10	98	181	23	9	7

Tabel 3.7 Sambungan Tabel Informasi Penyebaran Industri Jasa di Banda Aceh

No	Kecamatan	Reparasi Jok	Batu Bata	Batako	Perabot/Kusen/ Mebeler
1	Meuraxa	-	-	-	15
2	Jaya Baru	-	-	-	12
3	Banda Raya	-	-	-	23
4	Baiturrahman	3	4	3	33
5	Lueng Bata	2	1	1	25
6	Kuta Alam	2	-	3	25
7	Kuta Raja	-	-	-	10
8	Syiah Kuala	-	-	1	23
9	Ulee Kareng	-	15	2	33
Jumlah		7	20	10	199

Tabel 3.8 Tinjauan Perekonomian Kota Banda Aceh

No	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	117403,2	1,01	126329,3	1,01	135264,6	0,99	142201,5	0,96	154320,8	0,98
2	Pertambangan dan Penggalian	0,0		0,0		0,0		0,0		0	0
3	Industri Pengolahan	242273,7	2,09	262640,8	2,09	283696,6	2,08	299660,1	2,03	317841,2	2,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	32100,0	0,28	32502,3	0,26	35781,5	0,26	36657,9	0,25	47.729,5	0,30
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9161,2	0,08	10440,7	0,08	11639,5	0,09	13898,8	0,09	18900,1	0,12
6	Konstruksi	934143,9	8,07	958082,6	7,62	960238,1	7,04	1103743,6	7,49	1579485,3	10
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2619273,1	22,63	2827199,8	22,50	3059382,8	22,42	3223290,0	21,86	3375398,8	21,36
8	Transportasi dan Pergudangan	1833820,2	15,84	1948671,9	15,51	2072370,4	15,18	2116684,7	14,36	1783937,7	11,29
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	285854,9	2,47	331148,8	2,63	382551,5	2,80	432808,4	2,94	538249,8	3,41
10	Informasi dan Komunikasi	900348,5	7,78	942579,2	7,50	999810,2	7,33	1073443,1	7,28	957384,4	6,06
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	328004,7	2,83	389608,8	3,10	395006,6	2,89	423800,0	2,87	459951,1	2,91
12	Real Estate	608221,2	5,26	700447,4	5,57	830077,6	6,08	970979,0	6,59	1081187,3	6,84
13	Jasa Perusahaan	260880,5	2,25	288493,0	2,30	321106,6	2,35	338943,9	2,30	373078,6	2,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2225309,3	19,23	2456331,4	19,54	2730681,1	20,01	3001088,0	20,36	3332436,1	21,09
15	Jasa Pendidikan	606128,9	5,24	659443,4	5,25	715857,0	5,25	777814,8	5,28	922468,1	5,84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	387603,7	3,35	432781,4	3,44	488777,1	3,58	540726,2	3,67	580124,4	3,67
17	Jasa lainnya	183399,6	1,58	201303,2	1,60	205760,1	1,65	246129,5	1,67	279334	1,77
	PDRB	11079680,2	100	1511597228,5	100	12119047,3	100	12725924,1	100	15.801.791,3	100

Sumber: Tinjauan Perekonomian Kota Banda Aceh 2016

Berdasarkan tabel penyebaran jenis industri makanan dan minuman serta industri jasa di Kota Banda Aceh, berikut beberapa perencanaan/strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai *Smart economy* di Kota Banda Aceh.

1. Pengembangan sistem informasi E-commerce untuk industri.
2. Pengembangan sistem informasi E-Halal certified. Sistem informasi tersebut berguna untuk badan usaha yang ingin mengurus sertifikat halal secara mandiri dan online. Sistem tersebut juga menyediakan informasi kepada masyarakat tentang perusahaan yang berlabel halal.
3. Pengembangan sistem informasi perizinan industri. Sistem informasi ini akan memuat informasi tentang tahapan mengurus perizinan industri secara online dengan proses verifikasi yang cepat.
4. Pengembangan sistem informasi e-investor untuk kawasan industri. Sistem informasi tersebut akan menampilkan proposal atau ide untuk jenis tanaman yang akan ditanam di sebuah kawasan sehingga nantinya para investor bisa mendapatkan informasi sebelum berinvestasi (lihat: <https://igrow.asia/>)
5. Membangun kerja sama dengan retail online di tingkat nasional seperti: (i) BukaLapak; (ii) Tokopedia; (iii) Shopee; dan (iv) Blibli maupun international seperti: (i) AliExpress; dan (ii) Ebay.
6. Komponen Membangun ekonomi industri yang berdaya saing (industri) dengan membangun daya saing industri daerah pada sektor industri unggulan yang terintegrasi antara industri primer (perikanan) dan (pertanian, kehutanan) dari kabupaten tetangga dengan industri sekunder pengepakan, branding dan lain- lain

dan terelasi juga dengan sektor jasa (tersier) yang dapat membuka peluang kerja baru dari integrasi antar tipe industri tersebut.

7. Pengembangan model GIS dan IoT untuk industri.

b) *Welfare*: peningkatan kesejahteraan masyarakat

Welfare atau kesejahteraan suatu negara dapat ditinjau apabila masyarakatnya memiliki penghasilan, kekayaan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Untuk mencapai kesejahteraan yang layak serta terwujudnya *Smart economy* di Kota Banda Aceh berdasarkan analisis SWOT diatas, berikut beberapa langkah yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

1. Pembekalan skill di segala bidang minat untuk lulusan SMA dan Sarjana sederajat seperti: (I) IT/Komputer; (ii) Usaha Kreatif dan lain sebagainya sehingga nantinya masyarakat mampu bekerja menggunakan skill yang ada.
2. Pengembangan sistem informasi lowongan kerja (e-loker) yang dapat dimanfaatkan oleh pencari pekerjaan dan pemberi perkerjaan.
3. Pengembangan sistem informasi perbaikan rumah dhuafa. Sistem informasi tersebut berguna untuk mengumpulkan informasi tentang rumah dhuafa yang layak dibangun. Masyarakat bisa meng-upload kondisi rumah atau biodata dhuafa sehingga nantinya akan melalui verifikasi tidak lebih dari 2 minggu sampai berkas disetujui.
4. Melaksanakan program peningkatan penyerapan tenaga kerja (untuk mengatasi pengangguran yg cukup tinggi) dengan menghidupkan usaha-usaha kreatif seperti program OVOP di gampong-gampong dengan dukungan AD/ADG dan juga dengan peningkatan keahlian dan bantuan *tools* seperti yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2018 yaitu 32 Peserta Pelatihan Keterampilan Kerja Binaan Baitul Mal Kota Banda Aceh, yang pada tanggal 5 Agustus 2019 menerima bantuan Tool Kit (alat kerja), dengan jurusan Bordir (13 orang), Jurusan Teknisi HP (13 Orang) dan Teknisi AC (6 orang).

c) *Transaction*: membangun ekosistem keuangan

1. Penerapan koperasi syariah pada setiap desa sehingga memudahkan masyarakat untuk memulai usaha dan mengembangkannya dengan sistem yang halal. Masyarakat yang akan meminjam uang di koperasi syariah tersebut diberikan penyuluhan dan kontrak perjanjian bahwa peminjam harus mengembalikan pinjaman kepada koperasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan peminjam juga diharapkan mampu memberikan pinjaman modal kepada masyarakat yang lain sehingga kemajuan ekonomi dapat terus berkembang merata.
2. Integrasi koperasi syariah dengan *market place local*

3.4 Analisis Kesenjangan *Smart Living*

A. Analisis SWOT

Tabel 3.9 Analisis SWOT Dimensi *Smart Living*

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	Kekuatan	Kelemahan
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia jaminan kesehatan yang sangat memadai 2. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai dan memenuhi standar serta <i>Public Safety Center</i> (e.g. PSC) 119 3. Sudah tersedianya ruang terbuka hijau sebesar 10 % yang disediakan oleh pemerintah 4. Jarak antara bangunan dan jalan sebagian besar sudah sesuai dengan GSB (e.g. Garis Sempadan Bangunan) 5. Tersedia IPAL Komunal di beberapa lokasi di Kota Banda Aceh 6. Tersedia tranportasi feeder yang terhubung dengan moda transportasi Trans Kutaraja 7. Tersedia moda transportasi dari pihak kE-tiga menggunakan Online dan offline 8. Di Implementasikannya aplikasi online terkait transportasi Laut dan darat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum stabilnya kelistrikan dari PLN di Kota Banda Aceh 2. "Tidak memadainya sarana prasarana ibadah di perkantoran, sekolah, pasar, dan sarana publik lainnya" 3. Sistem perparkiran belum tertata rapi dan manual 4. Sistem administrasi rumah sakit masih memerlukan dokumen-dokumen berbentuk kertas (belum semuanya di fasilitasi secara online dan terintegrasi). 5. Sistem Informasi Managemen Rumah Sakit (SIMRS) dan puskesmas yang belum maksimal 6. Pola hidup sehat dalam keseharian masyarakat masih sangat rendah seperti masih tingginya anggota keluarga yang menkonsumsi rokok 7. "Banyak petunjuk teknis penggunaan dana untuk kesehatan yang dibatasi oleh aturan dari pusat, sehingga dana besar dari pusat pemanfaatannya menjadi terbatas di daerah akibat Juknis yang terlalu mengikat. 8. Masih ada masyarakat yang belum mengetahui keuntungan dan kemudahan dalam
Faktor Eksternal		

		<p>pengelolaan air limbah melalui IPAL komunal.</p> <p>9. Belum tersedianya surveillance pada daerah-daerah yang dianggap perlu.</p> <p>10. Belum lengkap peta rute yang dilalui Transportasi umum</p> <p>11. Belum tersedianya aplikasi transportasi secara terintegrasi dan cashless</p>
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peluang membuat sistem transportasi umum yang cepat serta efisien dan terbukanya pemikiran masyarakat akan teknologi 2. Integrasi surveillance sistem dan bekerja sama dengan seluruh <i>stakeholder</i> 3. Adanya kesempatan untuk menjadikan rumah sakit dan puskesmas ramah anak; 4. Promosi layanan kesehatan yang lebih intensif 5. Lahan antara jarak bangunan dan jalan dapat dimanfaatkan untuk lahan terbuka hijau dan tempat parkir, 6. Terhadap lahan hijau terbuka masih 10% memungkinkan dikembangkan menjadi 20% dengan memanfaatkan lahan-lahan yang belum terpakai. 7. Pemanfaatan BRT Trans Koetaradja sebagai transportasi massal didalam Kota Banda Aceh. 8. Adanya peluang 	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengimplementasian lingkungan ramah anak di Rumah sakit, puskesmas, sekolah dan gampong 2. Pembuatan sistem pelayanan kesehatan terpadu 3. Penerapan sistem parkir yang berbasis TIK 4. Pengemangan IPAL Komunal di beberapa Titik dalam Kota Banda Aceh 5. Penerapan kebijakan untuk menangani kemacetan lalu lintas di jam puncak 	<p>Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi tentang IPAL Komunal ke masyarakat luas di Kota Banda Aceh 2. Pengintegrasian E-KTP dengan sistem pelayanan kesehatan serta juga sistem jaminan kesehatan 3. Pengembangan program kawasan tanpa rokok yang lebih persuasif sehingga menjadi Kota Bebas Asap Rokok 4. Koordinasi ke pusat untuk Juknis kesehatan yang tidak terlalu mengikat 5. Pelayanan transportasi publik berbasis TIK dan ramah untuk kelompok berkebutuhan khusus 6. Penerapan sistem transportasi terpadu berbasis TIK dan cashless

pengembangan IPAL Komunal pada kawasan padat dan kumuh seperti di perumahan dan pusat pasar.		
<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat semakin kritis dalam mendapatkan pelayanan kesehatan 2. Semakin terkurasnya lahan untuk pembangunan fisik sehingga semakin terkurasnya lahan terbuka hijau. 3. Masyarakat tidak mau memberikan lahan dan tetap membangun bangunan pada daerah jarak bangunan dan jalan yang telah ditetapkan. 	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dalam pengeluaran izin IMB 2. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni 3. Pelaksanaan update <i>realtime</i> pada sistem layanan kesehatan terpadu 	<p>Strategi mengurangi kelemahan untuk mengatasi ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoptimalan penggunaan lahan terbuka hijau untuk taman kota dan ramah anak 2. Penerapan kebijakan untuk meningkatkan luas lahan terbuka hijau

B. Program Inovasi *Smart Living*

Berdasarkan analisis daripada kondisi masa depan, SWOT, dan kondisi kesiapan daerah, terkait dengan *Smart living maka dikembangkan* sebuah inovasi “Gampong Sehat Menuju Kota Banda Aceh Sehat 2020”. Melalui Inovasi ini diharapkan dapat terwujudnya kesehatan bagi masyarakat kota banda dengan indikator umur harapan hidup lebih tinggi, rendah nya angka kematian dan kesakitan (bayi dan ibu).

Berdasarkan target kota Banda Aceh menjadi kota sehat pada tahun 2020, maka di perlukan langkah *preventif* terkait program kesehatan yang dimulai dari gampong dengan memberdayakan aparatur gampong, masyarakat dan tokoh agama. Ini akan kita mulai dari bawah ke atas dengan cara membuat “reusam” (Peraturan Desa) terkait kesehatan. Misi yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah terwujudnya pelayanan kesehatan yang maksimal untuk seluruh masyarakat Banda Aceh.

Sudah mulai berjalan sejak tahun 2015, namun inovasi ini masih terhambat terkait masalah resistensi atau kurang *awareness* masyarakat. terkait hal tersebut perlu dilakukan kegiatan untuk mendorong program ini dan dilaksanakan secara *preventif*. Untuk mendukung kegiatan ini, sudah ada aplikasi E-puskesmas yang berfungsi monitoring kesehatan secara online dan terintegrasi. Permasalahan awal terkait inovasi ini adalah tidak jalan nya Qanun KTR di area kota Banda Aceh, dan lainnya. Untuk menjaga keberlangsungan diperlukan adanya *maintenance*

terkait penggunaan aplikasi, keberhasilan kegiatan program serta urgensi nya di masa mendatang.

3.5 Analisis Kesenjangan *Smart Society*

A. Analisis SWOT

Tabel 3.10 Analisis SWOT Dimensi *Smart Society*

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	Kekuatan	Kelemahan
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komunitas start up/pengembang perangkat lunak dan UKM/IKM 2. Adanya partisipasi masyarakat dan komunitas kota dalam menentukan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh 3. Tersedia fasilitas, sarana dan prasarana untuk masyarakat dan komunitas ditingkat Kota dan Gampong (C/ Fasilitas olahraga, ruang komunitas dan UKM/IKM, Balai pertemuan, Co-working space) 4. Telah adanya aplikasi yang mendukung optimalisasi pendidikan 5. Adanya fasilitas penunjang Literasi (C/ Pustaka daerah, Pustaka Kelililng, Pojok Baca Masjid, Pustaka gampong, FreE-wifi) 6. Pendidikan diniyah yang diwajibkan untuk pendidikan tingkat SD dan SMP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum kuatnya Lembaga Masjid dan Meunasah dalam pembinaan masyarakat 2. belum adanya sistem akreditasi penilaian yang memadai terhadap dayah-dayah 3. Kurangnya kaderisasi Imam Hafizh 30 Juz 4. Belum tertatanya sistem pembinaan olahraga menuju kelas nasional dan internasional, rendahnya presentase angka 5. partisipasi masyarakat dalam olahraga dan Kurangnya program olahraga pendidikan 6. UKM/IKM yang terbentuk belum sepenuhnya di support oleh eksekutif dan legislatif. 7. CCTV belum merata ke gampong-gampong.
Faktor Eksternal		

	<p>7. Banyaknya fasilitas wifi di Warung Kopi (banyaknya warung kopi di Banda Aceh)</p> <p>8. Kondisi keamanan secara umum sudah sangat baik.</p> <p>9. Telah terpasangnya CCTV di keramaian, jembatan dan pemantauan bencana sejumlah 68 CCTV dan di traffic light berjumlah 43 CCTV</p> <p>10. Tersedia fasilitas sirine bencana, escape building dan rute evakuasi bencana</p>	
Peluang	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</p> <p>1. Tingginya Kebutuhan TIK dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat</p> <p>2. Meningkatkan keamanan tingkat gampong berbasis IT;</p> <p>3. Bersinergi dengan Perguruan tinggi dengan program Pengabdian masyarakat</p> <p>4. Adanya kesempatan <i>capacity building</i> untuk UKM/IKM;</p> <p>5. Adanya peluang untuk Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan dari pemerintah Provinsi</p> <p>6. Adanya peluang kerja sama dengan lembaga-lembaga/Dinas yang menangani KAMTIBMAS</p>	<p>Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p> <p>1. Penguatan komunitas-komunitas start up/pengembang perangkat lunak yang dapat bekerjsama dengan masyarakat gampong</p> <p>2. Pembuatan MoU dengan perguruan tinggi terkait Pengabdian Masyarakat yang bisa berimbang langsung ke masyarakat</p> <p>3. Pelaksanaan pelatihan dan beasiswa bagi pemuda-pemuda yang berprestasi di bidang akademik, agama, dan olahraga</p> <p>4. Pengembangan sistem informasi sekolah berbasis elektronik untuk mendukung integrasi data</p>
Ancaman	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p> <p>1. Informasi Hoax berkembang cepat di media sosial</p>	<p>Strategi mengurangi kelemahan untuk mengatasi ancaman</p> <p>1. Pengembangan dan penataan prasarana dan sarana tempat</p>

<p>2. Keamanan data yang belum terjamin</p> <p>3. Kemajuan teknologi cenderung dapat memunculkan perilaku individualisme</p> <p>4. Letak geografis daerah yang rawan bencana tidak terprediksi</p> <p>5. Banyak pendatang/turis yang berkunjung dari berbagai daerah namun belum tahu budaya dan qanun yang berlaku di Kota</p>	<p>2. Peningkatan kualitas remaja masjid</p> <p>3. Peningkatan aparatur di bidang keamanan data</p> <p>4. Melibatkan komunitas berbasis <i>security</i> dalam menghadapi ancaman-ancaman terkait keamanan data</p> <p>5. Pelaksanaan maintenance rutin terhadap perangkat-perangkat sensor yang ada</p> <p>6. Penataan prasarana dan sarana pendukung penanggulangan bencana</p>	<p>berkumpul masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas</p> <p>2. Pengintegrasian CCTV yang ada di Kota Banda Aceh (yang berbasis publik) baik itu di tingkat Gampong, pertokoan dan tentunya milik pemerintah kota</p> <p>3. Penambahan event-event rutin yang melibatkan masyarakat untuk dapat berkumpul dan beraktivitas bersama</p> <p>4. Penguatan literasi masyarakat terhadap bencana</p> <p>5. Mengadakan simulasi bencana di daerah-daerah yang rawan terkena bencana secara rutin</p> <p>6. Penguatan literasi masyarakat melalui sosialisasi qanun daerah</p>
---	--	--

B. Program Inovasi *Smart Society*

Sistem layanan Informasi Sekolah (Sinan Sikula)

Rutinitas absensi siswa di ruang kelas pada semua sekolah dipastikan dilakukan setiap hari dengan tujuan untuk mengetahui apakah siswa sakit, izin, alpa, atau terlambat di kelas tersebut. Dimana catatan absensi siswa tersebut biasanya mencakup nomor induk siswa, nama siswa, dan kelas.

Dari data absensi siswa, sekolah dapat menilai tingkat kedisiplinan pada setiap siswa, dimana nantinya akan direkap kembali pada akhir semester. Proses rekapitulasi per semester sudah dipastikan sedikit terkendala dan belum bisa memenuhi kebutuhan sekolah dengan cepat, mengingat prosesnya dikerjakan secara manual. Kendala lain dari proses absensi manual adalah mudah tercecer, sulitnya dalam pencarian data serta lambatnya waktu dalam pengolahan data.

Tabel 3.11 Harapan terhadap pendidikan di Kota Banda Aceh Kedepan

KONDISI SAATINI	HARAPAN
Belum maksimal implementasi manajemen berbasis sekolah.	Terbukanya ruang komunikasi dan informasi antara para pihak.
Keterbatasan waktu dan tenaga terlibat aktif dalam aktivitas sekolah.	Akses komunikasi dan informasi tidak terkendala ruang dan waktu.
Minimnya partisipasi dan kolaborasi.	Peningkatan partisipasi dan kolaborasi terhadap pendidikan.

Beranjak dari hal tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, berkesimpulan dibutuhkan satu terobosan baru untuk merubah paradigma dari pencatatan manual absensi ini ke sistem komputerisasi, sehingga data yang didapat lebih cepat, akurat dan efektif, serta dapat mengurangi biaya pengadaan mesin fingerprint dan ribetnya proses input data untuk peserta didik baru pada setiap awal tahun ajaran baru.

Keinginan menghadirkan sistem layanan ini juga dilatar belakangi oleh sulitnya mendapatkan akses informasi dari sekolah terhadap tumbuh kembang dan prilaku anak didik secara dini dan mendapatkan informasi terkait aktivitas dan proses belajar mengajar di sekolah, maraknya kekerasan (*bullying*) di lingkungan sekolah, kasus kekerasan terhadap anak didik.

DESKRIPSI SISTEM

Sistem Layanan Informasi Sekolah (*Sinan Sikula*) adalah suatu aplikasi yang berfungsi sebagai media komunikasi dan informasi antara pelaku pendidikan (sekolah) dengan penerima layanan pendidikan (orangtua/wali murid).

Rutinitas layanan ini adalah memberikan informasi dan menjadi media komunikasi antara orang tua/wali siswa dengan pihak sekolah dalam mendapatkan informasi kehadiran, akademik, dan aktivitas peserta didik di sekolah. Komunikasi dan pengiriman informasi dilakukan melalui aplikasi berbasis mobile, aplikasi berbasis web, dan berbasis SMS yang akan menjamin tersampaiannya informasi ke orangtua/wali murid atau sebaliknya secara cepat, tepat, akurat, dan *realtime* tanpa harus tatap muka, ataupun pada saat menerima hasil evaluasi belajar tahap akhir yang biasanya baru diterima oleh orangtua/wali murid pada saat pengambilan rapor.

Harapan yang lebih luas dari sistem layanan ini adalah, memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan bisa berlangsung dengan baik, transparan, dan akuntabel. Sistem ini juga diharapkan menjadi alat dalam proses pembangunan dan pembinaan aspek sosial kemasyarakatan terhadap anak usia sekolah, sehingga harapan hadirnya generasi yang berakhhlakul karimah bisa kita wujudkan. Selain tentunya layanan ini bisa membantu dalam memperkuat upaya perlindungan anak, dan meningkatkan rasa aman, nyaman serta tumbuh

kembang anak ke arah yang lebih baik, dengan banyaknya pihak terkait (*stakeholder*) yang ikut terlihat didalamnya.

Layanan Sinan Sikula ini dengan fitur-fitur yang ada tersebut, nantinya akan saling terintegrasi dalam memproses data-data akademik untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholder*, meliputi kehadiran siswa, kehadiran guru, kalender pendidikan, kurikulum yang digunakan, rekaman prestasi siswa/sekolah, daftar hafidz/hafidzah, siswa penerima beasiswa, jadwal sekolah serta segala informasi yang berkaitan dengan aktivitas yang ada di sekolah.

Setiap pengguna aplikasi mempunyai tingkat akses yang berbeda-beda terhadap sistem layanan informasi sekolah ini. Tingkat akses yang dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kepentingan dari masing-masing pengguna sistem nantinya. Sistem ini juga direncanakan memiliki *dashboard* untuk para pengambil kebijakan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.



Gambar 3.4 Penggunaan Aplikasi Oleh Siswa

MANFAAT (INTERNAL)

Mendukung salah satu misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh yaitu menerapkan manajemen teknologi informasi dan komunikasi dalam akses pendidikan dan pembelajaran (*e-education*), **manfaat internal** dari layanan ini adalah para pihak nantinya dimungkinkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terhadap tumbuh kembang dan perilaku serta proses belajar mengajar di sekolah secara utuh dan cepat dengan capaian antara lain:

1. Memudahkan dalam pengumpulan dan proses data.
2. Penyederhanaan proses dan layanan akademik.
3. Meningkatkan tata kelola dan transparansi manajemen berbasis sekolah.

4. Mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) dan
5. Tersedianya layanan informasi sekolah bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.

MANFAAT (EKSTERNAL)

Sedangkan ***manfaat eksternal***, diharapkan semua pihak terkait dalam dunia pendidikan (*stakeholder*) yang selama ini menjadi mitra dalam proses tumbuh kembang, prilaku anak bisa berperan serta dalam proses sosialisasi, mengetahui persoalan yang terjadi pada sekolah tersebut untuk nantinya melakukan tindakan penanganan awal terhadap persoalan yang ada, dengan capaian antara lain:

1. Memudahkan orangtua/wali murid dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi sekolah.
2. Memperkuat akses orangtua/wali murid siswa dalam mengawasi dan mengawal penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan
3. Terciptanya akuntabilitas, transparansi, dan transformasi informasi publik.

Layanan ini memang sangat diharapkan bisa mereduksi prilaku dan kondisi layanan sekolah yang tidak dalam kondisi normal juga menjadi bagian dari upaya pencegahan (*mitigasi*) sebelum kondisi yang tidak diinginkan menjadi lebih tidak terkontrol/susah ditangani.

PIHAK TERKAIT (STAKEHOLDER)

Adapun sejauh ini, *stakeholder* yang terkait erat dan berperan aktif dengan dunia pendidikan di Kota Banda Aceh adalah:

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB)
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4. Dinas Sosial
5. Dinas Syariah Islam dan Dinas Pendidikan Dayah
6. Polisi, TNI dan BNN
7. Geuchik
8. Satpol PP/Wiyatul Hisbah
9. Ustadz/Ustadzah
10. Psikolog/Konselor/Penyuluhan Pendidikan
11. dan pihak lainnya.

Dimana peran serta *stakeholder* tersebut di atas sangat erat, sebagai bentuk sosialisasi dan kerja sama lintas sektor dalam penguatan aqidah, akhlak, prilaku dan kontrol sosial, dan informasi publik tentunya.

3.6 Analisis Kesenjangan *Smart Environment*

A. Analisis SWOT

Tabel 3.12 Analisis SWOT Dimensi *Smart Environment*

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	Kekuatan	Kelemahan
Faktor Internal	<p>1. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk menyediakan 20 % ruang terbuka hijau di Kota Banda Aceh.</p> <p>2. <i>Waste Collecting Point</i> (e.g. WCP) di beberapa gampong sebagai tempat pemilahan sampah dan merupakan alternatif dari sistem <i>container</i> dan <i>door to door</i></p> <p>3. Tersedia TPS3R dan Bank Sampah di beberapa gampong</p> <p>4. Tersedia pabrik pengolahan sampah non-organik</p> <p>5. Ada tenaga pembersih jalan raya yang rutin, perawatan taman kota</p> <p>6. Ada penggunaan sumber energi terbarukan untuk lampu jalan dan taman</p> <p>7. Terkait erat dengan RPJMD Kota Banda Aceh misi VI (Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan) dengan sasaran</p>	<p>1. Sarana yang tersedia di <i>escape building</i> kurang terawat dan masih kurangnya edukasi penggunaan sarana escape building.</p> <p>2. Penerapannya <i>Waste Collection Point</i> (WCP) belum menyeluruh ke semua daerah dan edukasi pegelolaan sampah butuh waktu untuk menumbuhkan kesadaran warga.</p> <p>3. Belum adanya pengolahan sampah dan pemisahan sampah serta pengolahan air limbah belum maksimal</p> <p>4. Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga fasilitas RTH, dimana, banyak pohon kurang terawat dan kurangnya tenaga kerja pemeliharaan taman/RTH</p>
Faktor Eksternal		

	<p>yang terkait adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kinerja layanan Air Minum, dan Sanitasi Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dalam sistem transportasi kota. Meningkatnya cakupan layanan transportasi publik. Tersedianya ruang terbuka hijau. Terwujudnya mitigasi kebencanaan yang tangguh dan handal. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan 	
Peluang	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banda Aceh memiliki potensi energi terbarukan yang menjanjikan dan cukup beragam, mulai dari sampah, biogas, biomassa, arus laut, air, angin, dan matahari 2. Banyak investor asing yang tertarik dengan potensi energi terbarukan Aceh seperti Perancis, China, dan Jepang 3. Adanya pemilahan sampah yang organik dan non-organik 4. Adanya peluang menggunakan sensor yang berhubungan dengan lingkungan dan alam. 	<p>Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi penggunaan escape building 2. Penggunaan sistem dalam pemisahan sampah organik dan non organic 3. Pemerintah kota bekerja sama dengan pemerintah gampong dalam perawatan lingkungan
Ancaman	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasiancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geologi kota Banda Aceh yang rawan bencana seperti gempa bumi, banjir dan 	<p>Strategi mengurangi kelemahan untuk mengatasiancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutaran SOP kebencanaan di tiap-tiap acara Pemerintahan dan sekolah

<p>cuaca ekstrim.</p> <p>2. Penanganan sampah yang tidak tepat.</p> <p>3. Penggunaan energi terbarukan masih membutuhkan dana yang besar.</p> <p>4. Perubahan cuaca yang tidak bisa diprediksikan</p> <p>5. Kerusakan lingkungan akibat pengembangan yang tidak memenuhi standar;</p>	<p>BMG</p> <p>2. Pembuatan SOP dalam hal pengembangan/pembongkaran/pertipan yang berpengaruh terhadap lingkungan seperti peasangan jalur kabel bawah tanah, dan lain- lain.</p>	<p>2. Pelaksanaan edukasi terkait sistem pengelolaan dan pengelompokan sampah pada sistem wcp di sekolah - sekolah untuk mengedukasi generasi muda.</p>
---	---	---

B. Program Inovasi *Smart Environment*

Berdasarkan analisis daripada kondisi masa depan, SWOT, dan kondisi kesiapan daerah, terkait dengan *smart environment* sebuah inovasi terkait dengan sistem pemetaan keluhan Air minum dengan menggunakan GIS dipilih untuk menjadi salah satu program yang ingin disukseskan. Permasalahan yang masih terjadi terkait dengan Air Minum adalah masih adanya keluhan masyarakat terkait penyediaan air minum yang kualitasnya kurang maksimal (keruh, bau, dan berasa). Fungsi daripada aplikasi ini adalah untuk mengambil data dan lokasi realtime dari tempat yang kualitas air minum nya belum baik. Untuk saat ini, pengembangan aplikasi ini dapat berupa penambahan fitur pada aplikasi pengaduan publik SUWARGA dan mengintegrasikannya dengan aplikasi SIGAP (Sistem Informasi Geografis Aplikatif dan Partisipatif).

Dengan pengembangan kedua aplikasi ini diharapkan permasalahan air minum kurang maksimal tersebut dapat terselesaikan. Sebagai tambahan, dengan menerapkan GIS yang diintegrasikan dengan laporan masyarakat melalui SUWARGA, besar harapan penyebab permasalahan air tersebut dapat dipetakan dan laporan dari masyarakat sendiri dapat dengan mudah ditanggapi.

4 Analisis Visi Pembangunan *Smart City*

4.1 Analisis Visi Pembangunan Daerah

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, Visi kepala daerah terpilih dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berlaku selama 5 (lima tahun).

Pada masa bakti 2017-2022, pembangunan Kota Banda Aceh sebagai bagian dari tahap III rencana jangka panjang 2007-2027 haruslah mengakomodasi berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan baik dalam konstelasi internasional, nasional, regional maupun regional, dengan tetap mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, prioritas program-program nasional dan kebijakan nasional meliputi pengembangan wilayah, kebijakan pembangunan lintas sektoral, serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Provinsi Aceh, Sesuai dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih maka visi Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 adalah:

”Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah”

Visi Pemerintah Kota Banda Aceh ini mencerminkan arah pembangunan Kota Banda Aceh dalam masa lima tahun ke depan. Dimana, Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banda Aceh yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Dalam visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 terdapat 2 (dua) kata penting yaitu **“GEMILANG”** dan **“BINGKAI SYARI’AH”**. Agar tidak multi tafsir, maka berikut ini dijabarkan arti dari kata-kata tersebut.

Gemilang	Diwujudkan dengan cara menjadikan Kota Banda Aceh yang termasyhur dan terpandang dalam 3 pilar utama, yaitu agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dengan memperhatikan keadilan gender
Bingkai Syariah	Dapat diwujudkan dengan cara mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan sesuai Syariat islam

Agar pencapaian visi pembangunan jangka menengah ini dapat diwujudkan maka pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan 7 misi. Dimana, Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan penguraian secara ringkas upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan pemahaman dan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Adapun penjabaran daripada ketujuh misi tersebut adalah:

Misi 1	: Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah, dan akhlak.
Misi 2	: Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
Misi 3	: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
Misi 4	: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
Misi 5	: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
Misi 6	: Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Misi 7	: Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya kerangka yang jelas terkait dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh misi tersebut. Dimana, tujuan dan sasaran daripada setiap misi yang dijalankan tersebut, akan memberikan arah di dalam proses pelaksanaan di setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Adapun penjabaran dari tiap – tiap misi tersebut adalah:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Misi Kota Banda Aceh

Misi 1	Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan benar-benar berada dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.	
	Tujuan 1:	Terwujudnya nilai-nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh
	Sasaran 1:	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam
Misi 2	Misi ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan, memajukan seni dan budaya Aceh, melakukan pembinaan kepemudaan, dan	

		membudayakan olahraga sehat dan rekreasi, serta memajukan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada tingkat regional dan nasional.
	Tujuan 1:	Mewujudkan pendidikan kota Banda Aceh yang bermutu, berdaya saing, berkarakter Islami dan berprestasi.
	Sasaran 1:	Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan
Misi 3		Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi perbaikan pendapatan masyarakat yang dalam lima tahun ke depan yang berdampak kepada peningkatan PAD dengan kebijakan dan strategi yang efektif sehingga pada gilirannya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.
	Tujuan 1:	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
	Sasaran 1:	Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Misi 4		Misi ini ditujukan untuk menghasilkan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik melalui upaya penguatan pemberdayaan kesehatan masyarakat yang dicapai dengan kerja sama dan kemitraan, penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan serta kebijakan penguatan manajemen, regulasi, sistem informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan.
	Tujuan 1:	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
	Sasaran 1:	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat
Misi 5		Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat dari sisi legalitas, melainkan juga profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Kolusi Korupsi Nepotisme, netral, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
	Tujuan 1:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

	Sasaran 1:	Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi.
	Sasaran 2:	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Misi 6		Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mengoptimalkan sumber daya tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan di masa sekarang dan masa yang akan datang.
	Tujuan 1:	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan
	Sasaran 1:	Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni
	Sasaran 2:	Mitigasi kebencanaan yang tangguh
	Sasaran 3:	Pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan
Misi 7		Misi ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian kelompok perempuan dalam mengejar kemajuannya dan meningkatkan rasa aman dan nyaman kelompok ibu dalam kehidupannya serta tumbuh kembang anak yang baik.
	Tujuan 1:	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk
	Sasaran 1:	Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak
	Sasaran 2:	Pengendalian pertumbuhan penduduk

Dimana, arah kebijakan yang dimiliki Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 5 tahun ini (2018 – 2022) adalah:

Tabel 4.2 Arah Kebijakan Kota Banda Aceh dalam Kurun Waktu 5 Tahun

ARAH KEBIJAKAN				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Memperkuat peran masyarakat dalam mencegah pendangkalan aqidah	Infrastruktur ramah lingkungan, mendukung kualitas kesehatan, dan layak anak	Penguatan Kemitraan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi riil sektor perekonomian serta memperkokoh peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Untuk keterkaitan dan keselarasan antara RPJMD Kota Banda Aceh 2017 – 2022 terhadap RPJPD Kota Banda Aceh 2007 – 2027 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3 Sinkronisasi RPJMD terhadap RPJPD Kota Banda Aceh 2007 - 2027

MISI RPJM 2012 - 2022	MISI RPJP 2007-2027
Misi 1	1. Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah
Misi 5	2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah disertai dengan penegakan hukum.
Misi 6	3. Mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Misi 2	4. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota pendidikan yang berkualitas
	5. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan.
Misi 4	6. Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang sehat, cerdas dan berkualitas
Misi 3	7. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota wisata berbasis masyarakat dan budaya Islami.
Misi 7	3. Mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Selain daripada keselarasan terhadap RPJP Kota Banda Aceh, Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh juga memiliki keselarasan yang cukup erat dengan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA).

Tabel 4.4 Sinkronisasi RPJM Kota Banda Aceh dan RPJM Provinsi Aceh

MISI RPJM 2012 - 2022	MISI RPJMA 2017 – 2022
Misi 5	1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Misi 1	2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.
Misi 7	3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.
Misi 2	4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat regional dan nasional.
Misi 4	5. Mewujudkan akses layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial secara terintegrasi 6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.
Misi 6	7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan
Misi 3	8. Membangun dan mengembangkan sentrasentra produksi dan industri kreatif yang kompetitif. 9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
Misi 6	10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan dan terintegrasi.

Sejalan dengan dengan visi pemerintah Kota Banda Aceh, pengembangan *Smart City* di Kota Banda Aceh secara berkelanjutan juga tetap berpegang pada syariah Islam. Pada tahun 2018, sebuah visi terkait *Smart City* Kota Banda Aceh sudah pernah dibuat. Visi *Smart City* tersebut adalah dengan cara menggabungkan tujuan *Smart City* dengan kearifan lokal. Visi *Smart City* tersebut adalah:

“Menjadi Kota Pintar Islami yang Inovatif dan Kompetitif”.

Visi ini dapat dijabarkan dalam 3 (tiga) kata kunci penting yaitu “**Kota Pintar Islami**”, “**Inovatif**” dan “**Kompetitif**” yang maknanya dapat dijabarkan arti dari kata - kata tersebut.

Kota Pintar Islami	Dapat diwujudkan dengan cara mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang dilakukan secara bersih, transparan, akuntabel, dan demokratis sesuai syariah Islam yang sesuai dengan identitas lokal Kota Banda Aceh.
Inovatif	Membangun masyarakat yang tak kenal lelah belajar berbagai ilmu termasuk teknologi untuk meningkatkan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cerdas, sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup, dengan tata kota yang indah, nyaman, aman, dan bebas polusi secara berkelanjutan. Dengan demikian pada akhirnya kota Banda Aceh menjadi kota yang pintar, hijau tangguh dan layak huni yang berkelanjutan.
Kompetitif	Dapat diwujudkan dengan cara membentuk masyarakat Kota Banda Aceh menjadi Masyarakat yang cerdas yang berdaya saing tinggi dan memiliki ekosistem perkotaan yang maju dengan memiliki ciri khas masyarakat yang menghargai nilai lokal, berpendidikan tinggi, masyarakat yang berpikiran terbuka, kreatif & fleksibel, dan juga, masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

Agar pencapaian visi tersebut dapat diwujudkan maka disusunlah 6 misi yang dapat mendukung pelaksanaannya yaitu:

Tabel 4.5 Misi *Smart City* Kota Banda Aceh

MISI SMART CITY KOTA BANDA ACEH		DIMENSI SMART CITY
Misi 1	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, partisipatif dan komunikatif	<i>Smart Governance</i>
Misi 2	: Mewujudkan Kota Banda Aceh untuk berinovasi dengan menguatkan identitas Kota Banda Aceh menjadi pusat wisata islami dunia yang cerdas dan berbudaya	<i>Smart Branding</i>
Misi 3	: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan penataan di sektor industri dan ekonomi Syariah	<i>Smart Economy</i>
Misi 4	: Mewujudkan ekosistem perkotaan yang maju dengan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan terintegrasi dengan masyarakat yang sehat, toleran serta memiliki rasa kebersamaan yang kuat	<i>Smart Living</i>
Misi 5	: Mewujudkan masyarakat yang kreatif, berdaya saing dan	<i>Smart Society</i>

	mampu menjaga keamanan lingkungannya	
Misi 6	: Mewujudkan Kota Banda Aceh Menjadi Kota yang ramah lingkungan, hijau, bersih, tangguh, dan berkelanjutan	<i>Smart Environment</i>

Kerangka pikir Banda Aceh *Smart City* merupakan kesinambungan analisis masa depan, kesiapan daerah, dan kesenjangan atau gap yang dirangkai secara komprehensif untuk melihat kesiapan daerah dalam mengimplementasikan konsep *Smart City*. Sebagaimana sistem perencanaan pembangunan maka konsep *Smart City* menjadi bagian yang penting dari perencanaan strategis RPJMD yang memuat isu-isu strategis, kinerja utama, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan staregi serta prioritas program pembangunan.

Tabel 4. 6 Hubungan antara Misi *Smart City* Banda Aceh dan Misi RPJMD

MISI SMART CITY	MISI RPJMD 2017-2022
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, partisipatif dan komunikatif;	Misi 1 : Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah, dan akhlak Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
Misi 2 : Mewujudkan Kota Banda Aceh untuk berinovasi dengan menguatkan identitas Kota Banda Aceh menjadi pusat wisata islami dunia yang cerdas dan berbudaya	Misi 1 : Meningkatkan pelaksanaan syariah Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah, dan akhlak
Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan penataan di sektor industri dan ekonomi syariat.	Misi 1 : Meningkatkan pelaksanaan syariah Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah, dan akhlak Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat
Misi 4 : Mewujudkan ekosistem perkotaan yang maju dengan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan terintegrasi dengan masyarakat yang sehat, toleran serta memiliki rasa kebersamaan yang kuat.	Misi 4 : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Misi 6 : Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang kreatif, berdaya saing dan mampu menjaga keamanan lingkungannya.	Misi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga Misi 7 : Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 6 : Mewujudkan Kota Banda Aceh Menjadi Kota yang ramah lingkungan, hijau, bersih, tangguh, dan berkelanjutan.	Misi 6 : Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

Maka oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan kebijakan untuk melihat sinkronisasi antara RPJMD Kota Banda Aceh dan 6 pilar *Smart City* yaitu, *Smart governance*, *Smart branding*, *Smart economy*, *Smart living*, *Smart society* dan *Smart environment* seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Sinkronisasi Strategi kebijakan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022 dan Dimensi *Smart City*

Misi	Strategi	Dimensi <i>Smart city</i>					
		<i>Smart Governance</i>	<i>Smart Branding</i>	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Living</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart Environment</i>
Misi 1 : Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Aqidah, Syariah, dan Akhlak							
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah pendangkalan aqidah		✓		✓	✓	
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penegak syariat Islam	✓					
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga							
	Peningkatan peran orang tua komite sekolah, MPD, dan <i>stakeholder</i> lainnya dalam pembangunan pendidikan				✓		
	Peningkatan Kapasitas Guru dalam Multimedia Pembelajaran	✓			✓		
	Melakukan Sertifikasi Keahlian Pemuda, Penyediaan dan Pembangunan sarana dan prasarana yang representative				✓		
Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat							
	Menumbuh kembangkan kawasan strategis perdagangan, pariwisata, pertanian dan perikanan		✓	✓			
	Peningkatan peran UMKM dan penataan pedagang kaki lima			✓			
	Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk membantu permodalan UMKM secara professional			✓			

Misi	Strategi	Dimensi <i>Smart city</i>					
		Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
	Memaksimalkan sumber penerimaan, retribusi dan pajak daerah			✓			
	Mewujudkan pengembangan sentra industry dengan pemetaan terhadap potensi Industri			✓			
	Peningkatan potensi daerah melalui promosi dan kerja sama investasi dengan berbagai pihak	✓	✓				
	Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata	✓					
	Penyediaan Fasilitas wisata syariah yang diminati Manca Negara dan Timur Tengah	✓					
	Memberikan bantuan tepat sasaran sesuai klaster		✓			✓	
	Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok		✓				
	Penyediaan Lapangan Kerja dan lapangan Usaha yang sesuai keahliannya		✓		✓		
	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gampong		✓				

Misi 4 : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

	Peningkatan dan penyediaan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi	✓			✓		✓
	Peningkatan kemitraan dengan <i>stakeholder</i> kesehatan yang profesional.				✓		
	Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas kesehatan yang memadai				✓		

Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

	Penataan jumlah dan distribusi ASN sesuai kualifikasi, kompetensi dan Profesionalisme	✓					
--	---	---	--	--	--	--	--

Misi	Strategi	Dimensi <i>Smart city</i>				
		Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society
	Peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi sesuai prosedur (SOP) yang ada	✓				
	Peningkatan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Aparatur Gampong	✓				
	Penyediaan dan peningkatan 3 aspek penilaian Pemeringkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	✓				

Misi 6 : Membangun Infrastruktur Kota Yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

	Peningkatan pengawasan terhadap pencurian air dan kebocoran pipa serta peningkatan SDM karyawan PDAM	✓				✓
	Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan yang memenuhi standar pelayanan minimal.	✓				✓
	Peningkatan jumlah jalan dalam kondisi baik				✓	
	Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan dan pedesaan			✓		✓
	Penataan dan pengembangan sistem jaringan transportasi secara merata			✓		
	Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH Kota yang berestetika dan infrastruktur lainnya	✓		✓		✓
	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan kepada masyarakat terhadap mitigasi bencana dan peningkatan prasarana dan sarana mitigasi kebencanaan .				✓	
	Pengembangan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan berupa Bio Gas, PLTA, tenaga surya, tenaga Angin dan tenaga gelombang laut.					✓

Misi 7 : Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi	Strategi	Dimensi <i>Smart city</i>					
		Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
	Membuka akses bagi perempuan untuk mendapatkan kesempatan peningkatan kualitas hidup dan kemampuan dalam segala bidang			✓	✓	✓	
	Peningkatan fasilitas layanan P2TP2A dan unit layanan lainnya serta gugus tugas perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat	✓			✓	✓	
	Peningkatan pemahaman serta penguatan kelembagaan multi <i>stakeholder</i> terkait PUHA melalui advokasi, sosialisasi dan kemitraan				✓		
	Memperkuat program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)				✓		

Dengan mempertimbangkan Masterplan Kota Banda Aceh *Smart City* dokumen perencanaan operasional sehingga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022, maka berikut rekomendasi Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama yang selaras dengan Dimensi *Smart City* dalam Rencana Jangka Menengah Pembangunan Banda Aceh.

Tabel 4.8 Sinkronisasi Tujuan dan Indikator Kinerja Utama RPJMD dengan Dimensi *Smart City*

Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Dimensi <i>Smart City</i>					
			Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environme
Misi 1 : Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Aqidah, Syariah, dan Akhlak								
Terwujudnya nilai-nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh	Nilai Survey pelaksanaan Syariat Islam Banda Aceh	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
	Penurunan Angka Pelanggaran terhadap Qanun Syariat Islam	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga								
Mewujudkan pendidikan kota Banda Aceh yang bermutu, berdaya saing, berkarakter Islami dan berprestasi	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	
	Persentase siswa yang mampu menghafal Al-qur'an		<input checked="" type="checkbox"/>					
	Tingkat prestasi kota di POPDA						<input checked="" type="checkbox"/>	
Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat								
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB				<input checked="" type="checkbox"/>			
	Koefisien Gini			<input checked="" type="checkbox"/>				
	Angka kemiskinan		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Tingkat Pengangguran Terbuka		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi			<input checked="" type="checkbox"/>				
	Jumlah kunjungan wisatawan		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Dimensi <i>Smart City</i>					
			Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environme
Misi 4 : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat								
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat		Indeks Keluarga Sehat (IKS)				✓		
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik								
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	✓					
		Nilai Pemeringkatan pemerintahan berbasis elektronik	✓					
Misi 6 : Membangun Infrastruktur Kota Yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan								
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana serta Prasarana Kota yang Berwawasan Lingkungan dan Berkesinambungan		Indeks Kota Layak Huni				✓	✓	✓
		Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana				✓		
		Jumlah daya pasokan listrik dari energi terbarukan						✓
Misi 7 : Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan		Index Pembangunan Gender (IPG)	✓				✓	
		Persentase Indikator Kota Layak Anak yang dipenuhi					✓	
		Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk				✓		

Tabel 4.9 Sinkronisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Banda Aceh dengan Pengembangan *Smart City* Kota Banda Aceh

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		DIMENSI
Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, partisipatif dan komunikatif							
	1.1.	Pelayanan publik dan birokrasi yang efektif, efisien dan transparan	1.1.1	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis SPBE	1.1.1.1	Penyediaan dan peningkatan 3 domain penilaian Pemeringkatan SPBE	Smart Governance
					1.1.1.2.	Penyediaan SOP terkait pelayanan publik	
			1.1.2.	Menghadirkan sistem pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, mudah dan berkualitas.	1.1.2.1	Meningkatkan pemanfaatan layanan secara elektronik sebagai media yang dapat diakses oleh masyarakat	
			1.1.3.	Menghasilkan kebijakan – kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan kreditabel.	1.1.3.1	Memberikan aksesibilitas publik yang partisipatif dalam pembangunan	
					1.1.3.2	Pengambilan keputusan berdasarkan data	
	1.2.	Pemenuhan standar data, metadata, interoporabilitas data menggunakan kode referensi serta data induk	1.2.1.	Menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses (Satu Data)	1.2.1.1	Integrasi sistem layanan dan struktur data	Smart Governance
					1.2.1.2	Penguatan SOP Satu Data	

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		DIMENSI
			1.2.2.	Meningkatkan dan menguatkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik	1.2.2.1.	Memanfaatkan Big Data Analytic	
					1.2.2.2.	interoperabilitas sistem informasi,	
					1.2.2.3.	Sistem pengambilan keputusan, dengan mengintegrasikan dan menyinkronkan kelembagaan yang ada di Kota Banda Aceh.	
	1.3.	Peningkatan pelayanan publik dan monitoring	1.3.1	Memudahkan memonitor aktivitas kota	1.3.1.1.	Pembangunan <i>City Operation Center (COC)</i>	<i>Smart Governance</i>

Misi 2: Mewujudkan Kota Banda Aceh untuk berinovasi dengan menguatkan identitas Kota Banda Aceh menjadi pusat wisata islami dunia yang cerdas dan berbudaya

	2.1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	2.1.1	Meningkatnya pengembangan industri kreatif	2.1.1.1	Peningkatan pembangunan industri dan ekonomi kreatif	<i>Smart Branding, Smart Economy</i>
			2.1.2	Meningkatnya neraca perdagangan	2.1.2.1	Peningkatan daya saing dan diversifikasi produk	
			2.1.3	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	2.1.3.1	Peningkatan jumlah investasi	
					2.1.3.2	Penguatan destinasi wisata halal	
					2.1.3.3	Pembangunan infrastruktur pendukung budaya dan wisata islami	
	2.2.	Meningkatkan kualitas informasi terkait pariwisata syari'ah	2.2.1.	Menampilkan informasi positif tentang Kota dan Pariwisata syariah di Kota	2.2.1.1	Mengembangkan literasi digital di masyarakat	<i>Smart Branding</i>

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		DIMENSI
					2.2.1.2.	Pembuatan SOP tentang literasi digital terkait pariwisata	
2.3.	Pengelolaan data wisatawan dan budget wisata	2.3.1.	Mendapatkan data yang akurat tentang pariwisata	2.3.1.1.	Pemanfaatan teknologi informasi tentang pariwisata		<i>Smart Branding</i>
		2.3.2.	Mendapat kolektif data terkait keluhan dan masukan terkait dengan pariwisata	2.3.2.1	Penerapan big data analytic untuk DSS		
2.4.	Terciptanya Wajah Kota Dengan Tata Ruang Yang Berkualitas	2.4.1.	Meningkatkan navigasi dan peta informasi daerah	2.4.1.1	Pembuatan papan informasi nilai sejarah pada bangunan-bangunan kota pusaka		<i>Smart Branding</i>
				2.4.1.2	Pengembangan pola navigasi wisata digital		
				2.4.1.3	Pengembangan taman kota yang nyaman, aman dan layak bagi anak, pemuda dan lansia.		
2.5.	Terwujudnya nilai-nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota	2.5.1.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan syariah Islam	2.5.1.1	Penyemarakan syiar Islam		<i>Smart Branding</i>
				2.5.1.2	Penyuluhan Agama Islam dan Sosialisasi Qanun		
Misi 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan penataan di sektor industri dan ekonomi Syariah.							

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		DIMENSI
	3.1.	Penguatan tatanan ekonomi Syariah di dalam ekosistem pelayanan, pengelolaan dan transaksi keuangan.	3.1.1.	Menguatkan kelompok usaha dan koperasi syariah	3.1.1.1	Integrasi layanan UMKM dan IKM dengan koperasi syariah, dan <i>market place local</i>	Smart Economy
					3.1.1.2	Mengembangkan dan menguatkan lembaga/usaha ekonomi berbasis syariah yang dapat membantu pemodalannya UKM/IKM secara syariah	
					3.1.1.3	Pembuatan dan Pengembangan produk hukum pendukung ekonomi Syariah.	
			3.1.2	Peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan dan pengelolaan pendapatan daerah.	3.1.2.1	Pemanfaatan Teknologi informasi dalam Sistim Perencanaan dan Pendataan Sumber Daya Ekonomi	
					3.1.2.2	Peningkatan jumlah masyarakat yang sadar pajak	
	3.2.	Terciptanya ekosistem industri pendukung <i>Smart City</i> .	3.2.1	Membangun ekonomi industri yang berdaya saing dengan memperkuat perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan daerah dan pengembangan usaha mikro.	3.2.1.1	Pemetaan dan penataan industri primer, sekunder dan tersier kota Banda Aceh dengan pemanfaatan teknologi informasi	Smart Economy

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		DIMENSI
					3.2.1.2	Peningkatan peran UKM/IKM dan penataan pedagang kaki lima	
			3.2.2	Membangun dan mengembangkan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan, sebagai pendukung <i>Smart City</i> .	3.2.2.1.	Integrasi antara industri primer (perikanan) dan (pertanian, kehutanan) dari kabupaten tetangga dengan industri sekunder pengepakan, branding dan lain- lain dan terelasi juga dengan sektor jasa (tersier) yang dapat membuka peluang kerja baru dari integrasi antar tipe industri tersebut.	
					3.2.2.2	Mewujudkan pengembangan sentra industry	
					3.2.2.3	Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang	
			3.2.3	Mendorong Pengembangan Kewirausahaan di Kota Banda Aceh sebagai pendukung industri 4.0	3.2.3.1	Mendorong berkembangnya startup – startup digital.	

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		DIMENSI
			3.2.4	Meningkatkan jumlah Investasi.	3.2.4.1	Peningkatan potensi daerah melalui promosi dan kerja sama investasi dengan berbagai pihak	
	3.3.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3.3.1	Pengembangan dan Peningkatan kualitas daripada BUMG dan UMKM	3.3.1.1.	Menumbuh kembangkan UKM, IKM dan industri kreatif seperti program OVOP	<i>Smart Economy</i>
					3.3.1.2.	Penyaluran modal usaha berdasarkan prinsip Syariah	
					3.3.1.3	Penyediaan Lapangan Kerja dan lapangan Usaha sesuai dengan potensi Gampong	
					3.3.1.4	Memberikan bantuan tepat sasaran	
			3.3.2.	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	3.3.2.1	Peningkatan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	
			3.3.3.	Meningkatnya kesejahteraan disabilitas	3.3.3.1	Pemenuhan kebutuhan kaum difabel	
					3.3.3.2	lembaga kesejahteraan sosial	
Misi 4: Mewujudkan ekosistem perkotaan yang maju dengan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan terintegrasi dengan masyarakat yang sehat, toleran serta memiliki rasa kebersamaan yang kuat.							

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		DIMENSI
	4.1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	4.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	4.1.1.1.	Optimalisasi jaminan kesehatan dengan integrasi sistem jaminan kesehatan di seluruh puskesmas dan rumah sakit	<i>Smart Living</i>
					4.1.1.2.	Pemantapan program Curhatan Langsung Bersama Kesehatan (CLBK)	
					4.1.1.3.	Melaksanakan program Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	
					4.1.1.4.	Peningkatan kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat	
	4.2.	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan publik	4.2.1.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan layanan publik lainnya	4.2.1.1	Penguatan fasilitas kesehatan	<i>Smart Living</i>
					4.2.1.2	Integrasi layanan puskesmas, rumah sakit dengan sistem kependudukan dan lainnya yang dianggap perlu	
	4.4.	Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk hidup dan berperilaku sehat	4.4.1.	Terwujudnya kesehatan bagi masyarakat kota Banda dengan indikator umur harapan hidup lebih tinggi, rendahnya angka kematian dan kesakitan (bayi dan ibu). dan lain- lain	4.4.1.1.	Menguatkan Program KTR	<i>Smart Living</i>

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		DIMENSI
					4.4.1.2.	Pembangunan IPAL komunal hanya pada kawasan permukiman dan tempat ibadah.	
	4.5.	Meningkatkan kualitas permukiman	4.5.1	Terkendalinya Tata Ruang Kota Banda Aceh	4.5.1.1.	Pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang	<i>Smart Living</i>
					4.5.1.2.	Pengembangan rencana kawasan di masa depan dengan desain terpadu dan berwawasan lingkungan	
	4.6.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum, Prasarana dan Sarana Transportasi	4.6.1.	Mengembangkan transportasi kota yang mengutamakan angkutan umum massal, pejalan kaki dan pesepeda	4.6.1.1.	Penataan dan pengupayaan percepatan pembangunan pedestrian pada kawasan strategis	<i>Smart Living</i>
					4.6.1.2.	Pengupayaan percepatan konversi dan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung	
					4.6.1.3.	Pengembangan sistem angkutan umum kota yang nyaman dan ramah Lingkungan	
Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang kreatif, berdaya saing dan mampu menjaga keamanan lingkungannya.							
	5.1	Memperkuat pelaksanaan Aqidah dan Akhlak sesuai	5.1.1.	Meningkatkan kualitas penyebaran dakwah ke	5.1.1.1.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	<i>Smart Society</i>

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		DIMENSI
		dengan syari`at islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.		masyarakat		mengimplementasikan teknologi informasi dalam dakwah	
			5.1.2.	Menguatkan penegakan syariah dalam kehidupan bermasyarakat	5.1.2.1.	Pelaksanaan syariah secara kaffah di dukung dengan pemantauan berbasis teknologi dengan Meningkatkan kualitas tata kelola dan sdm lembaga penegakan syariah	Smart Society
					5.1.2.2.	Pembangunan infrastruktur pendukung budaya dan wisata islami	
	5.2.	Meningkatnya Interaksi Sosial Masyarakat	5.2.1.	Menciptakan lingkungan interaksi masyarakat yang berkualitas	5.2.1.1.	Penguatan peran serta kepemudaan dan komunitas dalam kegiatan pemuda pelopor, pemuda wirausaha, pertukaran pemuda antar Negara, jamboree pemuda dan komunitas	Smart Society
					5.2.1.2.	Penguatan peran serta Kota Banda Aceh dalam MTQ, O2SN, POPWIL, POPDA, POSPEDA, POSPENAS, dan Olahraga Tradisional	
	5.3.	Menciptakan lingkungan belajar dengan modal sosial yang kuat	5.3.1.	Meningkatnya Literasi Masyarakat	5.3.1.1.	Peningkatan kesadaran pemanfaatan internet secara positif dan produktif	Smart Society
	5.4.	Meningkatkan kualitas pendidikan	5.4.1.	Meningkatkan mutu tenaga pendidik	5.4.1.1.	Meningkatkan kedisiplinan tenaga pendidik berbasis TIK	Smart Society

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		DIMENSI
			5.4.2.	Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses belajar mengajar	5.4.2.1.	Penerapan Teknologi Informasi	
	5.5.	Menciptakan lingkungan yang tangguh dalam menghadapi bencana	5.5.1.	Meningkatnya Layanan Mitigasi	5.5.1.1.	Peningkatan infrastruktur dan sarana penanggulangan bencana	<i>Smart Society</i>
					5.5.1.2.	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebencanaan	
					5.5.1.3.	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kedaruratan yang efisien, efektif dan responsive	

Misi 6: Mewujudkan Kota Banda Aceh Menjadi Kota yang ramah lingkungan, hijau, bersih, tangguh, dan berkelanjutan.

	6.1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota yang ramah lingkungan dan berkesinambungan	6.1.1.	Meningkatkan pelayanan terkait dengan tata kelola sumber daya air, tanah, ruang terbuka hijau dan udara yang berkelanjutan.	6.1.1.1	Penggunaan lokasi tada hujan	<i>Smart Environment</i>
					6.1.1.2	Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH di Kota Banda Aceh	
					6.1.1.3	Pemanfaatan teknologi GIS dan IOT	

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		DIMENSI
			6.1.2.	Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan persampahan dan pengolahan limbah dan industri rumah tangga secara aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.	6.1.2.1	Pengembangan dan penguatan Sistem <i>Waste Collecting Point</i> (WCP)	
					6.1.2.2.	Pengembangan industri Pengelolaan sampah	
					6.1.2.3.	Peningkatan pengelolaan sampah menjadi energi dan pemanfaatan untuk industri kreatif	
			6.1.1.	Peningkatan ruang terbuka yang ramah anak	6.1.1.1	Pengembangan dan pembangunan taman rekreasi di pusat Kota	
					6.1.1.2.	Pengelolaan dan pengendalian dalam memelihara kondisi taman	
					6.1.1.3.	Sinkronisasi Antara Perencanaan Pembangunan dengan kebutuhan ruang terbuka hijau, jalur sepeda dan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis lingkungan	

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		DIMENSI
	6.2	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi yang ramah lingkungan	6.2.1.	Meningkatkan penggunaan energi yang ramah lingkungan.	6.2.1.1.	Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan	<i>Smart Environment</i>
			6.2.2.	Meningkatkan Efisiensi energi	6.2.2.1.	Pengembangan <i>green building</i>	

4.2 Sasaran Banda Aceh *Smart City*

A. *Smart Governance*

Secara umum sasaran smart governance adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Sasaran Banda Aceh *Smart City* terkait dengan sub pilar dimensi *Smart governance* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.10 Sasaran Kota Banda Aceh terkait *Smart Governance*

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Public Service</i>	Layanan publik yang terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi layanan terutama <i>government to citizen</i> dan <i>government to business</i> serta juga <i>government to government</i> dan <i>government to employee</i> untuk meningkatkan kinerja ASN serta menuju ke Satu Data 2. Pengembangan aplikasi publik yang user friendly 3. Penerapan layanan dokumentasi dan informasi hukum 4. Penerapan layanan yang memenuhi Standard keamanan KAMI
	Indeks kepuasan masyarakat dan dunia bisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas layanan publik 2. Penerapan layanan pengaduan publik 3. Pembangunan Mal Pelayanan terpadu 1 (satu) atap yang melibatkan semua OPD, Kepolisian dan <i>stake holder</i>
<i>Bureaucracy</i>	Index SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Rencana Induk TIK Kota Banda Aceh 2019-2023
	Peningkatan kinerja ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan secara menyeluruh tunjangan konerja yang didukung dengan sistem E-kinerja 2. Pengoptimalan kinerja

Public Policy	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan	pengawasan internal 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrembang 2. Penguatan peran masyarakat dalam <i>Government Resource management System (GRMS)</i> Pemerintah Kota Banda Aceh
	Meningkatkan masyarakat yang menggunakan layanan	1. Pelaksanaan publikasi/promosi yang selalu update terhadap layanan-layanan publik yang ada

B. *Smart Branding*

Secara umum sasaran smart branding adalah meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Banda Aceh *Smart City* terkait dengan sub pilar dimensi *smart branding* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.11 Sasaran Kota Banda Aceh terkait *Smart Branding*

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
Tourism	Berkembangnya Ekosistem Pariwisata	1. Pembangunan dan perawatan infrastruktur pendukung budaya, wisata islami dan kebencanaan 2. Pengembangan informasi wisata digital (berbasis TIK) 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata serta meningkatkan daya saing industri pariwisata 4. Pengembangan strategi pemasaran baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional 5. Mendorong masyarakat untuk kreatif di bidang ekonomi dan

		<p>pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Mendorong masyarakat untuk mengangkat potensi wilayahnya yang dapat memberikan dampak perekonomian
<p>Business</p>	<p>Berkembangnya Ekonomi Kreatif Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Banda Aceh E-Commerce yang terintegrasi dengan website Kota Banda Aceh/Portal <i>Smart City</i> 2. Mendorong semangat wirausaha melalui organisasi kepemudaan, komunitas pemuda dan pelajar 3. Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan 4. Pengembangan kawasan wisata kuliner yang kaya rasa, kaya menu, nyaman dan aman
<p>Appearance</p>	<p>Terciptanya Wajah Kota Dengan Tata Ruang Yang Berkualitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan taman kota yang nyaman, aman dan layak bagi anak, pemuda dan lansia. 2. Peningkatan layanan publik wifi yang mengedukasi user 3. Pembuatan papan informasi nilai sejarah pada bangunan-bangunan kota pusaka 4. Pengembangan pola navigasi wisata digital

C. *Smart Economy*

Secara umum sasaran *smart economy* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran Banda Aceh *Smart City* terkait dengan sub pilar dimensi *Smart economy* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.12 Sasaran Kota Banda Aceh terkait *Smart Economy*

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Industry</i>	Terciptanya ekosistem industri pendukung <i>Smart City</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun ekonomi industri yang berdaya saing dengan memperkuat perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan daerah dan pengembangan usaha mikro. 2. Membangun dan mengembangkan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan, sebagai pendukung <i>Smart City</i>. 3. Mendorong Pengembangan Kewirausahaan di Kota Banda Aceh sebagai pendukung industri 4.0 4. Meningkatkan iklim Investasi.
<i>Welfare</i>	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Peningkatan kualitas daripada BUMG dan UKM/IKM
<i>Transaction</i>	Penguatan tatanan ekonomi Syariah di dalam ekosistem pelayanan, pengelolaan dan transaksi keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan kelompok usaha dan koperasi Syariah. 2. Peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan dan pengelolaan pendapatan daerah.

D. *Smart Living*

Secara umum sasaran *smart living* adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Sasaran Banda Aceh *Smart City* terkait dengan sub pilar dimensi *smart living* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.13 Sasaran Kota Banda Aceh terkait *Smart Living*

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Harmony</i>	Terkendalinya Tata Ruang Kota Banda Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan zonasi, perizinan,

		<p>pemberian insentif dan disincentif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan rencana kawasan di masa depan dengan desain terpadu dan berwawasan lingkungan. 3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang layak
<i>Health</i>	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan program yang mengarah pada perbaikan kesehatan masyarakat 2. Pengembangan sistem Pelayanan kesehatan terpadu dari puskesmas, bidan, rumah sakit dan dokter praktik yang terintegrasi dan ramah anak. 3. <i>Total Quality Management (TQM)</i> dan <i>Quality Assurance</i> pelayanan kesehatan
<i>Mobility</i>	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum, Prasarana dan Sarana Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang publik 2. Pengembangan sistem transportasi umum yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan transportasi <i>non-motorized</i> 3. Menerapkan kebijakan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jam puncak di pusat kota dan pinggiran kota.

E. *Smart Society*

Sasaran umum *smart society* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran Banda Aceh *Smart City* terkait dengan sub pilar dimensi *smart society* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.14 Sasaran Kota Banda Aceh terkait *Smart Society*

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Community</i>	Meningkatnya Interaksi Sosial Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peran serta kepemudaan, komunitas dan perempuan dalam kegiatan sosial 2. Penguatan peran serta Komunitas-komunitas start up dan perangkat lunak 3. Pelaksanaan kerja sama dengan institusi pendidikan dan akademisi terkait dengan pengabdian masyarakat 4. Penataan, renovasi dan pengembangan gelanggang olahraga dan pemuda Kota Banda Aceh 5. Penguatan lembaga masjid/Meunasah 6. Pemenuhan kebutuhan kaum difabel 7. Peningkatan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 8. Pelatihan usaha-usaha kreatif kepada masyarakat dan bekerja sama dengan melibatkan <i>stakeholder</i> 9. Pembangunan/pengembangan sarana/prasarana ibadah di Perkantoran dan Pasar
<i>Learning</i>	Meningkatnya Literasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan program yang mengarah kepada Pengembangan metodologi E-Learning bagi anak usia dini, SD, SMP 2. Peningkatan kesadaran pemanfaatan internet secara positif dan produktif 3. Mengkampanyekan cara bersosial media secara cerdas, sehat, anti diskriminasi dan bertanggung jawab 4. Penguatan sosialisasi qanun dan penyuluhan agama islam menggunakan pendekatan TIK

<i>Security</i>	Meningkatnya Layanan Mitigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan dan pengembangan Gampong siaga bencana 2. Penguatan komunitas berbasis <i>security</i> dalam menghadapi ancaman- ancaman terkait keamanan data 3. Peningkatan infrastruktur dan sarana penanggulangan bencana 4. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebencanaan 5. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kedaruratan yang efisien, efektif dan responsif
-----------------	-------------------------------	---

F. *Smart Environment*

Sasaran umum *smart environment* adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan. Sasaran Banda Aceh *Smart City* terkait dengan sub pilar *smart environment* dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.15 Sasaran Kota Banda Aceh terkait *Smart Environment*

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Protection</i>	Meningkatnya Proteksi Terhadap Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan RTH publik yang cukup dan berkualitas sesuai arahan Rencana Tata Ruang. 2. Memelihara, mengelola dan mengoptimalkan RTH publik agar fungsi bioekologis, sosial, ekonomi, dan estetisnya tetap terjaga 3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyanga kehidupan
<i>Waste</i>	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R 2. Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif

		<p>dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian dan perdagangan 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan persampahan. 5. Mendorong masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi melalui pendekatan <i>circular economy</i>. 6. Meningkatkan ketersediaan septic tank komunal pada daerah kumuh dan daerah terindikasi
<i>Energy</i>	Terciptanya Tata Kelola Energi Yang Berwawasan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penggunaan tenaga surya pada sarana umum Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kedaruratan yang efisien, efektif dan responsif